

A B

MAHASISWA DAN POLITIK KAMPUS

FIS P 25

SKRIPSI

50
10



Disusun Oleh:
SATYAGRAHA
NIM. 070116492

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Semester Genap 2007/2008



MAHASISWA DAN POLITIK KAMPUS

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Politik



Disusun Oleh:
SATYAGRAHA
NIM. 070116492

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Semester Genap 2007/2008

HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Bagian atau Keseluruhan isi Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis pada bidang studi dan/atau universitas lain dan tidak pernah dipublikasikan/ditulis oleh individu selain penyusun kecuali bila dituliskan dengan format kutipan dalam isi Skripsi.



Surabaya, 13 Juni 2008

Satyagraha

MAHASISWA DAN POLITIK KAMPUS

SKRIPSI

**Maksud : Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S1
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Airlangga**



Disusun Oleh:

SATYAGRAHA

NIM 070116492

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Semester Genap 2007/2008



**Untuk Kedua Orang Tuaku dan Irma,
tanpa kesabaran mereka, skripsi ini tidak akan
pernah selesai.....**

Politics, when Greed wear Mask of Morality

- Jacques Clouseau-



Change Yourself, Before You Chance the World

LEMBAR PERSETUJUAN

Mahasiswa dan Politik Kampus

Skripsi ini Disetujui untuk Diujikan,

Surabaya, 13 Juni 2008,
Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi



Drs. Haryadi, MSi
NIP 131 653 466

LEMBAR PENGESAHAN

Mahasiswa dan Politik Kampus

Skripsi ini telah diujikan pada :
Jumat, 18 Juli 2008
Pukul 10.00 WIB

Tim Penguji

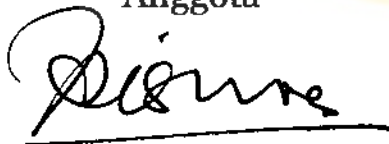
Ketua



Drs. Priyatmoko, MA

NIP 130 937 952

Anggota



Drs. Wisnu Pramutanto, M.Si

NIP 131 453 124

Anggota



Drs. Haryadi, M.Si

NIP 131 653 466

ABSTRAK

Nama : Satyagraha
NIM : 070116492
Prodi : Ilmu Politik
Judul : Mahasiswa dan Politik Kampus

Mahasiswa dengan segala dinamika kehidupannya sangat menarik untuk diikuti. Dalam kehidupan kampus ada istilah Politik Kampus dimana terdapat pertarungan dalam memperebutkan kursi di ranah “pemerintahan kampus” antar lembaga Organisasi Kemahasiswaan Ekstra Kampus atau Ormek. Ormek merupakan tempat bagi mahasiswa untuk mengaktualisasikan diri mereka selain melakukan kegiatan yang berbau akademis. Harus diakui bahwa keberadaan Ormek ini tidak dikenal dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. Namun, keberadaan mereka tidak bisa diabaikan dalam kehidupan lingkungan kampus. Pada umumnya Ormek terkait dengan aliran politik atau ideologi yang berbeda-beda.

Ormek mampu melibatkan diri ke dalam Organisasi Kemahasiswaan Intra Kampus, dalam hal ini BEM maupun BLM. Sarana yang dipakai oleh Ormek untuk melibatkan diri dalam ranah “perpolitikan kampus” adalah momen Pemilihan Umum Raya Mahasiswa atau PEMIRA. Demikian pula yang terjadi dalam Kampus FISIP UNAIR. Ada empat Kekuatan Ormek terbesar dalam kampus ini, yaitu GMNI, HMI, PMII dan KAMMI. Dan GMNI selama hampir empat tahun ini mampu menciptakan pemerintahan mahasiswa yang solid dalam bidang eksekutif maupun legislatif. Dan, setelah “berkuasa” apakah lingkungan kehidupan berdemokrasi telah berjalan dengan baik.

Kesimpulan yang didapat Ormek sebagai aktor utama dalam Politik Kampus, dengan memakai pendekatan demokrasi deliberatif, belum mampu menjalankan prinsip demokrasi secara sepenuhnya. Perhatian lebih khusus diberikan kepada lembaga legislatif, dalam hal ini BLM karena mereka memiliki masalah internal yang cukup mengganggu, yaitu buruknya komunikasi dan koordinasi di antara anggotanya. Sehingga tidak ada yang mengawasi maupun mengontrol kinerja badan eksekutif (BEM). Kemudian, dalam mengatasi perbedaan orientasi, solusi yang ditawarkan selain Musyawarah adalah sistem *voting* atau pemilihan suara, yang cenderung kurang menguntungkan kelompok minoritas.

Kata kunci : Politik Kampus, Organisasi Ekstra Kampus, Demokrasi

KATA PENGANTAR

Politik Kampus merupakan istilah yang sangat umum di kalangan mahasiswa. Terlebih lagi dalam ajang pemilihan Umum Mahasiswa atau PEMIRA. Dalam FISIP UNAIR kehidupan “perpolitikan kampus” sangat terlihat dominan. Aktor utamanya adalah para mahasiswa yang bernaung dalam Organisasi Ekstra Kampus atau Ormek. Melalui PEMIRA sebagai sarana penyaluran aspirasi masyarakat FISIP, mereka melibatkan diri kedalam Organisasi Intra Kampus (BEM dan BLM). Skripsi ini akan membahas Mahasiswa dan Politik Kampus dimana akan melihat proses politik yang terjadi dalam PEMIRA maupun dinamika peran Ormek dalam demokratisasi internal BEM dan BLM Pasca PEMIRA FISIP 2007 lalu. Tak dapat dipungkiri, kampus sebagai tempat atau sarana pendidikan seharusnya terbebas dari segala hal yang berbau politis, namun keberadaan Ormek secara informal ada secara tersirat. Melalui penelitian ini akan diketahui bagaimana mahasiswa berpolitik dan Ormek dalam lingkup BEM dan BLM mampu menerima tanggung jawab yang diberikan masyarakat FISIP melalui PEMIRA.

Peneliti sendiri melihat fenomena Ormek dalam kehidupan kampus sudah lama terjadi. Ini disebabkan peneliti sendiri berkuliah di kampus yang kehidupan “perpolitikan kampus”nya sangat kental terlihat. Dan skripsi ini juga memandangi fokus lain dari mahasiswa selain mereka aktif dalam melakukan pergerakan. Istilahnya, melihat bagaimana mahasiswa “berpolitik” Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif karena menceritakan keadaan yang ada dalam kampus FISIP sendiri dan mewawancarai para informan kunci para anggota

Ormek yang duduk dalam kepengurusan BEM maupun BLM FISIP UNAIR. Sedangkan teori yang digunakan memakai pendekatan demokrasi dari Schumpeter dan Dahl maupun demokrasi deliberatif. Hasilnya, suasana demokratis dalam Kehidupan kelembagaan seperti BEM dan BLM belum sepenuhnya terwujud. Terutama dalam ranah legislatif, karena kurangnya koordinasi dan komunikasi diantara anggotanya.

Tidak lupa, peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu kelancaran jalannya penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Diharapkan, skripsi ini di kemudian hari dapat menjadi *output* berharga bagi rekan-rekan mahasiswa, khususnya rekan-rekan yang duduk dalam kepengurusan BEM maupun BLM. Sehingga mereka dapat mengemban amanah dengan lebih baik dan bertanggung jawab.

Surabaya, 13 Juni 2008

Satyagraha

UCAPAN TERIMAKASIH

Atas terlaksananya penelitian ini, peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang selama ini telah membantu kelancaran jalannya skripsi dan, tentu saja, mendoakan agar skripsi ini cepat terselesaikan.

1. Allah SWT. Terimakasih atas berkah rahmat dan inayahNya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Drs. Priyatmoko sebagai Kepala Jurusan Ilmu Politik dan Kepala Tim Penguji Skripsi, Drs. Sutrisno sebagai Dosen Wali, Drs. Wisnu Pramutanto sebagai dosen Tim Penguji Skripsi dan Drs. Haryadi sebagai Dosen Pembimbing (maaf pak, selama ini sudah merepotkan !!)
3. Papa, Mama, Pak Bung di Jakarta n Irma di Bandung. Keluarga yang selama ini sudah mendukung dan mendoakan agar Sasha cepet lulus.
4. Eyang Gunawan Kediri dan Eyang Markasim Surabaya serta keluarga.
5. Angkatan 2001. Rezza Dian (wah, Makasih udah jadi temen selama 7 tahun ini !!), Byuzar (saya bener2 kehilangan teman baik...) Suharyadi "Toing" (kapan lulus, ing?), Syam, Ali "Gandul" (akhirnya saya lulus, ndul !), Wiwid (Makasih buat saran2nya....), Intan "Bongky" (say, lulus niy!!), Elisa (kamu kox lulus duluan, sa?), Sandra (wes sukses ojo lali konco, san...), Reza "Kethek" (masa, jadi manajer terus ??), Richa (Makasih buat doa n dukungannya !!), Wida (kamu dimana ??), Anieq (nieq, udah melahirkan ??), Ervan "Conan", Ari "Senthir", Iwan "Matori", and missing link: Letda Arief, Dwi "Sushi", Woro, Farida, Eki, Shalihin, Buwono, Yoyon, Hari, Agus, Yogi. Thanks for everything !!
6. Tema-teman politik dari angkatan 2002-2007, Team Juara Basket dekan cup 04-06 (Lutfi, Reno, Aam, Bolus, We are the champions, lads!!), teman2 di Basagi (kapan basket lagi, hiks?), Tingtoeng dan Celebataire (wah, kita gak pernah Juara !!), team futsal rabu malem.
7. Ajeng Aryani, Martha Nur Hidayati dan Mardita Ravelra Putri (Kalian selalu mejadi Inspirasi saya, terlepas sekarang kita hanya menjadi teman biasa.....)
8. Teman-teman angkatan 2001 lainnya, khususnya buat Tinta (im glad had a friend like you !!) dan Ayak (makasih buat semua "burning"nya. cepet lulus !!) Tito, Bimo, Rois, Anggie Udin, Juned, Juprianto, Deshe (siz, lulus akhirnya !!), Lana, Cak Eko (kita gak jadi wisuda bareng ??), Habib (akhirnya, gw nyusul loe !!), Yafits, Mellisa, Hellen, Doni, Tani, Poendy, Nilam, Outside 2001 : Dimas (Makasih udah liat Sidang gw !!), Ames, Andhi Homo, Vita Davina, Hanny, Hady Bogor (hidup Persib !!!), Apoel, Bang Robert, Bienhyo (hehe, angkatan tua !!), Bowo, Dinda (Jadi, S2?), Riska (makasih ya ris. udah ngenalin Dita...), Dini (din, jangan kerja mulu !!), Ade kurnia, Iyma, Putri Aisiyah (Lulus neh, put...), Juwie, Vicky, Saipul, Wahyu, Dian, Fian (fi, nikah gak bilang2...), Nadz Zahara, Nila, Arylin, Yudho Baskoro, Iska, David, Arfin, Titok, Tiko (kakakmu ini jangan diikuti ya....cepat lulus !!)

9. Keluarga Wiyung d/h Gresik (Om Kokok, Tante Dolly, Mas Bima, Mas Bram dan ninung yang membuat saya menjadi betah “hingga” tujuh tahun lamanya)+Pujo buat Pinjaman LapTopnya.....
10. Geng TaCos Jakarta (Ono, Furqon, Ari, Kevin, Fathir, Hakim, Adi).
11. Anak-anak BEM dan BLM FISIP yang menjadi narasumber saya.
12. Teman-teman KKN-BK Menur Pumpungan.
13. Kantin Bu Dalno, Bu Kirno, Bu Eko dan Kantin Mami.
14. Bagian Akademik, Pendidikan, IKOMA dan Rujukan.
15. Dosen-dosen FISIP diluar ilmu Politik yang telah membimbing dan mengajari saya, terutama yang memberikan nilai A !!!
16. For Inspiration, Magazines, Sound, Films and The Scenes: Manchester United, Nadia Saphira, Fourfourtwo, Bolavaganza, Haisoccer, Gatra, Tempo, BOLA, Kompas, TIME, Rolling Stone, The Beatles, Morrissey, Sore, The Godfather, Platoon, Rocky, Rotten Apple, CCCL.
17. Yang selalu menanyakan selama 2 tahun terakhir kapan saya lulus ??



DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| Lembar Judul | i |
| Lembar Pernyataan Tidak Melakukan Plagiat | ij |
| Lembar Judul Dalam | iii |
| Lembar Persembahan | iv |
| Lembar Motto | v |
| Lembar Persetujuan | vi |
| Lembar Pengesahan | vii |
| Abstrak | viii |
| Kata Pengantar | ix |
| Ucapan Terimakasih | xi |
| Daftar Isi | xiii |
| Lampiran | xv |
| | |
| BAB I. PENDAHULUAN | I-1 |
| I.1. Latar Belakang Masalah | I-1 |
| I.2. Perumusan Masalah | I-9 |
| I.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian | I-9 |
| I.4. Kerangka Teori | I-10 |
| 1.4.1. Demokrasi Schumpeter dan Dahl | I-10 |
| 1.4.2. Partisipasi, Persamaan Politik dan Kekuasaan Mayoritas | I-17 |
| 1.4.3. Demokrasi Deliberatif | I-24 |
| I.5. Konseptualisasi | I-26 |
| 1.5.1. Pemuda | I-26 |
| 1.5.2. Politik | I-28 |
| 1.5.3. Politik Kampus | I-30 |
| 1.5.4. Organisasi Kemahasiswaan | I-32 |
| I.6. Metodologi Penelitian | I-33 |
| 1.6.1. Tipe Penelitian | I-33 |
| 1.6.2. Lokasi Penelitian | I-35 |
| 1.6.3. Jenis Data | I-36 |
| 1.6.4. Teknik Pengumpulan Data | I-36 |
| 1.6.5. Karakteristik Informan | I-37 |
| 1.6.6. Teknik Analisis Data | I-40 |
| | |
| BAB II. DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN | II-1 |
| II.1. Sejarah Perkembangan Mahasiswa di Indonesia | II- 1 |
| II.1.1. Munculnya Pemuda dan Mahasiswa sebagai Fenomena Politik | II-1 |
| II.1.2. Mahasiswa sebagai Kekuatan Politik | II-4 |
| II.2. Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan | II-17 |
| II. 2.1. Organisasi Kemahasiswaan Ekstra Kampus | II-17 |
| II.2.1.1. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) | II-18 |

| | | |
|-----------------------|--|--------------|
| II.2.1.2. | Gerakan Nasional Mahasiswa Indonesia (GMNI) | II-19 |
| II.2.1.3. | Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) | II-21 |
| I.2.1.4. | Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) | II-22 |
| II.2.2. | Organisasi Kemahasiswaan Intra Kampus | II-23 |
| II.3. | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga | II-28 |
| II.3.1. | Sejarah Berdirinya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga | II-28 |
| II.4. | Pemilihan Umum Raya Mahasiswa (PEMIRA) FISIP UNAIR | II-30 |
| II.5. | Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Ormawa FISIP UNAIR | II-34 |
| II.6. | Badan Legislatif Mahasiswa (BLM) Ormawa FISIP UNAIR | II-38 |
| | | |
| BAB III. | TEMUAN DAN ANALISA DATA | III-1 |
| III.1. | Mahasiswa dan Persaingan Ormek dalam Kampus FISIP | III-1 |
| III.2. | Mahasiswa dan Pemilihan Umum Raya Mahasiswa (PEMIRA RAYA) FISIP | III-5 |
| III.2.1. | Persaingan Ormek Pemilihan Umum Raya Mahasiswa FISIP | III-5 |
| III.2.2. | Perebutan Kursi dalam BEM dan BLM Pasca PEMIRA | III-10 |
| III.3. | Peran Ormek dalam Proses Demokratisasi Internal BEM dan BLM | III-13 |
| III.3.1.1. | Kinerja Ormek dalam Dinamika BEM | III-13 |
| III.3.1.2. | Kinerja Ormek dalam Dinamika BLM | III-16 |
| III.4. | Mengatasi Perbedaan Orientasi dalam BEM dan BLM | III-26 |
| | | |
| BAB IV. | KESIMPULAN DAN SARAN | IV-1 |
| IV.1. | Kesimpulan | IV-1 |
| IV.2. | Saran | IV-4 |
| | | |
| DAFTAR PUSTAKA | | V-1 |
| LAMPIRAN | | |

LAMPIRAN

- ◆ **Pedoman Wawancara**
- ◆ **UU Ormawa FISIP UNAIR No.01/BLM.07/II/2006 tentang Pemilihan Umum Raya 2007**
- ◆ **Laporan KPU Mahasiswa FISIP UNAIR tahun 2007**
- ◆ **Amandemen konstitusi Organisasi Kemahasiswaan FISIP UNAIR**



Bab I

Pendahuluan

I.1. Latar Belakang Masalah

Ada tiga periode paling menentukan perjalanan bangsa yang dipengaruhi oleh peran serta Perkumpulan mahasiswa (baca: pemuda) sebagai agen perubahan. Pertama, bermula dengan adanya Organisasi perkumpulan pemuda yang didirikan oleh mahasiswa *School tot Opleiding voor Inlandsche Arsten* (STOVIA) yaitu Budi Oetomo oleh Wahidin Soedirohoesoedo, Soetomo dan teman-teman pada tahun 1908, yang meskipun bersifat primordial etnik, organisasi sosial politik pertama di Jawa ini telah berhasil memberikan semangat kepada mahasiswa dan pemuda lainnya untuk bercita-cita merdeka. Kemudian disusul dengan berbagai Organisasi perkumpulan pemuda lainnya seperti Indische Partij tahun 1912, Perhimpunan Indonesia tahun 1923 dan Kelompok Studi Indonesia (*Indonesische Studie Club*) tahun 1924. Keseluruhan tujuan dari seluruh organisasi kepemudaan pada waktu itu ialah untuk menyadarkan dan mengembangkan kesadaran nasionalisme bangsa Indonesia. Dengan diselingi oleh ikrar para pemuda untuk berbangsa, berbahasa dan bertanah air Indonesia dalam Sumpah Pemuda 1928, perjuangan mereka berhasil ketika Soekarno memproklamakan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Kedua, ketika pada awal tahun 1966, dengan kondisi perekonomian yang memburuk dan kondisi perpolitikan yang penuh dengan ketidakpastian membuat mahasiswa turun ke jalan-jalan untuk mengadakan demonstrasi agar pemerintahan

Orde Lama segera turun. Tingkat inflasi yang sangat besar telah menimbulkan kesengsaraan di berbagai bidang. Mahasiswa dengan berbagai “bendera”¹ dan upaya yang begitu besar untuk mengganti kekuasaan menghasilkan Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat agar mendesak pemerintah untuk menurunkan harga-harga kebutuhan pokok yang melambung hingga sangat tinggi. Keberhasilan mereka menurunkan rezim yang berkuasa pada waktu itu menimbulkan korban pada pihak mahasiswa, yaitu pahlawan Ampera Arif Rakhman Hakim.

Dan yang terakhir, ketika krisis ekonomi yang melanda Asia pada tahun 1997 memukul Indonesia lebih keras dibandingkan dengan negara-negara lain yang menjadi korban. Di Asia Tenggara, Indonesia dan Thailand mengalami krisis yang cukup parah. Dengan sistem perbankan mengalami berbagai banyak cobaan, membuat dua negara ini mudah diserang oleh dorongan keuangan global karena mudahnya mata uang asing yang bergerak masuk dan keluar.

Dengan krisis yang semakin meningkat pada bulan-bulan pertama tahun 1998, harga-harga kebutuhan pokok mulai merambat naik dengan cepat yang kemudian diikuti dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dimana-mana, seiring dengan krisis ekonomi yang terjadi tersebut.² Desakan, tekanan dan tuntutan untuk mundur yang diajukan kepada Soeharto dari puncak kekuasaannya mulai muncul. Pertengahan tahun 1998, krisis ekonomi yang melanda Asia membuat perekonomian Indonesia tidak stabil. Masyarakat yang terkena dampak tak langsung mulai menuntut adanya reformasi atau perubahan di berbagai bidang,

¹ Istilah “bendera” disini digunakan untuk menjelaskan banyaknya organisasi kemahasiswaan yang jumlahnya beraneka ragam.

² Suharsih dan Ign Mahendra K. *Bergerak Bersama Rakyat*, Yogyakarta: Resist Book, 2007, hlm 102

akibat pemerintah tidak kredibel dan mampu untuk menyelesaikan serta menanggulangi krisis yang sedang terjadi. Selain itu, praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) juga telah menjalar dalam setiap kehidupan birokrasi di pemerintahan. Mahasiswa menemukan momentumnya dengan timbulnya krisis ekonomi. Para aktivis mahasiswa yang bernaung dalam berbagai organisasi kemahasiswaan tidak tinggal diam dengan kenyataan yang ada. Dengan mengadakan gelombang demonstrasi dan turun kejalan, mereka menyuarakan aspirasi masyarakat terhadap kondisi perekonomian yang semakin memprihatinkan. Gelombang demonstrasi atau gerakan unjuk rasa yang dipelopori oleh para mahasiswa, hampir terjadi setiap hari. Dan perjuangan mereka pun menimbulkan korban, terdapat empat korban pada pihak mahasiswa, mereka adalah Hendriawan Sie, Elang Mulya Lesmana, Hafidhin Royan dan Hery Hartanto. Mereka kemudian dijuluki sebagai pahlawan Reformasi. Perjuangan mereka membuahkan hasil ketika tanggal 21 Mei 1998, Soeharto mundur dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia dan digantikan oleh B.J Habibie. Jatuhnya Soeharto merupakan tonggak baru bagi sejarah Indonesia.³

Tanggal 21 Mei 1998 menjadi salah satu tanggal yang sangat bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia, ketika Soeharto menyatakan berhenti dari kedudukannya sebagai Presiden. Peran mahasiswa sangatlah besar artinya dalam kejatuhan rezim orde baru. Peristiwa tersebut diawali munculnya tekanan massa mahasiswa dalam Gerakan reformasi berskala nasional. Pada saat yang sama

³ Edward Aspinall; Gerry van Klinken; Herbert Feith. *Titik Tolak Reformasi*. Yogyakarta: LkiS, 2000

dukungan dari banyak termasuk di dalam lingkaran kekuasaannya sendiri menyusut terhadap legitimasi kekuasaan Orde Baru.⁴

Apabila kita telaah lebih lanjut, munculnya gerakan mahasiswa tersebut berawal dari organisasi ekstra kampus atau yang lebih lazim kita sebut sebagai Ormek. Peran aktif Ormek dapat dikatakan cukup signifikan. Ormek pun secara tidak langsung dapat mempengaruhi kehidupan dalam kampus. Ormek dapat pula dikatakan sebagai kawah candradimuka oleh para aktivis mahasiswa. Sejarah mengenai perkembangan organisasi ekstra kampus ini sendiri telah lama muncul, bahkan jauh sebelum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)⁵ lahir tahun 1947. Jauh sebelum Indonesia merdeka para mahasiswa (baca: para Pemuda) juga telah banyak mendirikan Organisasi perkumpulan di luar sekolah mereka. Dengan tujuan yang satu, Indonesia merdeka.

Kemudian, seiring dengan berjalannya reformasi, ternyata jatuhnya rezim lama tidak otomatis identik dengan demokratisasi. Masih kukuhnya kekuatan *status quo*, tajamnya fragmentasi elemen proreformasi, kultur demokrasi yang belum terbangun, ancaman konflik horizontal, disharmoni sosial, bayang-bayang disintegrasi nasional, dan krisis ekonomi yang belum pulih, adalah beberapa faktor yang sangat potensial mengancam kelangsungan jalannya proses transisi demokratisasi.⁶

Disinilah mahasiswa dapat memegang peranannya yang terbesar. Mereka dapat mengisi dan mengawal proses transisi tersebut dengan ikut kritis terhadap

⁴ Munafrizal Manan. *Gerakan Rakyat Melawan Elit*, Yogyakarta: Resist Book, 2005, hlm 1

⁵ HMI sendiri dapat dikatakan sebagai organisasi ekstra kampus yang tertua di Indonesia. HMI diresmikan pada tanggal 5 Februari 1947.

⁶ Munafrizal Manan, *Op. Cit*, hlm 4.

kebijakan-kebijakan yang dihasilkan Pemerintah. Atau mereka dapat terjun langsung ke dalam sistem pemerintahan dan menjadi oposisi dalam kehidupan politik praktis. Dalam kampus, kenyataan yang timbul dalam kehidupan bernegara pun muncul ketika mahasiswa memiliki wadah untuk “berpolitik” yang dinamakan sebagai Organisasi intra kampus, seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Badan Legislatif Mahasiswa (BLM). Dimana, BEM dan BLM berfungsi sebagai penyalur aspirasi Mahasiswa yang lahir di dalam sistem itu sendiri. Mereka muncul, sebagai akibat, ketika adanya upaya Pemerintah untuk mengeliminasi mahasiswa dari kegiatan politik semakin kuat dengan menerapkan kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) pada tanggal 19 April 1978. Mendikbud pada saat itu dijabat oleh Daoed Joesoef. Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) berarti menata ulang dan redefinisi kampus secara mendasar, fungsional dan bertahap. Kebijakan ini membuat mahasiswa hanya boleh melakukan kegiatan kampus dan dilarang berhubungan dengan kehidupan politik praktis.

Setelah hampir sepuluh tahun masa reformasi dan telah empat Presiden menjabat belum ada perubahan secara mendasar yang terjadi di republik ini. Antrean minyak tanah dan naiknya harga kedelai masih saja terjadi. Mahasiswa sepertinya mengalami fragmentasi, disorientasi dan menyusutnya militansi.⁷ Mahasiswa melalui peran Organisasi ekstra kampus (ormek) dan Organisasi intra kampus seharusnya dapat bergerak secara berkesinambungan dalam menyuarakan aspirasi rakyat. Dalam menyikapi segala permasalahan yang sedang dihadapi oleh

⁷ Munafrizal Manan, *Op.Cit*, hlm 179

bangsa ini, mereka sangat diharapkan untuk menjadi roda penggerak untuk memimpin bangsa ini kedepan. Dengan proses demokratisasi yang sedang dan terus berjalan, tidaklah mengherankan disaat sekarang mahasiswa anggota Ormek dan Organisasi intra kampus menjalin hubungan yang erat. Bahkan tidak memungkinkan seorang anggota Ormek duduk dalam sistem dengan menjadi anggota BEM dan BLM dan ikut merumuskan segala kebijakan yang timbul dalam kampus. Diharapkan dengan kekuatan yang mereka jalin sehingga dapat lebih fokus untuk menyelesaikan proses reformasi dan masa transisi demokratisasi yang hingga kini masih terus berjalan.

Kenyataan yang muncul dalam kampus-kampus dewasa ini, memberikan minat kepada peneliti untuk mengadakan penelitian mengenai Mahasiswa dan Politik Kampus dimana ada suatu kaitan yang erat antar organisasi ekstra kampus (Ormek) dan pengaruhnya terhadap demokratisasi internal Organisasi intra kampus, dalam hal ini BEM dan BLM. Walaupun secara formal, Ormek tidak ada dalam kampus namun secara informal Ormek ada secara tersembunyi. Di kampus peneliti sendiri, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, fenomena ini sudah lazim terjadi. Ada empat Organisasi ekstra kampus yang besar dan bernaung di kampus FISIP UNAIR. Mereka adalah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI), dan Perhimpunan Mahasiswa Muslim Indonesia (PMII).⁸ Keempat kekuatan Ormek ini atau dapat

⁸ Keempat Ormek tersebut diambil dari partisipasi mereka dalam PEMIRA FISIP 2007, dimana partai yang dimotori oleh GMNI menjadi pemenang. GMNI sendiri telah mempertahankan dominasinya selama empat kali penyelenggaraan PEMIRA dan mereka menguasai posisi vital dalam kepemimpinan BEM dan BLM FISIP UNAIR.

kita sebut sebagai *The big four*, bersinergi dan berpartisipasi dalam ranah “politik praktis” di lingkungan kampus FISIP. Dapat dikatakan “politik praktis” karena di lingkungan kampus inilah mereka dapat menyalurkan hasrat dan kepentingan politik mereka, yang tentunya bertujuan secara internal maupun eksternal lingkungan kampus UNAIR.

Namun, seperti yang sering terjadi dalam ranah “politik praktis” kekhawatiran akan adanya tendensi untuk berbuat tindakan penyelewengan diantara mereka pun cukup besar. Seperti yang diutarakan Lord Acton, *power tendency to corrupt, absolut power corrupt absolutely*, bahwa barang siapa yang memiliki kekuasaan maka mereka bertendensi untuk berbuat korup. Inilah, yang menjadi perhatian penulis, apakah kondisi tersebut juga terjadi di kampus FISIP.

Kampus FISIP Universitas Airlangga telah berdiri sejak tahun 1978. Pada awalnya hanya bernama Fakultas Ilmu Sosial. Semenjak reformasi bergulir, peran serta para mahasiswanya tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Bahkan, hingga kini FISIP UNAIR kehilangan dua mahasiswanya yang diculik oleh rezim lama, yaitu Herman Hendrawan dan Petrus Bimo Anugerah. Proses demokratisasi telah memberikan kesempatan di segala bidang. Demikian pula, mahasiswa diharapkan dapat membuat segala jawaban atas permasalahan internal kampus dengan mengharapkan dukungan dari mereka sendiri. Dinamika demokratisasi kehidupan kampus FISIP pun diharapkan dapat berlangsung sejalan dan selaras.

Dengan hadirnya *the big four* diatas dalam lingkungan FISIP, timbul pertanyaan apakah mereka mampu berjalan selaras dan berpikir maju demi

kemajuan FISIP itu sendiri atau mereka hanya mereka hanya mementingkan “kendaraan politik” mereka? Inilah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Proses keterbukaan akibat demokratisasi kampus dapat menimbulkan efek samping, apabila Ormek yang berkuasa dalam kampus hanya mementingkan kepentingannya sendiri, bukan kepentingan bersama (baca: kampus).

Penelitian mengenai mahasiswa pada umumnya pun belum begitu banyak dilakukan. Penelitian oleh M. Yafis Sulaiman mengenai Mahasiswa dan Politik orde baru: Studi mengenai Fluktuasi Gerakan Mahasiswa di Surabaya dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya Tahun 1990-1998 dan Wahyu Kuncoro mengenai ideologi gerakan mahasiswa era tahun 1990-an merupakan penelitian sebelum masa reformasi tiba dan rezim lama masih berkuasa, walaupun penelitian yang dilakukan mengenai gerakan itu sendiri cukup akurat dan masih sangat relevan apabila kita ingin melakukan studi lanjutan mengenai gerakan mahasiswa di kota Surabaya. Adapun, kajian lanjutan mengenai mahasiswa itu sendiri berkuat dengan permasalahan gender. Penelitian Hany Christina mengenai dinamika gerakan kesetaraan gender dalam Ormek: Studi mengenai dinamika gerakan kesetaraan gender di Ormek HMI dan LMND cabang Surabaya dan Isnaini mengenai KOHATI (Korps HMI-wati) dan Politik Identitas Perempuan menjelaskan studi deskriptif mengenai eksistensi Gerakan KOHATI dalam HMI di Indonesia. Namun, berbicara penelitian dan kajian mengenai Mahasiswa dan Politik Kampus belum begitu banyak dilakukan.

Tidak dapat dipungkiri peran mahasiswa sebagai agen perubahan masih terasa dampaknya akibat reformasi. Terlebih dengan adanya demokratisasi dalam

kampus itu sendiri. Penelitian mengenai mahasiswa dan politik kampus ini secara tidak langsung menyangkut Ormek yang mempengaruhi demokratisasi internal organisasi intra kampus, akan membahas tentang dimensi demokratisasi yang terjadi. Politik Kampus sendiri termasuk menyangkut Pemilihan Umum Raya Mahasiswa dan pelebagaan demokrasi dalam lembaga BEM dan BLM serta relasi-relasinya. Dengan demikian, peran dan pengaruh Ormek dapat dijelaskan melalui keterlibatan mereka dalam proses politik di kampus FISIP UNAIR kemudian bagaimana proses tersebut dapat terjadi dengan meningkatnya peran serta mereka, khususnya dalam lingkungan kampus.

I.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persaingan yang terjadi antar organisasi ekstra kampus (Ormek) dalam PEMIRA FISIP 2007?
2. Apakah kinerja masing-masing organisasi ekstra kampus (ormek) dalam dinamika BEM dan BLM dalam kampus FISIP UNAIR pasca PEMIRA 2007 telah mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi?
3. Dan bagaimana antar organisasi ekstra kampus (ormek) mengatasi perbedaan orientasi dalam menjalankan roda organisasi intra kampus (BEM dan BLM) ?

I.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai politik kampus dalam kampus FISIP Universitas Airlangga adalah untuk mengetahui aktivitas dan konstalasi kehidupan politik

kampus dimana sebagai demokratisasi internal, mekanisme pelaksanaan dan prosedur formalnya dijalankan oleh organisasi intra kampus pasca berlangsungnya Pemilihan Umum Raya Mahasiswa. Selain itu, untuk mengetahui peran organisasi ekstra kampus yang sangat berperan dalam politik kampus untuk mengatasi perbedaan orientasi serta membuat suatu jaringan agar dapat lebih mengefektifitaskan organisasi intra kampus.

Penelitian ini secara tidak langsung dapat bermanfaat untuk mengetahui bagaimana dinamika kehidupan berdemokrasi bagi mahasiswa untuk berpolitik khususnya dalam kampus FISIP Universitas Airlangga dan untuk menambah khasanah literatur serta penelitian mengenai mahasiswa dimana masih terbatasnya penelitian mengenai mereka, padahal dapat dikatakan, mahasiswa merupakan *agent of change* atau agen perubahan yang tentunya sangat berhubungan dan berkaitan dengan kehidupan berpolitik.

I.4. Kerangka Teori

I.4.1. Demokrasi Schumpeter dan Dahl

Perdebatan mengenai masalah demokrasi hingga sekarang tidaklah pernah tuntas. Berbagai banyak dan macam perdebatan mengenai konsep demokrasi telah muncul berawal dari zaman Yunani kuno. Ketika itu, banyak model pemerintahan yang ditawarkan dimulai dari bentuk monarki, oligarki hingga bentuk demokrasi. Demokrasi itu sendiri bahkan telah menjadi sebuah istilah yang sangat populer,

dimana tidak ada wacana politik yang banyak dibicarakan orang seperti aktivis, politisi maupun akademisi melebihi istilah demokrasi.⁹

Perdebatan mengenai sistem demokrasi selalu berhubungan dengan masalah kehidupan bernegara, karena berbicara mengenai kehidupan bernegara memang selalu berhubungan dengan bentuk masyarakat yang ada, dimana negara merupakan perkembangan lebih lanjut dari masyarakat, sehingga persoalan demokrasi dan sistem pemerintahan demokratis akan selalu berkenaan dengan soal-soal masyarakat dan kenegaraan.¹⁰ Walaupun demikian, debat yang ramai itu biasanya tidak membuahkan kesepakatan mengenai definisi tunggal dan universal mengenai demokrasi. Demokrasi itu sendiri sering diartikan sebagai bentuk “pemerintahan oleh rakyat” (*demokratia*).¹¹ Demokrasi berasal dari kata *demokratia*, yang terdiri dari kata Yunani, “*Demos*” (rakyat) dan “*kratein*” (memerintah) sehingga dapat dimakanai secara harafiah adalah “cara memerintah oleh rakyat”. Kini, demokrasi tidak hanya merupakan ideologi yang paling disenangi, namun juga menjadi standar dan tolak ukur keabsahan pemerintahan yang paling penting.

Demokrasi itu sendiri dapat didekati melalui dua macam metode, yaitu, normatif-maksimalis dan empirik-minimalis. Dalam pendekatan pertama, demokrasi ialah bentuk ideal yang hendak diselenggarakan oleh negara. Ungkapan normatif itu biasanya tercantum dalam konstitusi masing-masing negara. Pendekatan ini berawal dari pemikiran klasik, yang memaknai bahwa

⁹ Afan Gaffar. *Politik Indonesia Transisi menuju Demokrasi*. Sebuah kata pengantar, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1999

¹⁰ Koentjoro Poerbopranoto. *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, Jakarta: Eresco. 1978. hlm. 1

¹¹ Lihat David Held. *Models of Democracy* dalam Munafrizal Manan, *Op. Cit*, hlm 26

demokrasi sebagai sumber wewenang dan tujuan. Demokrasi dipahami sebagai kehendak rakyat untuk mencapai tujuan bersama. Tidak hanya dimensi politik saja, namun juga dimensi-dimensi nonpolitik yang meliputi sosial, ekonomi dan budaya. Sedangkan pendekatan kedua, demokrasi adalah sebagaimana betul-betul terwujud dalam kehidupan politik praktis atau disebut juga sebagai *procedural democracy*.¹²

Salah satu rumusan modern mengenai demokrasi dengan prosedur empirik dikemukakan oleh Josep Schumpeter. Baginya demokrasi secara sederhana merupakan sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Kemampuan untuk memilih diantara para pemimpin politik pada masa pemilihan umum inilah yang disebut demokrasi.¹³ Ia mendefinisikan demokrasi, atau dalam istilahnya “metode demokratis” sebagai bentuk penyelesaian institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan atas nama rakyat.¹⁴ Dengan demikian, konsep demokrasi ini melihat adanya entitas yang memandang konflik kepentingan antar kelompok, kiranya dapat terwadahi melalui sebuah mekanisme kepartaian dan pemilihan umum yang teratur. Kemudian, pandangan ini menekankan pada adanya kepentingan individu yang saling lepas, pluralisme (keberagaman), yang mementingkan agregasi kepentingan individual sebagai kepentingan kelompok yang kemunculannya mengakibatkan adanya perbedaan pendapat (konflik) dalam proses politik. Sehingga dengan adanya

¹² Afan Gaffar. *Op.Cit*, hlm 3

¹³ Georg Sorensen. *Demokrasi dan Demokratisasi*. alih bahasa. I Made Krisna. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003. hlm 14

¹⁴ Lihat Joseph A. Schumpeter. *Capitalism, Socialism and Democracy* dalam Munafrizal Manan. *Op Cit*, hlm 27

perbedaan yang sangat kompleks ini maka harus ada sebuah wadah yang melingkupi dan dijamin kebebasannya. Gagasan ini secara singkat, memandang demokrasi sebagai suatu sistem untuk memproses konflik di mana partai yang kalah dalam pemilihan umum tidak berusaha merusak rezim demi mencapai tujuannya, namun bersedia menerima kenyataan dan menunggu putaran pertarungan dalam pemilihan umum berikut.¹⁵

Selain Schumpeter, adalah Robert Dahl yang juga menaruh perhatian terhadap demokrasi kontemporer. Ilmuwan ini merumuskan suatu tatanan politik yang disebutnya “poliarki” (*polyarchy*), istilah yang dipakainya dalam menyebut demokrasi. Menurut Dahl, ciri khas demokrasi adalah sikap tanggap pemerintah secara terus menerus terhadap preferensi atau keinginan warga negaranya. Tatanan politik seperti itu bisa digambarkan dengan memakai dua dimensi teoritik, yaitu *pertama*, seberapa tinggi tingkat kontestasi, kompetisi atau oposisi yang dimungkinkan, dan *kedua*, seberapa banyak warga negara yang memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam kompetisi politik itu. Arti dari keduanya ialah karena dalam sistem demokrasi intinya adalah adanya partisipasi masyarakat dalam menentukan pengambilan kebijakan, berarti haruslah ada pelibatan rakyat didalamnya yang terkandung unsur kompetisi dan kontestasi atau bahkan oposisi. Selain itu menurut Dahl untuk mengukur tingkat pelaksanaan demokratisasi dapat diukur dari berapa banyaknya pelibatan partisipasi masyarakat dalam kompetisi tersebut.

¹⁵ Lihat Adam Przeworski, *Democracy and the market: Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America* dalam Mohtar Mas'ood, *Negara, Kapital dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003. hlm 15

Inilah yang sekiranya menurut Robert Dahl diyakini akan mampu untuk menjamin bahwa sebuah pemerintahan akan terus bersikap tanggap dan pro aktif terhadap preferensi, aspirasi dan keinginan warga negara. Lanjut Dahl, kondisi tersebut dapat terwujud apabila masyarakat diberi kesempatan oleh pemerintah untuk, *pertama*, merumuskan preferensi atau kepentingannya sendiri; *kedua*, memberitahukan perihal preferensinya itu kepada sesama warga negara dan kepada pemerintah melalui tindakan individual maupun kolektif; dan *ketiga*, mengusahakan agar kepentingannya itu dipertimbangkan secara setara dalam proses pembuatan keputusan pemerintah, artinya tidak didiskriminasikan berdasarkan ini maupun asal-usulnya.¹⁶

Sedangkan untuk merealisasikan kesempatan tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan, maka lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat haruslah menjamin terciptanya kondisi seperti: *pertama*, kebebasan untuk membentuk dan bergabung dalam organisasi; *kedua*, kebebasan mengungkapkan pendapat; *ketiga*, hak untuk memilih dalam pemilihan umum; *keempat*, hak untuk menduduki jabatan publik; *kelima*, hak para pemimpin untuk bersaing memperoleh dukungan dan suara; *keenam*, tersedianya sumber-sumber informasi alternatif; *ketujuh*, terselenggaranya pemilihan umum yang bebas dan jujur; *terakhir*, adanya lembaga-lembaga yang menjamin agar kebijaksanaan publik tergantung pada suara dalam pemilihan umum dan pada cara-cara penyampaian preferensi yang lain.¹⁷

¹⁶ Lihat Robert Dahl. *Polyarchy: Participation and Opposition* dalam Mohtar Mas'od. *Ibid.* hlm 19

¹⁷ *Ibid.* hlm 20

Delapan jaminan kelembagaan diatas menurut Robert Dahl merupakan cerminan dari ukuran demokrasi dilihat dari tingkat kebebasan (liberasi) maupun keterbukaan (inklusivitas), yaitu demokrasi yang memiliki liberasi dan partisipasi masyarakat yang tinggi.

Dari semua indikator yang diajukan diatas, maka dapat disimpulkan sejumlah prasyarat apakah sebuah *political order* merupakan sistem yang demokratis atau tidak, yaitu¹⁸ :

1. *Akuntabilitas*. Dalam demokrasi, hendaknya setiap pemegang jabatan yang memperoleh kekuasaannya dari rakyat mampu untuk mempertanggungjawabkan kebijakan dan keputusan yang telah ditempuhnya. Termasuk dalam perilakunya serta keluarganya dalam arti luas. Dalam konteks ini, si pemegang jabatan harus bersedia menghadapi apa yang disebut sebagai "*public scrutiny*".
2. *Rotasi kekuasaan*. Dalam demokrasi terdapat adanya persamaan hak, kewajiban maupun kesempatan dalam memegang kekuasaan. Dengan demikian peluang untuk terjadinya rotasi kekuasaan sangatlah dimungkinkan. Sehingga peluang orang lain untuk memegang jabatan menjadi lebih terbuka dan dilakukan secara teratur dan damai. Biasanya dalam suatu negara yang tingkat demokrasinya masih rendah, rotasi kekuasaannya masih rendah pula.
3. *Rekrutmen politik yang terbuka*. Untuk mendukung adanya rotasi kekuasaan yang berkualitas, maka mutlak dibutuhkan satu sistem

¹⁸ Afan Gaffar. *Op.Cit*, hlm 7-9

rekrutmen politik yang terbuka. Dan setiap orang yang memiliki persyaratan untuk mengisi jabatan politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan tersebut.

4. *Pemilihan Umum*. Dengan adanya rotasi kekuasaan dan rekrutmen politik yang terbuka, maka dibutuhkan pemilihan umum secara teratur untuk mendukungnya. Setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat untuk memilih dan dipilih, bebas untuk menggunakan haknya sesuai dengan hatinya. Pemilihan umum ini dilaksanakan secara bebas, rahasia dan tanpa paksaan serta rasa takut untuk memilih para wakil rakyat untuk duduk dalam lembaga perwakilan rakyat.
5. *Menikmati hak-hak dasar*. Dalam suatu negara yang demokratis, setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, termasuk didalamnya adalah hak untuk menyatakan pendapat (*freedom of expression*), hak untuk berkumpul dan berserikat (*freedom of assembly*), dan hak untuk menikmati pers yang bebas (*freedom of the press*).

Dari indikator-indikator prasyarat dasar sistem demokrasi diatas dapatlah kiranya dipahami bagaimana sebuah sistem pemerintahan dapat dikatakan demokratis atau tidak, dengan begitu dapat dihindarkan suatu kecenderungan etnosentrisme, walaupun pada kenyataannya demokrasi itu sendiri lebih bersifat universal.¹⁹

¹⁹ *Ibid.* hlm 9

Dalam penelitian ini, indikator –indikator diatas dapat menjelaskan terjadinya proses politik kampus yang terjadi dalam kampus FISIP. Terutama sekali menyangkut permasalahan Pemilihan Umum Raya Mahasiswa atau PEMIRA. Dimana adanya proses yang terjadi menjelang PEMIRA maupun saat berlangsungnya PEMIRA menumbuhkan rasa demokrasi yang tinggi diantara para mahasiswa itu sendiri. Dalam konteks mahasiswa maupun Ormek, indikator Schumpeter dan Dahl ini dapat digunakan dalam menjelaskan akuntabilitas yang terjadi, rotasi kekuasaan dari anggota Ormek, proses rekrutmen yang ada diantara para anggota Ormek dalam menentukan wakil mereka dalam PEMIRA, dan tentunya proses Pemilihan Umum yang diikuti oleh komunitas FISIP dalam memilih wakil mereka dalam lembaga BEM maupun BLM.

I.4.2. Partisipasi, Persamaan Politik dan Kekuasaan Mayoritas

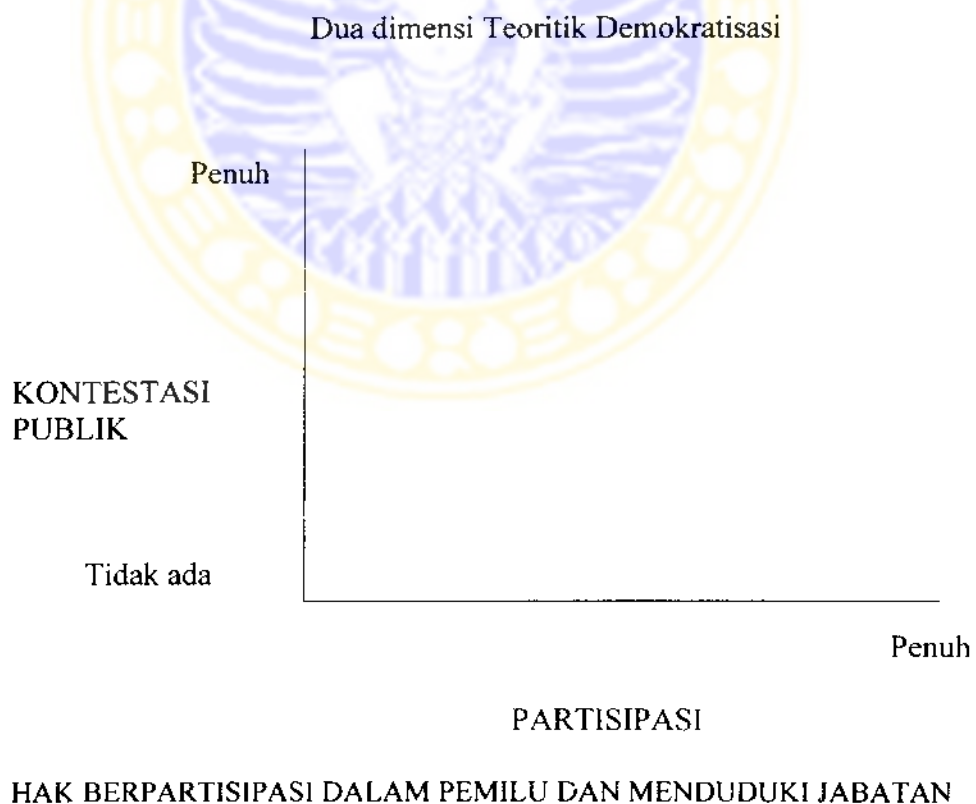
Dapat dikatakan sumbangan pemikiran dari Dahl berguna untuk mendefinisikan demokrasi sebagai suatu sistem politik. Kemudian, diilhami oleh pemikiran Dahl, Diamond, Linz dan Seymour menegaskan dengan latar belakang demokrasi diatas, demokrasi politik dapat dilihat sebagai sebuah sistem pemerintahan yang memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut²⁰ :

1. Adanya kompetisi yang luas dan bermakna diantara individu dan kelompok organisasi (khususnya partai – partai politik) pada seluruh posisi kekuasaan pemerintah yang efektif, dalam jangka waktu yang teratur dan meniadakan penggunaan kekerasan.

²⁰ Lihat Larry Diamond, Juan J. Linz dan Seymour Martin Lipset (ed), *Democracy in Developing Countries*. Vol.2 dalam Georg Sorensen. *Op.Cit.* hlm 19-20

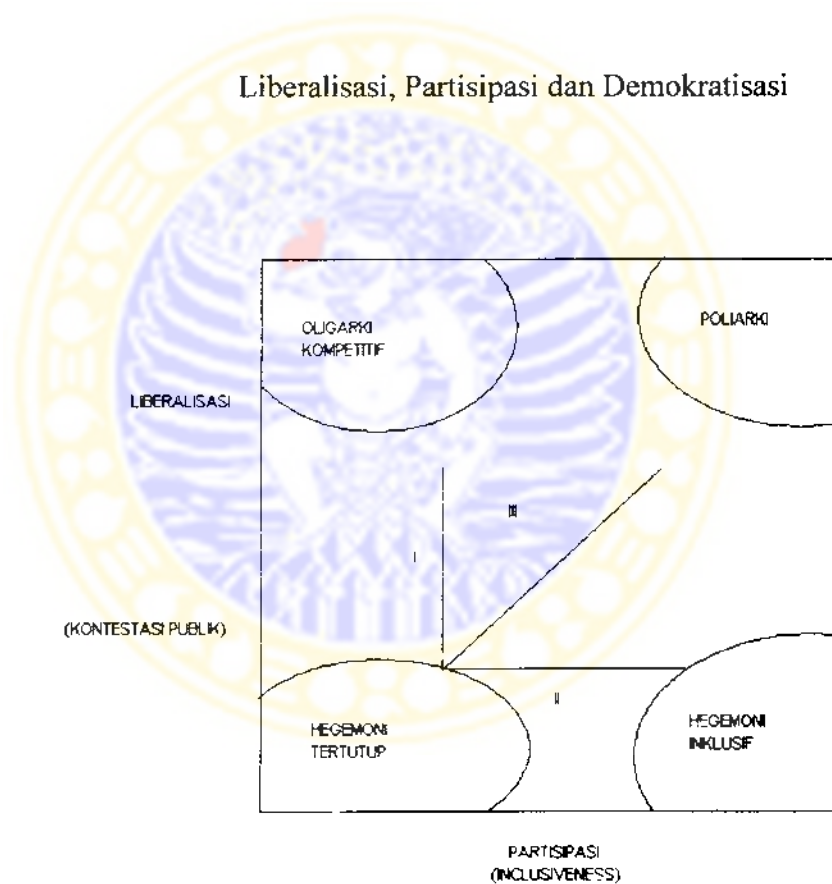
2. Tingkat partisipasi politik yang inklusif dalam pemilihan pemimpin dan kebijakan, paling tidak melalui pemilihan bebas secara teratur, dan tidak ada kelompok sosial (dewasa) utama yang disingkirkan.
3. Timbul kebebasan politik dan sipil-kebebasan berpendapat, kebebasan pers, kebebasan mendirikan dan menjadi anggota organisasi-cukup untuk memastikan integritas partisipasi dan kompetisi politik.

Dari paparan tersebut terlihat bahwa konsep demokrasi Dahl menekankan pada sikap pentingnya suatu partisipasi dan kompetisi dalam demokrasi. Berikut bagan yang menjelaskan pentingnya partisipasi dalam pemilihan umum dan menduduki suatu jabatan.



Dari bagan tersebut terlihat seberapa tinggi tingkat kontestasi, kompetisi dan oposisi yang dimungkinkan dan seberapa banyak warganegara yang memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam kompetisi politik itu.²¹

Kemudian berdasarkan dua dimensi tersebut Dahl membuat tipologi empat sistem politik: “hegemoni tertutup”, “oligarki kompetitif”, “hegemoni inklusif”, dan “poliarki”. Bagan dari tipologi empat sistem politik tersebut di bawah ini.



Dalam bagan Dahl menunjukkan kemungkinan perubahan sistem “hegemoni tertutup”, dimana tingkat kontestasi publik dan partisipasi sama-sama

²¹ Mohtar Mas'oeid. *Op.Cit*, hlm 17

rendah, ke tipe sistem lain. Jalan ke III itulah yang dimaksud dengan “demokratisasi”, yaitu jalan menuju sistem dimana tingkat kontestasi publik dan partisipasi sama-sama tinggi. Pemikiran ini merupakan mekanisme politik yang dianggap dapat menjamin bahwa yang memerintah akan terus menerus bersikap tanggap terhadap preferensi dan keinginan warganegaranya.²²

Dengan model Dahl diatas, dapat dijelaskan bahwa tingkat partisipasi sangat jelas merupakan elemen terpenting dalam demokrasi modern. Semakin tinggi tingkat partisipasi dalam suatu masyarakat menandakan semakin sehat kehidupan berpolitik pada suatu wilayah. Dalam kata lain, apabila suatu asosiasi masyarakat mempunyai hak yang sama dalam partisipasi dalam prosedur keputusan mereka dan dapat memutuskan secara langsung mengenai isu-isu mereka, demokrasi dalam hal ini, proses partisipasi telah berjalan dengan baik.²³

Adanya partisipasi membuat kita mengacu pada semua aktivitas yang sah oleh semua warga negara yang kurang lebih langsung dimaksudkan untuk mempengaruhi pemulihan pejabat pemerintahan dengan tindakan-tindakan yang telah mereka ambil. Definisi tersebut masih merupakan garis besar namun cukup untuk membatasi bidang kepentingan kita. Lebih lanjut istilah ini menunjukkan bahwa pada dasarnya kita sangat berkepentingan dalam partisipasi “politik”, yaitu dalam tindakan yang dimaksud untuk mempengaruhi keputusan “pemerintah”.²⁴ Dalam kesempatan yang lain, J.S Mill berargumen bahwa dalam melakukan

²² *Ibid.* hlm 18

²³ Peter Jones. “Persamaan Politik dan Kekuasaan Mayoritas” dalam David Miller dan Larry Siedentop (ed), *Politik dalam Perspektif Pemikiran, Filsafat dan Teori*. Koordinator penerjemah Nazaruddin Syamsuddin. Jakarta: CV Rajawali. 1983. hlm 253

²⁴ Norman Nie dan Sidney Verba. “Partisipasi Politik”, dalam Roy Macridis dan Bernard Brown (ed). *Teori Perbandingan Politik*. Alih bahasa A.R Henry Sitanggang. Jakarta: Erlangga. 1996. hlm 350

partisipasi terhadap keputusan-keputusan yang akan menentukan kehidupannya, seorang individu mengalami peningkatan secara moral dan intelektual sekaligus.²⁵ Dan dalam melakukan prinsip partisipasi inilah demokrasi kembali teruji karena partisipasi itu sendiri menunjukkan adanya kemungkinan untuk memiliki pengaruh terhadap keputusan-keputusan. Lebih lanjut, demokrasi dengan konsep partisipasinya belum dapat menjelaskan apakah ini merupakan prosedur yang adil ataukah tidak. Karena tidak semua ide, dimana keputusan-keputusan telah dibuat dapat dijalankan dan diterapkan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa demokrasi masih merupakan suatu bentuk dari prosedur keputusan yang cocok untuk diterapkan pada suatu organisasi daripada negara.²⁶

Disinilah timbul konsep persamaan politik yang berkaitan erat dengan prinsip mayoritas. Persamaan politik meminta bahwa masing-masing harus memiliki hak yang sama dalam partisipasi, dan secara khusus, bahwa masing-masing harus memiliki suara dan setiap suara harus masing-masing diperhitungkan. Apabila terdapat suatu ketidakselarasan dalam pilihan tersebut maka setiap usul yang dipilih oleh mayoritas harus dipilih dan diambil. Pendapat ini digunakan tidak hanya untuk membela sepenuhnya mayoritas, namun juga secara relatif, untuk beberapa alasan, apabila suatu mayoritas yang mutlak tidak tercapai.²⁷

Apabila dalam prinsip partisipasi memunculkan mayoritas, tentulah timbul minoritas. Ini menimbulkan minoritas “kurang terdengar” dan, mungkin saja, kurang teraspirasikan. Disinilah setiap keinginan dan aspirasi setiap individu

²⁵ Peter Jones. *Op. Cit.*, hlm 255

²⁶ *Ibid.* hlm 259

²⁷ Lihat Robert Dahl, *A Preface to Democracy theory* dalam Peter Jones. *Ibid.* hlm 261

sama dipertaruhkan karena setiap kepentingan yang timbul tentulah tidak menghasilkan kepuasan yang sama. Demikian pula dengan mayoritas itu sendiri yang belum tentu bertindak bijaksana dalam pelaksanaan kebijakannya. Maka, dalam suatu pemerintahan mayoritas, minoritas menjadi persisten karena adanya anggapan bahwa mereka tidak diperlakukan dengan adil. Walaupun tampaknya sederhana, minoritas dalam perjalanan demokrasi itu sendiri, mungkin saja dapat mengganggu jalannya proses demokrasi. Asumsi umum, suatu minoritas demokratis dapat secara sah mengeluh dalam dua keadaan, *pertama*, jika hak-hak mereka disalahi, atau dengan cara-cara tertentu dianiaya, ditekan atau dieksploitir dan *kedua*, jika adanya kepentingan khusus tidak diperhatikan oleh “mayoritas apatis”. Namun apabila secara persisten pula, selalu berada dalam pihak yang kalah, dan tidak mampu untuk mengemukakan segala keluhan mereka, maka posisinya biasanya akan lebih dianggap kurang beruntung daripada tidak adil.²⁸ Apabila keadaan *status quo* ini terus berjalan dan cenderung untuk menimbulkan konflik, maka solusi yang timbul biasanya berupa sistem voting dimana konsep *one man, one vote* dapat menjadi kompromi yang adil.²⁹ Sehingga, pemungutan suara dapat menjadi satu-satunya tindakan politik bagi sebagian besar rakyat untuk berpartisipasi.³⁰

Tentunya minoritas yang bertahan dapat dianggap sebagai “jelek” atau “tidak sehat” untuk perjalanan demokrasi itu sendiri, karena minoritas biasanya cenderung untuk tidak mengikuti mayoritas. Juga minoritas apabila dalam

²⁸ *Ibid.* hlm 282

²⁹ Inilah yang menimbulkan konsep mayoritas dimana aturan dasar dari “prinsip mayoritas” tersebut yaitu dimana suatu proposal harus diterima apabila menerima dukungan sedikitnya 50+1 suara yang diberikan.

³⁰ Norman Nie, *Op.Cit.*, hlm 354

keadaan terdesak dapat saja menyalahgunakan posisi mereka. Lebih lanjut, dimana ada mayoritas yang berfluktuasi, individu yang berada dalam mayoritas sekarang mengetahui bagaimana ia mungkin saja menjadi bagian dalam minoritas besok. Oleh, karenanya ia memiliki rangsangan untuk tidak menyalahgunakan posisi mayoritasnya, lagipula keberlangsungan sistem demokrasi ini sendiri juga memerlukan dukungan dan kerjasama kedua belah pihak.

Oleh karena sifat persamaan politik itu sendiri, konsep mengenai kekuasaan mayoritas berlaku pada kelompok-kelompok non-negara dan keanggotannya bersifat kesukarelaan.³¹ Karena, apabila timbul perbedaan-perbedaan dalam kemampuan individu, namun menjadi kecil bila memiliki persamaan kemampuan individu dalam bidang maupun masalah-masalah politik. Sehingga, kemungkinan terbesar dalam pelaksanaannya lebih cocok dan banyak diterapkan pada kelompok-kelompok asosiasi.

Dalam konteks FISIP sendiri, pendekatan ini digunakan dalam menjelaskan proses yang terjadi setelah PEMIRA berakhir, dimana dalam proses pemilihan umum ada pihak yang menjadi pemenang dan pihak yang kalah. Ini dapat menimbulkan suatu "kecemburuan" apabila pihak yang kalah menjadi pihak minoritas. Tentunya kesempatan mereka untuk unjuk gigi kembali hanyalah dalam ajang pemilihan umum. Dalam lingkungan kampus, ajang PEMIRA menjadi ajang yang tepat untuk menunjukkan eksistensi suatu kelompok.

³¹ Peter Jones. *Op.Cit*, hlm 283

I.4.3. Demokrasi Deliberatif

Teori Demokrasi Deliberatif lahir dikarenakan adanya keterbatasan dalam teori demokrasi pada umumnya. Salah satu perintisnya, James Fishkin melihat adanya apatisme dan kurangnya ketertarikan rakyat pemberi suara terhadap politik dalam kehidupan sehari-hari, serta adanya elitisme partai politik dan kelompok penguasa. Penganut demokrasi deliberatif menganggap demokrasi yang ada pada saat ini, baik demokrasi langsung maupun representatif, sebagai pertempuran pribadi, politik selebritis, “debat” yang digaung-gaungkan dan perlombaan demi memenuhi ambisi pribadi.³²

Lanjut Fishkin, kondisi ini menciptakan jumlah penurunan suara apabila ada kelompok yang tidak disukai. Ajang debat pun hanya di permukaan karena tidak solutif sehingga membuat para pemilih dengan jelas menunjukkan ketidakpuasan serta rasa keterikatan terhadap proses politik. Apalagi fokus perhatian para politikus hanya kepada pribadinya bukan kebijakannya membuat memilih para kandidat dan argumentasi yang masuk akal tidak lebih dari sekedar memilih sabun cuci.³³

Dengan pemikiran diatas timbul pemikiran mengenai pemikiran demokrasi baru yang menawarkan bentuk-bentuk partisipasi baru yang tidak hanya memberikan kekuatan terhadap para pemilih, namun juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk memikirkan dan mengembangkan kekuatan tersebut secara bijaksana. Demokrasi deliberatif sendiri dapat dilihat sebagai pandangan yang menempatkan deliberasi publik atas warga negara yang bebas

³² David Held. *Models of Democracy*. Penerjemah Abdul Haris. Jakarta: Akbar Tandjung Institute. 2006. hlm 273

³³ *Ibid.* hlm 276

dan setara sebagai inti legitimasi pembuatan keputusan politik dan pemerintahan sendiri. Legitimasi politik yang dimaksud tentunya tidak akan mengubah perolehan suara itu sendiri, tetapi untuk membekali keputusan publik dengan alasan dan penjelasan yang kuat. Tujuannya adalah untuk mengubah pilihan pribadi melalui suatu proses deliberasi menjadi suatu hal yang posisinya kuat dalam menghadapi ujian publik.³⁴

Dapat dikatakan deliberasi mampu meminimalisir keterbatasan pandangan pribadi dan meningkatkan kualitas pembuatan keputusan publik dengan cara-cara seperti, *pertama*, melalui adanya pertukaran informasi dan wawasan, *kedua*, dengan mengungkap bagaimana terbentuknya suatu pilihan berkaitan dengan ideologi yang dianut oleh individu tertentu, *ketiga*, dengan mengganti “bahasa kepentingan” dengan “bahasa rasionalitas”. Dengan cara-cara diatas penganut demokrasi deliberatif berharap dapat memperkuat legitimasi prosedur dan kelembagaan demokrasi dengan cara mengikutsertakan elemen-elemen deliberasi yang diciptakan untuk meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi dan kualitas hasil proses demokrasi sendiri. Secara, singkat demokrasi deliberatif merupakan demokrasi yang berjalan dengan adanya deliberasi antara warga negara yang setara dan berlangsungnya proses tersebut mungkin terjadi apabila didukung oleh lembaga-lembaga institusi yang ada.³⁵

Pendekatan teori ini digunakan untuk menjelaskan proses yang terjadi ketika para anggota wakil yang terpilih dalam PFMIRA menjalankan tugas mereka dengan baik ataukah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

³⁴ *Ibid.* hlm 279

³⁵ *Ibid.* hlm 280

Karena peran Ormek yang sangat jelas terlihat disini, walaupun secara formal mereka “tiada”, namun dalam ajang PEMIRA eksistensi mereka ada secara informal dengan “sembunyi” dalam jubah kerpartaian.

I.5. Konseptualisasi

I.5.1. Pemuda

Membicarakan pemuda di saat sekarang ini sepertinya merupakan kajian yang tiada habisnya. Peran pemuda dalam perjalanan bangsa ini sangatlah besar arti dan maknanya. Disaat para golongan tua dianggap sudah tidak mampu untuk memimpin bangsa, di tangan para pemuda inilah masa depan bangsa ini terletak. Golongan muda dapat dikatakan sebagai aktor sejarah yang memiliki fungsi politis tersendiri. Kedudukan politis mereka bahkan agak sentral, karena aksi-aksinya selalu dramatis dan lebih seru daripada dunia politik kaum dewasa.³⁶ Mereka adalah makhluk dengan semangat keingintahuan dan keinginan yang tinggi, yang mendorongnya melakukan pengembaraan fisik maupun intelektual. Dinamika dari pemuda inilah yang seringkali menghasilkan suatu perubahan sosial yang sangat fundamental.³⁷ Dengan semakin majunya masyarakat dewasa ini, pemuda dianggap sebagai manusia yang penuh potensi. Secara etimologis kata “pemuda” merujuk pada pengertian tentang kategori demografi. Sehingga kata “pemuda” tidak mengandung diffrensiasi berdasarkan pendidikan dan status sosial.

³⁶ Onghokham. “Angkatan Muda dalam Sejarah dan Politik”, dalam Farchan Bulikin (ed). *Analisa Kekuatan Politik di Indonesia: Pilihan Artikel Prisma*, Jakarta: LP3S. 1988. hlm 112

³⁷ Diambil dari skripsi M.Yafis Sulaiman, *Mahasiswa dan Politik Orde Baru: Studi tentang fluktuasi Gerakan Mahasiswa di Surabaya dan Faktor-Faktor yang mempengaruhinya tahun 1990-1998*, Surabaya, FISIP UNAIR, 1999. hlm 54

Pada umumnya mereka yang dinamakan sebagai pemuda adalah mereka yang berumur dibawah 30 tahun dan memegang peranan penting pada saat tertentu. Dapat dikatakan saat-saat tersebut adalah saat perang dan revolusi ketika semangat dan fisik mereka sangat dibutuhkan. Pada peristiwa-peristiwa demikian, masyarakat biasanya baru membicarakan dan mengidealisir pemuda sebagaimana mestinya.

Dunia politik dan ideologi adalah dunia kaum dewasa, sebab keduanya berakar dalam kesatuan-kesatuan sosial yang produktif. Disini pemuda biasanya dilihat sebagai golongan yang sedang diintegrasikan ke dalam dunia dewasa itu. Pemuda di bawah umur 30 tahun belum terkategori ke dalam satuan-satuan sosial/produktif. Ini dapat dijelaskan melalui fase-fase hidup seorang pemuda.

Dalam tahap-tahap hidup seorang pemuda terpelajar dapat kita ambil contoh: pada umur 19 tahun dia lulus sekolah menengah dan memasuki universitas, untuk mengenyam pendidikan tinggi selama 5 tahun atau bahkan lebih. Disinilah mereka memiliki tanggung jawab sebagai mahasiswa, kaum intelektual dan cendekiawan. Setelah itu mereka mengambil orientasi lain dan mencari pekerjaan. Paling cepat setelah mereka berumur 25 tahun, pemuda memegang suatu kedudukan sosial-ekonomis; atau ketika mereka mendekati usia 30 tahun. Baru ketika mereka lulus dari sekolah menengah itulah pemuda terpelajar mulai sadar akan persoalan-persoalan politis, sosial, ekonomi dan mengetahui secara singkat mengenai dunia ini.³⁸ Namun seiring berkembangnya zaman, banyak literatur membuktikan bahwa mahasiswa yang tergolong pemuda memiliki

³⁸ Onghokham. *Op. Cit.* hlm 114

peranan lebih besar dalam perubahan sosial politik yang timbul dalam masyarakat. Proses yang terjadi dapat berlangsung lebih cepat dan akomodatif ketika pemuda lebih banyak mendapatkan akses teknologi dan informasi, sehingga mereka dapat menjadi lebih kritis terhadap datangnya perubahan yang dapat muncul secara tiba-tiba dewasa ini.

I.5.2. Politik

Menurut Ramlan Surbakti ada lima konsep mengenai Politik. Konsep tersebut sangat bermanfaat dalam memandang persoalan – persoalan politik, baik yang telah terjadi di masa lalu, masa sekarang maupun di masa mendatang. Konsep pertama merupakan konsep klasik. Dimana dalam konsep klasik, politik dilihat sebagai suatu asosiasi warga negara yang berfungsi membicarakan dan menyelenggarakan segala hal ikhwal yang menyangkut kebaikan bersama seluruh anggota masyarakat. Kemudian konsep kelembagaan, dan pandangan ini melihat bahwa politik sebagai sesuatu hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara. Dalam konsep ini Max Weber menjelaskan bahwa negara sebagai komunitas manusia dipandang secara sah untuk menggunakan paksaan fisiknya dalam suatu wilayah tertentu.

Konsep ketiga, merupakan konsep kekuasaan. Dalam pandangan ini politik dilihat sebagai kegiatan mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Dan oleh karenanya, politik dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari hakikat, kedudukan, dan penggunaan kekuasaan dimanapun kekuasaan itu ditemukan. Selanjutnya, konsep fungsionalisme. Fungsionalisme

memandang politik sebagai kegiatan elit politik dalam membuat, merumuskan dan melaksanakan kebijakan umum. Dan konsep yang terakhir, adalah konsep yang memandang politik dengan pendekatan konflik. Disini, politik dilihat sebagai kegiatan untuk mempengaruhi proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum dengan tujuan untuk mendapatkan dan mempertahankan nilai-nilai. Perbedaan pendapat, perdebatan, persaingan, pertentangan maupun perebutan nilai-nilai itulah yang disebut dengan konflik.³⁹

Selain kelima konsep politik tadi, Miriam Budiarjo juga mengungkapkan lima pandangan politik. Pandangan atau konsep negara (*state*) melihat bahwa politik merupakan ilmu yang berhubungan dengan lembaga-lembaga kenegaraan serta bentuk formilnya. Secara harafiah negara itu sendiri dapat berarti organisasi yang berada dalam suatu wilayah memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan yang ditaati oleh rakyatnya. Kemudian politik juga memiliki fungsi kekuasaan (*power*). Konsep disini hampir sama dengan konsep kekuasaan diatas, dimana kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah-laku seseorang atau kelompok lain sesuai dengan kepentingan sang pelaku. Biasanya para sarjana yang melihat politik melalui pendekatan ini, beranalisa bahwa politik adalah semua kegiatan dalam rangka memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan. Konsep selanjutnya adalah konsep pengambilan keputusan (*decision making*) yaitu menunjuk kepada proses yang terjadi hingga keputusan itu tercapai. Pengambilan keputusan disini dapat dimaksudkan bahwa

³⁹ Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo. 1992. hlm 2-8

politik sangat erat kaitannya dengan keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif dan yang mengikat seluruh masyarakat.

Kemudian, konsep kebijaksanaan umum (*public policy*) melihat dimana adanya suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan itu dan mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. Dapat dikatakan aspek kebijaksanaan umum menganggap bahwa setiap masyarakat memiliki tujuan bersama. Dan yang terakhir, melihat bahwa politik menegaskan adanya pembagian (*distribution*) dan alokasi (*allocation*). Hal yang terpenting disini adalah bagaimana caranya untuk membagikan dan mengalokasikan nilai-nilai secara mengikat dan merata, karena apabila pembagian ini tidak merata akan cenderung untuk menimbulkan konflik.⁴⁰

I.5.3. Politik Kampus

Politik bukanlah merupakan sesuatu yang asing, apalagi untuk ditakuti dalam menghadapi dan menjalaninya, karena politik itu sendiri bisa memberikan pembelajaran bagaimana untuk selalu bertindak dan membuat keputusan yang tepat dalam membangun, baik itu sebuah organisasi maupun untuk lingkup yang lebih luas adalah Bangsa dan Negara. Keberadaan politik sendiri sangatlah strategis karena akan membentuk jiwa penguasa dan pemimpin. Politik sendiri dapat dikatakan merupakan wadah yang mengarah pada kekuasaan

⁴⁰ Miriam Budiharjo. *Dasar-dasar ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia. 1977. hlm 9-13

Sedangkan kampus merupakan tempat dimana semua orang yang mempunyai idealisme menggunakan keintelektualannya, serta sebagai tempat dalam mengembangkan diri sehingga memperoleh ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih baik. Karena kampus merupakan rumah ilmu pengetahuan untuk mencari dan mengembangkan ide yang dimiliki sehingga tercerahkan. Dalam kehidupan Perguruan Tinggi atau kampus terdiri dari berbagai macam lembaga program studi dan fakultas. Dari program studi dan fakultas inilah tempat pengembangan minat dan bakat bagi mahasiswa, dimana tempat ini merupakan sarana yang strategis untuk mengetahui tujuan yang akan dijalani.⁴¹

Wadah yang dibangun di tiap-tiap program studi maupun fakultas untuk pengembangan diri sesuai dengan minat dan bakat ini ditampung oleh Himajur dan BEM Fakultas. Maka dari itu, politik yang akan dijalani dari kehidupan kampus adalah pemilihan ketua atau presiden dari tiap-tiap baik program studi, BEM Fakultas maupun BEM Perguruan Tinggi. Di lingkungan kampus dapat dikatakan akan ditemui politik kampus ketika para mahasiswa bersaing dalam pemilihan umum kampus. Mengadakan pemilihan umum adalah salah satu sarana yang paling diandalkan mahasiswa untuk melakukan proses politik. Hampir, seluruh proses politik seperti melakukan konsolidasi kekuatan, musyawarah antar anggota maupun dengan orang lain, mengadakan lobi maupun diplomasi dan tidak menutup kemungkinan untuk berkoalisi, dilakukan oleh mahasiswa menjelang diadakannya pemilihan umum mahasiswa. Semua tindakan tersebut tentunya

⁴¹ <http://hmi-saintek.blogspot.com/2008/04/arah-politik-kampus-miniatur.html/> Diakses tanggal 21 Mei 2008 17.15

dalam rangka untuk memberikan tawaran kepada kekuatan politik yang lain dalam kehidupan mahasiswa agar memiliki pandangan tujuan dan visi serta misi yang sama. Dapat dikatakan persaingan politik dalam pemilihan ketua atau presiden BEM hampir sama dengan percaturan politik dalam pemilihan presiden dalam suatu negara.⁴²

I.5.4. Organisasi Kemahasiswaan

Pada dasarnya organisasi kemahasiswaan merupakan suatu wadah yang dibentuk dengan tujuan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa yang sarat akan idealis dan kreativitas. Dahulunya, alasan mengapa terbentuknya organisasi ini ditujukan hanya sekedar untuk memfasilitasi kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa dengan tujuan sebagai ajang keterampilan mahasiswa sehingga mahasiswa diharapkan tidak jemu dalam melaksanakan aktifitas rutin kampus yaitu perkuliahan.

Seiring dengan perkembangan zaman, organisasi mahasiswa juga berperan sebagai wahana mahasiswa dalam menganalisis, mengkritisi, serta menyampaikan pandangan terhadap gejolak – gejolak sosial dan budaya yang tidak hanya dalam ruang lingkup kampus tetapi juga telah berkembang hingga ke lingkungan masyarakat secara umum. Tentu saja, perkembangan tersebut tidak lepas dari kematangan serta kedewasaan dari organisasi mahasiswa tersebut hingga saat ini mahasiswa (melalui organisasi mahasiswa) seringkali dikenal sebagai pembela

⁴² Sarwono Kusumaatmadja. *Politik untuk Kaum Muda*. Depok: Koekoesan. 2007. hlm 8

rakyat yang teraniaya dan tidak dapat dipungkiri lagi bahwa mahasiswa memiliki kedekatan emosional dengan rakyat.⁴³

Dalam perkembangannya, organisasi kemahasiswaan terdiri dari dua, yaitu Organisasi Kemahasiswaan Ekstra Kampus dan Organisasi Kemahasiswaan Intra Kampus. Keduanya sangat bergantung dalam kehidupan kampus di saat sekarang ini dan saling berkontribusi.

I.6. Metodologi Penelitian

Adapun dalam membahas atau merencanakan suatu penelitian diperlukan metodologi penelitian. Metodologi penelitian sangat penting artinya dalam proses penelitian itu sendiri. Dengan semakin kompleksnya permasalahan sosial yang timbul akhir-akhir ini, tidaklah mengherankan apabila metodologi penelitian juga memerlukan suatu pengembangan. Menurut Tejoyuwono (1991), metodologi penelitian ialah suatu ilmu tentang kerangka kerja dalam melaksanakan penelitian yang bersistem. Maka, secara singkat fungsi metodologi itu sendiri adalah sebagai pondasi agar penelitian ini dapat tertata dan terstruktur dengan baik sehingga dapat menghasilkan penelitian yang berkualitas.

I.6.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena adanya fenomena sosial dengan dimensi sosial yang berbeda-beda tidak dapat dijelaskan dalam pandangan materi dan

⁴³ http://www.bung-hatta.info/tulisan_178_ubh Diakses pada 18 Mei 2008 14.09

fisika saja. Pengaruh empirisme⁴⁴ terhadap pendekatan kualitatif terletak pada bagaimana upaya pendekatan kualitatif memecahkan misteri makna berdasarkan pada pengalaman peneliti dan obyek kajiannya. Secara tidak langsung, pendekatan kualitatif memandang bahwa makna adalah bagian yang tak terpisahkan dari pengalaman seseorang dalam kehidupan sosialnya bersama orang lain.⁴⁵ Inilah yang membuat peneliti untuk memakai pendekatan kualitatif dalam penelitian ini. Metode penelitian kualitatif juga digunakan dengan alasan *pertama*, lebih mudah menyesuaikan di lapangan apabila berhadapan dengan kenyataan *ganda*; *kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hakikat peneliti dengan narasumber, dan *terakhir*, lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.⁴⁶ Dalam penelitian kualitatif ini akan memakai tipe penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau melukiskan realitas sosial yang kompleks yang ada dalam masyarakat.⁴⁷ Sehingga, penelitian sosial dengan menggunakan format deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada dalam masyarakat menjadi obyek penelitian dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang

⁴⁴ Pada abad ke 16-17 ada dua pendekatan dalam paradigma penelitian, yaitu: Paham rasionalisme yang dikembangkan oleh Plato dan Descartes yang menegaskan bahwa sumber pengetahuan yang dapat dipercaya adalah akal (rasio) dan akal tidak memerlukan pengalaman inderawi (sensual). Dan, paham empirisme yang dikenibangkan Locke, Bekerley dan Hume yang mengemukakan bahwa pengetahuan adalah catatan-catatan yang merupakan hasil dari pengalaman inderawi dan apa yang tidak dijabarkan dalam pengalaman bukanlah pengetahuan.

⁴⁵ Burhan Burgin. *Penelitian kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2007. hlm 5

⁴⁶ Lihat Lexy Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif* dalam Ida Bagoes Mantra. *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004. hlm 27

⁴⁷ Ida Bagoes Mantra, *Ibid*. hlm 38

kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.⁴⁸ Disini peneliti berusaha untuk menjelaskan fenomena politik kampus yang terjadi dalam kampus FISIP Universitas Airlangga dengan memakai pendekatan penelitian deskriptif kualitatif.

1.6.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini mengambil lokasi di lingkungan kampus FISIP Uninersitas Airlangga, Surabaya. Disini peneliti, melihat fenomena proses politik yang terjadi dan berlangsung dalam kampus FISIP. Dan peneliti akan melihat dan mengambil narasumber para anggota BEM dan BLM yang telah terpilih dalam PEMIRA 2007 lalu. Kota Surabaya terpilih dalam penelitian ini sebab tidak dapat dipungkiri kota Surabaya menjadi salah satu barometer kekuatan pergerakan mahasiswa, selain Jakarta, Bandung, Yogyakarta dan Makassar.

Sedangkan kampus Universitas Airlangga sendiri, dapat dikatakan sebagai salah satu perguruan tinggi terbesar dan ternama di Indonesia. Dan FISIP sebagai kampus perubahan mempunyai pengaruh yang besar dalam proses berlangsungnya pergerakan mahasiswa dan mahasiswanya disebut-sebut sebagai para pemuda yang kritis terhadap perubahan. Selain itu, peran terbesar dari penelitian ini, yaitu peneliti juga berkuliah di kampus FISIP Unair sehingga diharapkan penguasaan obyek penelitian dapat memudahkan jalannya penelitian ini.

⁴⁸ Burhan Burgin, *Op.Cit*, hlm 68

I.6.3. Jenis Data

Data merupakan kumpulan dari fakta, dan menurut sumbernya dapat dibedakan menjadi dua⁴⁹, yaitu

1. Data Primer, merupakan hasil wawancara dengan informan yang telah ditentukan sebelumnya dan hasil data yang diperoleh langsung oleh peneliti langsung dari obyek penelitian. Wawancara tersebut dapat berlangsung antara informan kunci para anggota yang duduk dalam struktur kepengurusan BEM dan BLM FISIP Universitas Airlangga.
2. Data Sekunder, merupakan data yang bersifat sebagai pendukung atau penunjang keberadaan dan kebenaran data primer. Data dapat diperoleh melalui lembaga maupun instansi yang terkait. Dalam hal ini BEM maupun BLM FISIP universitas Airlangga.

I.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Dapat dikatakan data merupakan fakta sosial yang dapat mendukung jalannya penelitian. Data dalam penelitian dapat diperoleh melalui cara-cara, yaitu:

1. Wawancara. Bentuknya dalam penelitian kualitatif merupakan wawancara terhadap informan dengan menggunakan pedoman wawancara yaitu membuat catatan tentang pokok-pokok yang akan ditanyakan sesuai dengan tujuan penelitian. Wawancara dapat dilakukan secara tidak terstruktur, karena pokok-pokok yang ingin ditanyakan tidak perlu

⁴⁹ Lihat Sudarso, "Metode dan Prosedur Penelitian" dalam *Metode Penelitian Sosial* kerjasama Balai Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga dengan Airlangga University Press. 1995. hlm 55-63

ditanyakan secara berurutan. Demikian pula penggunaan dan pemilihan kata-kata untuk wawancara. Sebelumnya peneliti juga telah memilih orang yang tepat untuk menjadi informan. Informan yang dimaksud berasal dari informan kunci yang berasal dari struktur kepengurusan BEM dan BLM FISIP Universitas Airlangga.

2. Dokumen. Dokumen disini merupakan dokumen perorangan dimana adanya materi-materi yang dicatat oleh seseorang mengenai kehidupan mereka maupun organisasinya atau beberapa aspek mengenai diri mereka.⁵⁰ Data yang diperoleh dapat berupa kutipan, surat-surat dan penggalan – penggalan dari catatan organisasi, klinis atau program; memorandum – memorandum dan korespodensi; terbitan dan laporan resmi; buku harian pribadi; jawaban tertulis dari survai maupun kuisisioner. Dokumen tersebut antara lain berupa nama-nama struktur kepengurusan yang duduk dalam BEM dan BLM FISIP Universitas Airlangga beserta penunjangnya, seperti hasil PEMIRA 2007.

I.6.5. Karakteristik Informan

Dalam penelitian mengenai Peran Ormek dalam Demokratisasi Internal Kampus FISIP UNAIR ada sebelas narasumber yang kiranya dapat membantu peneliti untuk menjawab permasalahan yang ada. Narasumber ini dapat dikatakan sebagai informan kunci yang diharapkan mengerti kondisi terkini yang sedang terjadi dalam BEM maupun BLM FISIP. Narasumber ini terdiri dari tiga

⁵⁰ Ida Bagoes Mantra. *Op. Cit*, hlm 29

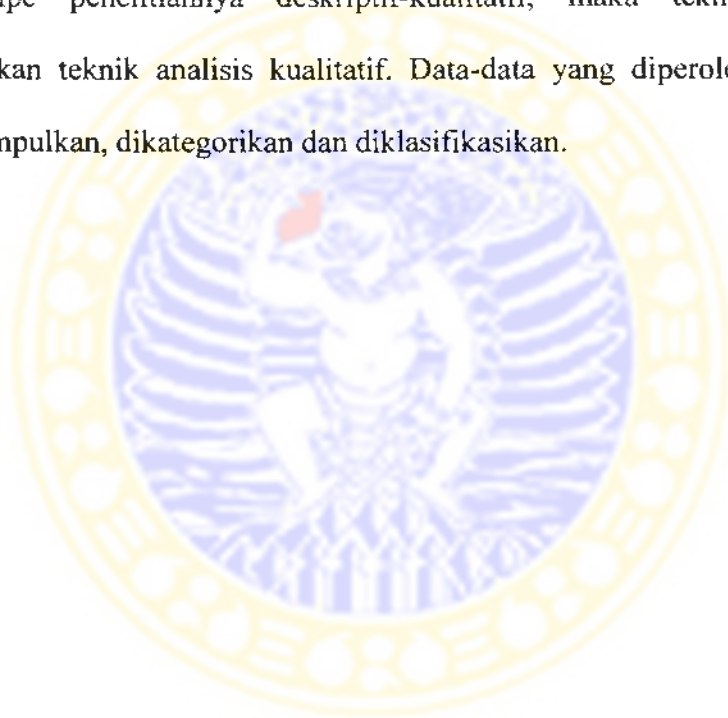
mahasiswa anggota BEM, tiga mahasiswa ketua Komisariat Ormek yang ada di FISIP, lima mahasiswa anggota BLM dan satu mahasiswa yang mengamati perkembangan Ormek dalam BEM dan BLM. Mereka adalah :

1. Riska Widya Winarti, Mahasiswa FISIP jurusan Ilmu Administrasi Negara angkatan 2005, yang menjadi ketua komisariat GMNI FISIP dan menjabat sebagai Menteri Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) pada kepengurusan BEM FISIP UNAIR masa bakti 2007-2008, sempat pula menjabat sebagai seksi kampanye dalam kepanitiaan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa FISIP UNAIR 2007.
2. Agus Fauzi Ismail, Mahasiswa FISIP jurusan Ilmu Sosiologi angkatan 2004, yang menjabat sebagai Presiden BEM FISIP UNAIR masa bakti 2007-2008.
3. Arif Febrian Arzany, Mahasiswa FISIP jurusan Ilmu Politik angkatan 2005, yang menjabat sebagai Menteri Departemen Sosial dan Politik pada kepengurusan BEM FISIP UNAIR masa bakti 2007-2008.
4. Fahrul Rozi, Mahasiswa FISIP jurusan Administrasi Negara angkatan 2005, yang menjadi wakil dari Partai Cinta (milik GMNI) pada kepengurusan BLM FISIP UNAIR masa bakti 2007-2008 dan menjabat sebagai Ketua BLM.
5. Arif Alfani Haji, Mahasiswa FISIP jurusan angkatan 2005, yang menjadi wakil dari Senat jurusan Administrasi Negara dan menjabat sebagai Sekretaris Umum pada kepengurusan BLM FISIP UNAIR masa bakti 2007-2008.

6. Wira Yudha Alam, Mahasiswa FISIP jurusan Ilmu Politik angkatan 2005, yang menjadi ketua komisariat HMI FISIP.
7. M. Denny Puja, Mahasiswa FISIP jurusan Ilmu Politik angkatan 2005, yang menjadi wakil dari Partai Pelangi Kampus (milik HMI) pada kepengurusan BLM FISIP UNAIR masa bakti 2007-2008 dan menjabat sebagai Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi.
8. Hidayat Anshori, Mahasiswa FISIP jurusan Ilmu Sosiologi angkatan 2005, yang menjadi wakil dari Partai Dinamis (milik KAMMI) pada kepengurusan BLM FISIP UNAIR masa bakti 2007-2008 dan menjabat sebagai Kepala Bidang Agama.
9. M. Amjad, Mahasiswa FISIP jurusan Ilmu Politik angkatan 2004, yang menjadi ketua komisariat PMII FISIP.
10. Yeyen. R, Mahasiswa FISIP jurusan Ilmu Antropologi angkatan 2004, yang menjadi wakil dari Partai Bunga (milik PMII) pada kepengurusan BLM FISIP UNAIR masa bakti 2007-2008.
11. Rahadi. M, Mahasiswa FISIP jurusan Ilmu Politik angkatan 2004, yang mewakili masyarakat atau warga FISIP UNAIR.

I.6.6. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan selanjutnya data tersebut di olah dan di analisis untuk mendapatkan informasi sesuai dengan rumusan masalah.⁵¹ Sebelum terolah data yang terkumpul diseleksi terlebih dahulu atas dasar reliabilitas. Data yang rendah reliabilitasnya tidak dipakai. Data yang telah lulus diolah dan dianalisis sehingga merupakan suatu informasi yang siap untuk dievaluasi dan diinterpretasi. Karena tipe penelitiannya deskriptif-kualitatif, maka teknik analisisnya menggunakan teknik analisis kualitatif. Data-data yang diperoleh di lapangan akan dikumpulkan, dikategorikan dan diklasifikasikan.



⁵¹ Ida Bagoes Mantra, *Ibid*, hlm 131-134

Bab II

Deskripsi Obyek Penelitian

II.1. Sejarah Perkembangan Mahasiswa Di Indonesia

II.1.1. Munculnya Pemuda dan Mahasiswa sebagai Fenomena Politik

Munculnya peranan pemuda dan mahasiswa dalam masyarakat Indonesia merupakan fenomena khas abad ke 20. Dimana proses perubahan sosial dan proses industrialisasi mengantarkan negara-negara Asia mengalami perubahan struktur sosial dan politik sehingga membentuk suatu *nation state* seperti yang terjadi di negara Eropa dan Amerika Selatan. Pemuda dan mahasiswa sangat penting pengaruhnya dalam mekanisme pembentukan negara bangsa modern, baik sebagai kekuatan sosial maupun sebagai kekuatan politik.¹

Fenomena ini bermula dari politik etis, sebuah politik balas jasa, yang dikemukakan oleh Van Deventer yang kemudian mendorong munculnya perguruan tinggi di Hindia Belanda. Politik etis itu sendiri terdiri dari tiga aspek, yaitu edukasi, emigrasi dan irigasi yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat pribumi melalui sektor pendidikan. Walaupun demikian, politik etis sebenarnya bukan merupakan politik balas budi. Politik etis ini merupakan salah satu taktik dari pemerintah kolonial untuk mendapatkan tenaga terdidik yang murah, membuka lahan perkebunan di luar Jawa dengan memanfaatkan tenaga pribumi dan irigasi yang akan meningkatkan hasil pertanian dan perkebunan yang

¹ Lihat penelitian Aribowo, *Sejarah, Pola dan Format Gerakan Mahasiswa Indonesia: Studi mengenai Gerakan Mahasiswa di Surabaya dan Yogyakarta*. Surabaya: Lembaga Penelitian UA, 1997, hlm 27

akan menguntungkan pemerintah kolonial. Namun, peran politik etis sangatlah besar dalam munculnya kaum terpelajar yang awalnya didominasi oleh kaum priyayi.²

Diawali dengan konsep Barat mengenai pendidikan tinggi, kemunculan para kaum terpelajar ini kemudian menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagian dari sistem sosial politik Indonesia. Oleh karena itu, segala perkembangan dan perubahan yang kiranya terjadi dalam sistem sosial politik akan mewarnai pula dunia kemahasiswaan. Pada masa itu, ide-ide baru, pendidikan, industrialisasi dalam batas tertentu, urbanisasi, disintegrasi masyarakat kuno dan teknologi baru mulai berkembang. Perubahan ini menimbulkan diintegrasikan masyarakat lama tanpa diikuti terbentuknya masyarakat baru yang kemudian menghasilkan *generation gap*. Inilah yang secara tidak langsung menimbulkan peranan politik mahasiswa.

Herbert Feith mencatat banyak banyak penyebaran pemikiran baru yang sedang berkembang pada awal abad 20 yang kemudian berintegrasikan ke dalam nilai-nilai tradisional melahirkan peta pemikiran politik Indonesia modern. Disinilah diskusi pemikiran mengenai nasionalisme mulai timbul dan berkembang. Kemudian, John Ingleson mendeskripsikan mengenai sekelompok mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Belanda membentuk Perhimpunan Indonesia (PI), yang memberikan pandangan mengenai Indonesia di masa mendatang melalui semangat dan konsepsi nasionalisme mereka. Kekuatan mereka sangat diperhitungkan oleh pemerintah kolonial. Ben Anderson juga menyimpulkan

² Suharsih dan Ign Mahendra K. *Op.Cit.* hlm 51

bahwa partai politik, militer dan organisasi pemuda lainnya berasal dari kaum muda Indonesia.³

Inilah yang membuat para pemuda dan mahasiswa angkatan 1908 dan 1928 begitu berperan dan berpengaruh sedemikian besar dalam masyarakat Indonesia sehingga tindakan mereka masing-masing disebut awal dari kebangkitan nasional dan cikal bakal eksistensi bangsa Indonesia. Karena, struktur pendidikan yang memadai yang membuat para mahasiswa Indonesia berada dalam posisi yang istimewa. Mereka dianggap berwibawa karena mendapatkan pendidikan dari Barat yang notabene merupakan ilmu penguasa kolonial. Dengan demikian karena kedudukan mereka yang istimewa tersebut, mereka segera didorong untuk masuk ke dalam golongan intelektual dan berpikir untuk masyarakatnya. Contoh klasik ini merupakan bagaimana para pemuda dan mahasiswa dapat mendinamiskan kehidupan politik.⁴

Hasilnya terbentuklah berbagai macam perkumpulan pemuda atau Jong yang diawali dengan munculnya Boedi Oetomo dan puncaknya ketika para perkumpulan pemuda tersebut menghasilkan Sumpah Pemuda. Generasi tersebut memang sangatlah istimewa karena mampu untuk menentang penindasan kolonialisme, dan menyodorkan alternatif yang belum ada hingga saat ini, yaitu Indonesia merdeka.⁵ Kemudian jejak mereka, diikuti oleh angkatan 1945 yang berperan besar dalam revolusi fisik, angkatan 1957 yang menyalurkan kegiatan berpolitik mereka melalui Badan Kerjasama Pemuda Militer, angkatan 1966 yang membantu militer dalam meruntuhkan rezim Orde Lama dan pada awal

³ Aribowo. *Op.Cit.* hlm 30

⁴ Onghokham. *Op.Cit.* hlm 119

⁵ *Ibid.* hlm 120

pemerintahan Orde Baru sempat memakai pendekatan moral, bukan politik, sebagai aksinya,⁶ Angkatan 1974 dengan aksi MALARI,⁷ Angkatan 1978 yang kembali menimbulkan momentum gerakan mahasiswa karena memburuknya sistem ekonomi,⁸ Angkatan 1980-an dengan diskusi dan pendekatan intelektual serta puncaknya, ketika angkatan 1998 bersama rakyat, mampu menumbangkan rezim otoriter Orde Baru yang telah lama berkuasa. Dengan adanya dinamika perubahan sosial, ekonomi dan politik yang semakin kompleks tidak dapat disangsikan lagi peran penting pemuda dan mahasiswa Indonesia.

II.1.2. Mahasiswa sebagai Kekuatan Politik

Dalam merespon berbagai perubahan sosial yang timbul dalam berbagai negara, kekuatan dan keterlibatan mahasiswa sebagai salah satu kekuatan politik merupakan fenomena yang universal.⁹ Terutama sekali dalam sejarah perkembangan mahasiswa di Asia. Menurut Joseph Fischer, mereka sangat berperan sebagai inisiator dan agen dalam gerakan kemerdekaan dan nasionalisme, penggulingan terhadap pemerintahan dan mempercepat tumbuhnya faksi-faksi

⁶ Pada tahun-tahun awal orde baru mahasiswa memakai pendekatan moral dimana mereka bertindak sebagai kekuatan moral ketimbang kekuatan politik. Dalam arti bahwa mahasiswa muncul sebagai aktor politik ketika situasi bangsa sedang kritis dan setelah krisis berlalu kemudian kembali ke kampus untuk belajar. Singkat kata, mereka merasa tidak perlu untuk mengumpulkan massa yang besar dan melengkapi dirinya dengan ideologi alternatif. Lihat Arief Budiman dan Olle Tornquist. *Aktor Demokrasi: Catatan Tentang Gerakan Perlawanan di Indonesia* dalam Suharsih dan IGN Mahendra K. *Op.Cit.* hlm 78

⁷ Aksi MALARI (Malapetaka Lima Belas Januari) pada awalnya merupakan gerakan mahasiswa yang menentang kedatangan Perdana Menteri Jepang, Tanaka, kemudian berubah menjadi kerusuhan massa yang menghancurkan Jakarta.

⁸ Angkatan 1978 menilai bahwa memburuknya situasi ekonomi pada waktu itu merupakan bukti kebohongan penguasa dan pemerintah pasca MALARI. Timbulnya gerakan mahasiswa justru ditangani secara represif dan memunculkan kebijakan NKK (Normalisasi Kehidupan Kampus) yang berarti menata ulang dan redefinisi kampus secara fungsional dan bertahap. Kebijakan ini membuat mahasiswa hanya boleh melakukan kegiatan kampus dan dilarang berrhubungan dengan politik praktis. Lihat Arief Budiman dan Olle Tornquist, *Op.Cit.* hlm 87

⁹ Aribowo. *Op.Cit.* hlm 31

politik radikal dan partai-partai politik. Peranan politik mereka pada waktu itu adalah menjadikan privilese yang diterimanya sebagai jalan untuk perbaikan nasib rakyat seluruhnya.¹⁰ Lebih lanjut, intensitas mahasiswa baik sebelum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan tetap besar dengan berbagai macam aktivitas politik mereka.

Pada permulaan abad 20 belum banyak sekolah pendidikan tinggi muncul, terutama sebelum politik etis diberlakukan. Di Indonesia, *School tot Opleiding voor Inlandsche Arsten* atau STOVIA merupakan Sekolah Kedokteran di Jakarta menjadi pionir didirikannya sekolah dengan konsep pendidikan Barat yang modern didirikan tahun 1902, diikuti oleh pembukaan Sekolah Teknik (kemudian menjadi Institut Teknologi Bandung) di Bandung pada tahun 1920. Pembukaan Sekolah Teknik tersebut diikuti oleh pembukaan Fakultas Hukum (menjadi Universitas Padjajaran) tahun 1924, STOVIA kemudian berubah menjadi Fakultas Kedokteran tahun 1926, Fakultas Sastra dan Fakultas Pertanian di Jakarta dan Bogor tahun 1940. Menurut Fischer, sekolah pendidikan tinggi yang menjadi cikal bakal Universitas maupun Perguruan Tinggi di Indonesia, tersebut dibangun untuk mempertemukan kebutuhan-kebutuhan politik yang sedang berkembang dari kaum terpelajar dan kelas lainnya dalam memperoleh pendidikan dan pekerjaan yang lebih luas dengan menekankan semangat kemerdekaan.¹¹

Tidaklah mengherankan apabila, sekolah pada zaman itu tidak hanya menonjol fungsi edukatifnya namun juga peranan politis. Menurut Phillip Albach,

¹⁰ Burhan Magenda. "Gerakan Mahasiswa dan Hubungannya dengan Sistem Politik: Suatu Tinjauan", dalam Farchan Bulikin (ed). *Analisa Kekuatan Politik di Indonesia: Pilihan Artikel Prisma*, Jakarta: LP3S. 1988. hlm 130

¹¹ Aribowo. *Op.Cit.* hlm 32

sistem pendidikan dalam zaman kolonial masih bersifat diskriminatif. Hanya golongan tertentu saja yang memiliki kesempatan menikmati pendidikan tinggi. Oleh karena itu, secara sosiologis, mahasiswa menduduki kelas sosial yang tinggi. Mahasiswa, pada waktu itu dikatakan sebagai kekuatan sosial penting karena dipandang sebagai agen perubahan sosial dan politik bagi masyarakatnya.

Sistem pendidikan yang bersifat diskriminatif itulah membuat mahasiswa umumnya berasal dari golongan sosial aristokrat dan priyayi. Sementara golongan diluar golongan tersebut mendirikan lembaga pendidikan berdasarkan nilai-nilai tradisional maupun religius dan bersifat sinkretis antara nilai-nilai barat dan Jawa. Maka, muncullah lembaga pendidikan seperti Muhammadiyah, Taman Siswa serta pondok-pondok pesantren dalam pedesaan.

Kemudian di tahun 1912, berdiri *Indische Partij* (IP) yang merupakan organisasi politik pertama di Hindia Belanda dengan slogannya “Hindia untuk orang Hindia”. Kehadiran Budi Oetomo pada tahun 1908 dan IP ini menjadi awal menjamurnya organisasi sosial politik yang didirikan oleh para pemuda. Seperti Perhimpunan Mahasiswa di tahun 1925 dan Perserikatan Nasional Indonesia tahun 1927 dengan Ir. Soekarno sebagai pelopornya. Inilah yang akan menjadi kekuatan dalam masa revolusi kemerdekaan. Peranan mereka sangat besar bagi munculnya tokoh-tokoh gerakan kemerdekaan. Para pemuda yang menjadi penghela, pendukung dan pembela revolusi Indonesia.

Pada masa pendudukan Jepang, organisasi kepemudaan juga berkembang. Dengan kondisi yang sangat represif, mahasiswa dan pemuda memilih kegiatan berkumpul dan berdiskusi di asrama-asrama. Tiga asrama yang terkenal dalam

sejarah kemerdekaan adalah Asrama “Angkatan Baru Indonesia” atau Menteng 31, Asrama “Fakultas Kedokteran” dan Asrama “Indonesia Merdeka” di Kebon Sirih.¹² Ada pula, mahasiswa dan pemuda yang menjalani jalur konfrontasi langsung dengan Jepang. Terutama melalui gerakan bawah tanah. Kegiatan aktif para pemuda tersebut bertujuan menghalangi semakin meluasnya semangat perang untuk Jepang di kalangan anggota organisasi-organisasi bentukan Jepang seperti PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat)¹³ yang kemudian berganti nama menjadi Djawa Hokokai. Maka, muncullah BRI (Barisan Rakjat Indonesia) di Solo, Yogyakarta dan Purwodadi yang pendiriannya berkedok untuk membantu Jepang pada masa pendudukan, namun dalam organisasi ini para pengurusnya berusaha untuk menghimpun para pemuda lain dan menyusun kekuatan massa. Mereka memperbanyak sel-sel dan kader baru, baik di daerah perkotaan maupun di sekolah dan kampung-kampung.¹⁴ Hasilnya, banyak sekali para pemuda yang ditangkap oleh mata-mata Jepang dan disiksa. Selain itu, lahir pula di tahun 1944, “Angkatan Muda” yang memiliki pengaruh yang cukup luas diantara pemuda. Pembentukan organisasi pemuda tersebut menurut Ben Anderson merupakan hasil dari situasi krisis. Lembaga tersebut bukanlah sebuah jejak untuk menapaki karier atau bagian dari siklus kehidupan, namun diciptakan bagi satu momen sejarah kedepan yaitu sejarah terbentuknya sebuah bangsa.

Setelah kemerdekaan, pemerintah berusaha mengusahakan pemerataan pendidikan untuk semua lapisan golongan masyarakat, namun terhambat oleh

¹² Suharsih dan Ign Mahendra K. *Op. Cit.* hlm 60

¹³ Walaupun PUTERA merupakan organisasi bentukan Jepang, namun pada kenyataannya Jepang sendiri takut akibat sambutan dari rakyat dan semangat kemerdekaan yang menggelora, sehingga setelah 10 bulan lembaga ini dibubarkan dan diganti dengan Djawa Hokokai.

¹⁴ Kompas. “Nasionalisme ala Pemuda”. Sabtu, 19 Agustus 2006. hlm 39

masalah struktural. Maka, pada tahun 1950-an, dengan masih terbatasnya jumlah mahasiswa, tidak ada permasalahan yang berarti dalam bidang lapangan pekerjaan. Bahkan, para mahasiswa yang baru saja menyelesaikan pendidikan sangat bersemangat untuk mengisi kemerdekaan yang baru saja diperoleh. Kesadaran akan peranannya sebagai *future elite* memberikan perasaan aman kepada mahasiswa. Pada saat itu, mereka sangat bersemangat dalam mengadakan kegiatan sosial, membentuk klub belajar maupun pers mahasiswa.¹⁵ Masa ini juga ditandai oleh mulai aktifnya organisasi mahasiswa, baik yang berafiliasi kepada partai maupun yang independen. Namun, belum muncul gerakan mahasiswa yang berfungsi secara politik. Menurut Fincher, ketiadaan partisipasi politik mahasiswa dari sudut hubungan pribadi yang dekat antara mahasiswa dengan lapisan elit politik nasional pada waktu itu. Salah satu peranan mereka dalam politik nasional sebagai kekuatan yang bebas dalam partai adalah membentuk Badan Kerjasama Pemuda Militer¹⁶ tahun 1957 yang merupakan wadah bagi mahasiswa untuk terjun dalam bidang politik. Idenya sendiri bertujuan untuk melemahkan peranan partai politik yang pada waktu itu sangat banyak dengan menekankan penyatuan unsur-unsur atas dasar dari fungsinya, suatu embrio dari Golongan Karya.¹⁷

Awal tahun 1960-an dengan jumlah mahasiswa yang semakin bertambah¹⁸, mulai banyak Universitas baru didirikan di setiap ibukota propinsi serta

¹⁵ Aribowo. *Op. Cit.* hlm 39

¹⁶ Badan Kerjasama ini tidak menghasilkan suatu *input* yang positif, karena partai politik mampu menyesuaikan diri dengan sistem politik pada waktu itu. Sebagian lagi karena usaha Soekarno untuk menjadi penyeimbang antara pihak Angkatan Darat dengan partai-partai. Peranan ini menjurus kearah polarisasi antara Angkatan Darat dan PKI yang membuat pada masa ini, mahasiswa tersisih dari percaturan politik nasional.

¹⁷ Burhan Magenda. *Op. Cit.* hlm 136

¹⁸ Jumlah mahasiswa pada saat penjajahan Jepang menurut George McT. Kahin adalah 637 orang, Sedangkan Harsya Bachtiar memperkirakan 287 orang dan Joseph Fischer lebih banyak lagi pada

menambah jumlah fakultas pada universitas lama dan pembangunan Universitas swasta. Untuk pertama kalinya, anak muda dari setiap lapis bangsa bisa masuk dalam Perguruan Tinggi. Periode ini disebut sebagai periode “revolusi harapan-harapan yang meningkat”. Eksploitasi pendidikan tinggi pada masa ini berpengaruh pula pada konotasi “mahasiswa”. Bilamana mahasiswa sebelumnya identik dengan pekerjaan yang baik dan sukses sosial, maka mahasiswa pada tahun-tahun ini menjadi suatu istilah yang lebih egalitarian sifatnya, yang tidak dikaitkan lagi dengan eksklusivisme fisik maupun sosial budaya.¹⁹ Proses mobilisasi politik menyebabkan aktifnya organisasi-organisasi massa yang berafiliasi maupun bebas dari partai politik. Di kalangan mahasiswa saja, terjadi peningkatan besar-besaran dalam jumlah anggota organisasi-organisasi mahasiswa.²⁰ Meningkatnya jumlah anggota ormas mahasiswa disertai pula oleh peningkatan mereka secara kualitatif dan terbukanya kesempatan untuk mobilitas sosial dalam bidang politik. Dunia pergerakan mahasiswa mulai tumbuh, menguat dan berkembang dengan dunia politik.

Mahasiswa semakin melejit namanya, setelah peristiwa jatuhnya Orde Lama. Dengan dibantu pihak militer dan demonstrasi-demonstrasi yang menginginkan adanya perbaikan ekonomi yang memburuk sejak pertengahan 1965. Awal mula Orde Baru sepertinya menjanjikan situasi yang lebih baik. Perbedaan berbagai kelompok dipersatukan ke dalam “ideologi” baru, yaitu

permulaan kemerdekaan sebanyak 1100 orang. Sementara pada awal 1964-an jumlah mahasiswa meningkat pesat hingga sekitar 100.000an yang berarti sekitar 1% jumlah penduduk usia 18-24 tahun adalah mahasiswa. Dan jumlah ini bertambah meningkat menjadi 250.000 hingga 330.000 pada tahun 1972.

¹⁹ Burhan Magenda. *Op. Cit.* hlm 138

²⁰ Menurut Rocamora, anggota GMNI pada tahun 1964 mencapai 75.000 orang dan menurut Harsya Bachtiar. HMI pada akhir masa Demokrasi Terpimpin beranggotakan 100.000 orang.

pembangunan. “Ideologi” baru ini menghapuskan semua slogan ideologis sebelumnya dan menghilangkan perbedaan-perbedaan pokok dalam visi. Depolitisasi ini juga menciptakan suatu parameter sosial yang baru yaitu stabilitas politik untuk kelangsungan pembangunan. Mahasiswa sepertinya memiliki tantangan baru untuk diselesaikan. Mereka merupakan generasi muda baru yang lahir setelah era kemerdekaan dan dibesarkan dalam periode ekonomi yang relatif baik. Pada tahun 1966, semboyan dan jargon yang mereka dengar dan berpengaruh pada sosialisasi politik mereka adalah “keadilan hak-hak asasi dan kebebasan”, namun kenyataannya mereka berhadapan dengan kekuatan yang makin dikonsentrasikan terutama setelah Pemilu 1971 dan yang sejalan dengan pengamatan tentang ide sentralisasi kekuasaan dalam budaya Jawa.²¹ Adanya, kecenderungan akan sentralisasi kekuasaan inilah yang mengakibatkan gerakan mahasiswa menjadi *the only effective opposition* dalam masyarakat. Periode 1970-an menunjukkan terjadinya proses perenggangan antara gerakan mahasiswa di kampus dengan ormas mahasiswa ekstra. Di satu pihak, ini menunjukkan gejala independensi yang makin tinggi dari gerakan mahasiswa, yang diikuti oleh proses demokratisasi, khususnya dalam pemilihan dewan-dewan mahasiswa. Inilah yang menjadi ciri khas dari mahasiswa pada awal Orde Baru dengan memakai “kekuatan moral” yakni gerakan mahasiswa yang terpusat dalam kampus dan tidak memiliki ikatan organisatoris dengan kekuatan sosial politik di luarnya. Pemutusan hubungan dengan organisasi politik di luar kampus telah tidak memungkinkan mahasiswa untuk mengorganisir diri di sekitar keresahan yang

²¹ Burhan Magenda. *Op. Cit.* hlm 142

khusus secara politik.²² Walaupun demikian, riak-riak kecil kembali muncul akibat ketidakpuasan mahasiswa terhadap kinerja pemerintahan Orde Baru. Korupsi dan kebijakan pembangunan yang kurang populis menjadi isu utama. Memasuki tahun 1974, suasana menentang masuknya modal asing memanas. Mahasiswa menjadi kambing hitam dalam kerusuhan MALARI. Peristiwa ini berjalan sangat politis sekali, karena melibatkan dua tokoh penting yaitu persaingan antara Jenderal Soemitro yang baru saja diangkat sebagai Pangkopkamtib dan Jenderal Ali Moertopo, Asisten Pripadi (Aspri) Presiden dan Kepala Operasi Khusus (Opsus).

Situasi ranah ekonomi politik yang kembali memanas pada tahun 1978, membuat mahasiswa muncul kembali ke permukaan. Jumlah pengangguran dan hutang luar negeri meningkat tajam.²³ Mahasiswa menilai bahwa memburuknya sistem ekonomi merupakan bukti kebohongan penguasa dan pemerintah yang pasca peristiwa MALARI telah berjanji akan memperbaiki distribusi kesempatan dan hasil pembangunan.²⁴ Tuntutan mahasiswa secara tegas menginginkan penggantian Soeharto, orientasi ulang sistem ekonomi dan politik, penegakkan negara hukum, dan mengkritik peran tentara dalam politik. Pemerintah dengan kekuatan militernya secara represif, menyatakan bahwa mahasiswa telah melawan hukum dan konstitusi, sehingga membuat militer masuk ke dalam kampus. Upaya pemerintah untuk mengeliminasi mahasiswa dari segala kegiatan politik makin kuat ketika pada tanggal 19 April 1978, Mendikbud Daoed Joesoef menerapkan

²² *Ibid.* hlm 147

²³ Pada waktu itu pengangguran berjumlah 8.300.000 orang meningkat dari 3,6 juta dibanding tahun 1961

²⁴ Suharsih dan Ign Mahendra K. *Op. Cit.* hlm 84

kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) yang berarti menata ulang dan redefinisi kampus secara mendasar, fungsional dan bertahap. Dan kebijakan ini diikuti oleh pembentukan Badan Koordinasi kemahasiswaan (BKK) sebagai badan non struktural yang berfungsi membantu rektor untuk merencanakan kegiatan mahasiswa. Hasilnya, mahasiswa hanya diijinkan beraktivitas seputar kesejahteraan, rekreasi dan persoalan akademik atau intelektual. Dengan begitu sejak kebijakan tersebut diberlakukan, semua kegiatan mahasiswa baik kurikuler maupun non kurikuler dikontrol oleh pimpinan perguruan tinggi.²⁵

Hasil dari kebijakan NKK/BKK adalah terjadinya militerisme dalam kampus. Banyak sekali intel-intel yang muncul dalam acara seminar yang diselenggarakan oleh mahasiswa. Militer juga memakai anggota Menwa (Resimen Mahasiswa) untuk mengawasi aktivitas teman sekampus mereka. Dan, tahun-tahun berikutnya kursus pelatihan mengenai Pancasila dibuat menjadi wajib oleh mahasiswa. Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4 merupakan syarat untuk menjadi pegawai negeri dan diperluas untuk menjadi mata kuliah dua semester bagi mahasiswa.

Inilah yang membuat peran mahasiswa seakan “mati suri” sepanjang tahun 1980-an. Kebijakan NKK/BKK secara tidak langsung mematikan segala kegiatan politik dalam kampus. Dominasi birokratis kampus sangatlah besar. Ini terlihat dengan pembekuan dewan mahasiswa, Pembantu rektor (Purek) dan Pembantu dekan (Pudek) masuk ke dalam struktur organisasi kemahasiswaan, pembredelan surat kabar kampus, pengambilalihan masa inisiasi mahasiswa baru dan

²⁵ *Ibid.* hlm 86

memberlakukan sanksi akademis yang ketat apabila mahasiswa menyimpang dari aturan permainan yang ada. Senat mahasiswa pun menjadi semakin tidak populer dan di jauhi mahasiswanya, karena hanya menjadi perpanjangan tangan birokrasi kampus.²⁶ Sebagai salah satu bentuk eksistensi dari para mahasiswa, banyak sekali kelompok-kelompok studi yang didirikan. Kelompok studi merupakan arena untuk mengasah kemampuan kritis mereka terhadap persoalan sosial dan politik. Mahasiswa sepertinya kembali ke masa-masa tahun 1920-an, ketika mereka hanya terjun dalam aktivitas intelektual dan giat melakukan diskusi-diskusi. Dalam perkembangannya, Kelompok Studi tidak hanya berfungsi sebagai arena untuk melakukan diskusi, namun juga melakukan aksi-aksi advokasi. Pergerakan mereka dalam merespon berbagai kebijakan pemerintah hampir jarang terjadi. Kalaupun pergerakan itu muncul hanyalah dalam bentuk advokasi. Isu yang mereka angkat untuk melakukan advokasi hanya isu-isu lokal, seperti dalam kasus Kedung Ombo atau petani Badega.

Menurut Edward Aspinall, advokasi yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap permasalahan rakyat menjadi ciri khas pergerakan mahasiswa pada tahun 1990-an.²⁷ Dengan memanasnya suhu politik menjelang Pemilu 1997, sepertinya mahasiswa mendapatkan kembali momentumnya untuk mengadakan pergerakan. Terutama setelah peristiwa 27 Juli 1996, dimana beberapa aktivis mahasiswa menjadi kambing hitam dan membuat mahasiswa menunjukkan solidaritasnya

²⁶ Denny JA. *Gerakan Mahasiswa dan Politik Kaum Muda era 80-an*. Yogyakarta: LkiS. 2006. hlm 66

²⁷ Advokasi tersebut berupa "turun ke bawah" yakni bekerja sama dengan dan mendampingi kaum buruh dan petani. Pada intinya, proses ini merupakan awal kemunculan suatu orientasi massa. Lebih lanjut lihat Edward Aspinall dalam Suharko. *Gerakan Mahasiswa tahun 1990-an*. dalam Suharsih dan Ign Mahendra K. *Op. Cit.* hlm 92

terhadap permasalahan tersebut. Aksi golput dan penolakan terhadap hasil Pemilu merupakan isu yang mereka usung. Kesempatan untuk kembali mengadakan aksi terbesar datang, ketika krisis ekonomi menyapu seluruh Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kenaikan harga sembilan harga pokok dan pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi dimana-mana. Mahasiswa sebagai salah satu kekuatan politik terbesar di Indonesia akhirnya berhasil meruntuhkan Orde Baru yang telah berkuasa selama hampir 31 tahun.

Proses reformasi yang berjalan tidaklah menyurutkan langkah mereka untuk terus berjuang dalam menjalankan proses demokratisasi. Namun, setelah masa reformasi berjalan hingga sekarang sepertinya kekuatan mahasiswa tidak solid dan cenderung terfragmentasi. Mahasiswa sepertinya tidak lagi satu kata dalam memahami dan menjawab persoalan yang ada. Padahal, setelah sepuluh tahun, banyak sekali permasalahan dalam bidang sosial, politik maupun ekonomi yang tidak terselesaikan dengan baik. Contoh terakhir dalam menyikapi kenaikan harga BBM sepertinya mahasiswa “kehilangan akal” dalam mencari solusi. Lebih sangat disayangkan, apabila demonstrasi yang mereka lakukan bersifat anarkis. Inilah yang menjadi tantangan mahasiswa ke depan dalam masa yang penuh ketidakpastian.

Berbicara mengenai mahasiswa itu sendiri, tentulah tidak lepas dari peran kampus dalam mempengaruhi sikap dan pembentukan persepsi politik para mahasiswanya. Dalam kampus pulalah, mahasiswa dapat memperoleh berbagai informasi yang bersifat praktis maupun teoritis. Pada umumnya, mereka dapat tersosialisasi dengan berbagai macam persoalan dan peristiwa sosial, ekonomi dan

politik, baik di dalam dan di luar kampus. Dan, selain menuntut ilmu ditempat yang sama, mahasiswa juga dapat membangun komunikasi, komunitas dan solidaritas antar mahasiswa. Seperti yang diutarakan Riswandha Imawan, apabila tujuan dan harapan mahasiswa terusik maka solidaritas mereka akan muncul sehingga memberikan kesan bahwa mahasiswa mudah sekali digerakkan oleh stimulus tertentu selama menguntungkan dan memberi peluang mereka.²⁸

Dengan sejarah perkembangan mahasiswa dalam perjalanan bangsa Indonesia yang diutarakan diatas, sangatlah besar peran mereka sebagai kekuatan politik yang sangat berpengaruh. Lebih lanjut Arbi Sanit mengutarakan beberapa faktor yang menyebabkan mahasiswa aktif dalam bidang politik.²⁹ Faktor tersebut antara lain :

1. Mahasiswa merupakan kelompok masyarakat yang memiliki pendidikan terbaik dan memiliki pandangan yang luas untuk bergerak di antara anggota masyarakat lainnya. Selain itu, suasana kampus dapat menjadi sarana mobilisasi yang efektif.
2. Mahasiswa mengalami proses sosialisasi politik terlama dari lembaga sekolah. Karena itu, mahasiswa relatif memiliki informasi mengenai permasalahan sosial dan politik yang lebih baik dibandingkan golongan muda usia lainnya.
3. Kehidupan kampus memberikan gaya hidup yang mempertemukan berbagai suku, daerah, bahasa, agama dan bahasa yang dapat dengan

²⁸ Aribowo. *Op. Cit.* hlm 34

²⁹ *Ibid.* hlm 35

mudah melahirkan akulturasi sosial dan budaya maupun ideologi politik di kalangan muda.

4. Mahasiswa mampu memahami dirinya sebagai elit di kalangan muda. Maka, mereka merasa akan memasuki lapisan atas dari susunan kekuasaan, struktur perekonomian dan prestise dalam masyarakat.
5. Adanya kecenderungan perubahan orientasi dari Universitas yang semula semata-mata berkonsentrasi dalam masalah perkotaan kemudian juga memperhatikan masalah pedesaan. Ini yang menimbulkan peningkatan kepemimpinan mahasiswa di kalangan angkatan muda.
6. Timbulnya perbedaan orientasi serta sosialisasi politik antara golongan tua dan golongan muda yang mendorong golongan muda sebagai kekuatan politik di Indonesia. Perbedaan ini menimbulkan *generation gap* yang membuat golongan muda lebih teraktualisasi
7. Mahasiswa yang aktif berpolitik biasanya memiliki pandangan pesimis mengenai memperoleh posisi yang baik dalam masyarakat, sehingga mereka cenderung untuk terlambat dalam menyelesaikan pendidikan. Bahkan mereka ada yang tidak mampu menyelesaikannya. Arbi Sanit berpendapat mereka sebagian besar berasal dari golongan menengah ke bawah. Disebabkan keadaan ekonomi dan pergaulan tidak memungkinkan untuk memiliki jabatan terbaik, maka alternatifnya masuk ke dalam aktivitas politik yang relatif lebih cepat dalam mendorong mobilitas sosial.

II.2. Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan

Mahasiswa dan Organisasi kemahasiswaan sulit dipisahkan antara satu sama lain. Apalagi dengan lahirnya organisasi kemahasiswaan, mahasiswa memiliki sarana untuk menunjukkan keberadaannya sebagai mahasiswa yang menghadapi permasalahan diluar persoalan akademis. Organisasi kemahasiswaan yang lazim dalam kehidupan perkuliahan, adalah Organisasi Kemahasiswaan Ekstra Kampus dan Organisasi Kemahasiswaan Intra Kampus. Keduanya saling mengisi dalam dinamika kehidupan kampus. Bahkan “kerjasama” mereka terlihat sangat jelas karena para aktivis Organisasi Kemahasiswaan Intra Kampus pada umumnya juga berasal dari kader-kader Organisasi Ekstra Kampus ataupun aktivis-aktivis independen yang berasal dari berbagai kelompok studi atau kelompok kegiatan lainnya. Saat terjadi pemilihan umum mahasiswa untuk memilih ketua maupun presiden BEM, pertarungan antar organisasi ekstra kampus sangat terasa.

II.2.1. Organisasi Kemahasiswaan Ekstra Kampus

Organisasi Kemahasiswaan Ekstra Kampus lazim disebut sebagai Ormek dalam kehidupan kampus. Pada umumnya Ormek terkait dengan aliran politik atau ideologi yang berbeda-beda. Harus diakui bahwa keberadaan Ormek ini tidak dikenal dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. Namun peran mereka tidak boleh diabaikan dalam kehidupan kampus. Bahkan, Ormek mampu untuk mempengaruhi dan melibatkan diri ke dalam struktur Organisasi Kemahasiswaan

Intra Kampus. Eksistensi Ormek yang bersifat kader dan massa seperti ini, juga memberikan ciri khusus bagi Indonesia yang tidak maupun jarang dijumpai di negara manapun di dunia.³⁰

Dalam suasana yang lebih demokratis, keberadaan Ormek lebih terlihat secara jelas. Dalam kampus FISIP UNAIR mereka bahkan terlibat secara langsung dalam PEMIRA atau Pemilihan Umum Raya Mahasiswa. Berikut Ormek yang hadir mewarnai kehidupan kampus serta terlihat perannya dalam dinamika perpolitikan di kampus FISIP.

II.2.1.1 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) didirikan di Yogyakarta pada 5 Februari 1947, dimasa revolusi kemerdekaan yang penuh dengan gejolak, idealisme dan heroisme HMI merupakan organisasi mahasiswa tertua di Indonesia, sejak awal berdirinya HMI telah menggariskan tekadnya untuk independen, tidak terikat secara struktural atau aspiratif dengan organisasi manapun. Lahirnya HMI atas prakarsa Lafran Pane dengan motivasi dasarnya mempertahankan Negara Republik Indonesia dan derajat rakyat Indonesia serta menegakkan dan mengembangkan ajaran Agama Islam.

Pada setiap momen yang menentukan dalam perjalanan pertumbuhan dan perkembangan umat Islam dan bangsa Indonesia. HMI tidak pernah melewatkannya tanpa partisipasi yang aktif, kreatif dan korektif. Kiprah HMI yang demikian itu disebabkan oleh kesadaran kuat setiap insan HMI bahwa iman

³⁰ Dawam Rahardjo. "Gerakan Mahasiswa: Sebuah Refleksi". Kata pengantar dalam Denny JA. *Op. Cit.* hlm xxx

yang diyakini, Ilmu yang dimiliki senantiasa menghendaki perwujudan dalam amal nyata demi mencari ridho Allah SWT. Karena sesungguhnya manusia adalah yang berguna bagi bangsa Negara dan agamanya.³¹

Keberadaan HMI sendiri dalam kampus FISIP UNAIR sendiri belum memberikan hasil yang memuaskan dikarenakan mereka sendiri belum mampu untuk memenangi PEMIRA yang merupakan sarana bagi Ormek untuk mengaktualisasikan diri mereka dalam kehidupan politik kampus.

II.2.1.2. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)

Berawal dari tiga organisasi kemahasiswaan yang berinisiatif untuk melakukan penggabungan kekuatan. Ketiga organisasi itu ialah: Gerakan Mahasiswa Marhaenis yang berpusat di Yogyakarta, Gerakan Mahasiswa Merdeka yang berpusat di Surabaya dan Gerakan Mahasiswa Demokrat Indonesia yang berpusat di Jakarta. Proses penggabungan ketiga organisasi mahasiswa mulai terwujud ketika pada awal bulan September 1953, Gerakan Mahasiswa Demokrat Indonesia (GMDI) melakukan pergantian pengurus, yakni dari Dewan Pengurus lama yang dipimpin Drs. Sjarief kepada Dewan Pengurus baru yang diketuai oleh S.M. Hadiprabowo. Dalam satu rapat pengurus GMDI yang diselenggarakan di Gedung Proklamasi, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tercetus keinginan untuk mempersatukan ketiga organisasi yang seazas itu dalam satu wadah. Keinginan ini

³¹ [http://www.pbhmi.com/ profile_isi](http://www.pbhmi.com/profile_isi) diakses pada 9 Mei 2008 18.43

kemudian disampaikan kepada pimpinan kedua organisasi yang lain, dan ternyata mendapat sambutan positif.

Setelah melalui serangkaian pertemuan penjajagan, maka pada Rapat Bersama antar ketiga Pimpinan Organisasi Mahasiswa tadi, yang diselenggarakan di rumah dinas Walikota Jakarta Raya (Soediro), di Jalan Taman Suropati, akhirnya dicapai sejumlah kesepakatan antara lain:

1. Setuju untuk melakukan fusi atau penggabungan.
2. Wadah bersama hasil peleburan tiga organisasi bernama “Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia” (GMNI).
3. Azas organisasi adalah: Marhaenisme ajaran Bung Karno.
4. Sepakat mengadakan Kongres I GMNI di Surabaya, dalam jangka waktu enam bulan setelah pertemuan ini.

Semenjak saat itu, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) lahir dan berdiri sejak 22 Maret 1954 sebagai hasil proses peleburan 3 (tiga) organisasi mahasiswa yang berazaskan Marhaenisme Ajaran Bung Karno.

Sebagai Organisasi gerakan Perjuangan mahasiswa, yang menjadi tujuan perjuangan GMNI adalah bagaimana mendidik kader bangsa dalam mewujudkan masyarakat Pancasila sesuai dengan amanat UUD 1945 yang sejati. Sebab menurut doktrin keyakinan GMNI, hanya dalam masyarakat Pancasila yang sejati, kaum Marhaen dapat diselamatkan dari bencana kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, dan terhindar dari berbagai bentuk penindasan.

Selain itu GMNI adalah organisasi yang independen dan berwatak kerakyatan. Artinya, GMNI tidak berafiliasi pada kekuatan politik manapun, dan

berdaulat penuh dengan prinsip percaya pada kekuatan diri sendiri. Independensi bukan berarti netral, sebab GMNI senantiasa proaktif dalam perjuangan sesuai dengan Azas dan Doktrin Perjuangan yang ia jalankan. Walaupun demikian, GMNI tidak independen dari Kaum Marhaen serta Kepentingan Kaum Marhaen.³²

GMNI sendiri dalam percaturan politik kampus di FISIP UNAIR mampu mempertahankan dominasinya. Hampir selama empat tahun berturut-turut mampu menguasai struktur kepengurusan BEM dan BLM.

II.2.1.3. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)

Kelompok ini merupakan produk Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (LDK) X di Universitas Muhammadiyah Malang pada 29 Maret 1998. Pertemuan yang dihadiri oleh sekitar 200 aktivis masjid kampus tersebut telah menghasilkan "Deklarasi Malang". Meskipun aktivitas gerakannya telah dimulai sebelumnya, namun peresmian sebagai organisasi massa formal, baru diputuskan pada 1-4 Oktober 1998. Menurut aktivis Fahri Hamzah, kelahiran KAMMI ini diilhami keberadaan GM tahun 1966, yaitu Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Sebagian besar aktivis KAMMI ini berlatar belakang aktivis LDK yang berasal dari organisasi massa besar seperti Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Kelompok ini membentuk basis-basis gerakan di beberapa universitas besar seperti UI, UGM, ITB, IPB, UNAIR, UNDIP dan lain-lain. Dalam setiap aksinya, baik yang ada di kota Jakarta,

³² <http://www.gmnisurabaya.org/tentanggmni/> diakses pada 9 Mei 2008 18.41

Yogyakarta, Malang dan Surabaya, KAMMI mampu menghadirkan massa yang cukup banyak.

Orientasi KAMMI adalah reformasi politik dan ekonomi yang dilandasi moral dan ahlak. Namun, kelompok ini tidak secara tegas menyatakan ingin mengganti rejim kekuasaan. "Tujuan gerakan KAMMI adalah memastikan adanya perubahan yang bermanfaat bagi umat Islam dan dalam jangka panjang berupaya membentuk forum yang mapan". KAMMI menganggap bahwa dialog merupakan saran yang efektif untuk menghindari anggapan bahwa KAMMI adalah kelompok yang fundamentalis.³³

II.2.1.4 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau disingkat PMII, merupakan satu dari elemen mahasiswa yang terus bercita-cita mewujudkan bangsa Indonesia ke depan menjadi lebih baik. PMII berdiri tanggal 17 April 1960 dengan latar belakang situasi politik tahun 60-an yang mengharuskan mahasiswa turut andil dalam mewarnai kehidupan sosial politik di Indonesia. Pendirian PMII dimotori oleh kalangan muda NU (meskipun di kemudian hari dengan dicetuskannya Deklarasi Murnajati 14 Juli 1972, PMII menyatakan sikap independen dari lembaga NU). Diantara pendirinya adalah Mahbub Djunaidi dan Subhan ZE (seorang jurnalis sekaligus politisi legendaris).

Secara totalitas PMII sebagai suatu organisasi merupakan suatu gerakan yang bertujuan merubah kondisi sosial di Indonesia yang dinilai tidak adil,

³³ <http://masiudi.blogdrive.com/archive/5.html> Diakses pada 18 Mei 2008 14.34

terutama dalam tatanan kehidupan sosial. Selain itu juga melestarikan perbedaan sebagai ajang dialog dan aktualisasi diri, menjunjung tinggi pluralitas, dan menghormati kedaulatan masing-masing kelompok dan individu. Dalam lingkup yang lebih kecil PMII mencoba menciptakan kader yang memiliki pandangan yang luas dalam menghadapi realitas sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Serta memiliki pemahaman yang komprehensif tentang berbagai macam paham pemikiran yang digunakan dalam menganalisa realitas yang ada, sehingga diharapkan seorang kader akan mampu memposisikan diri secara kritis dan tidak terhegemoni oleh suatu paham atau ideologi yang dogmatis.³⁴

II.2.2 Organisasi Kemahasiswaan Intra Kampus

Organisasi kemahasiswaan intra kampus dapat dikatakan sebagai organisasi mahasiswa yang memiliki kedudukan resmi di lingkungan kampus dan mendapat pendanaan kegiatan kemahasiswaan dari kampus. Aturan mengenai Organisasi Kemahasiswaan Intra Kampus terlihat pada Keputusan Mendikbud RI Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.

Menurut Keputusan Mendikbud Nomor 155/U/1998 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi, Organisasi Intra Kampus merupakan sarana dan wahana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Dalam Universitas Airlangga terdapat lima

³⁴ <http://www.pmiugm.co.nr/> diakses pada 9 Mei 2008 18.47

bentuk organisasi kemahasiswaan, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi (BEM-PT) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dalam tingkat Perguruan Tinggi dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Badan Legislatif Mahasiswa (BLM) dan Himpunan Mahasiswa Jurusan (Himajur) pada tingkat fakultas.

1. Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi (BEM-PT)

Organisasi mahasiswa ini berkedudukan di tingkat perguruan tinggi dan merupakan kelengkapan non struktural pada perguruan tinggi. Tugas pokoknya adalah mewakili mahasiswa pada tingkat perguruan tinggi, mengkoordinasikan kegiatan organisasi kemahasiswaan dalam bidang-bidang ekstrakurikuler di tingkat perguruan tinggi serta memberikan pendapat, usul dan saran kepada pimpinan perguruan tinggi, terutama yang berkaitan dengan fungsi dan pencapaian tujuan pendidikan nasional. Badan Eksekutif yang dimaksudkan awalnya adalah kumpulan para Ketua-Ketua Lembaga Kemahasiswaan yang ada: Ketua Umum BEM Sekarang, Ketua Umum BLM dan Ketua Umum Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Model seperti ini di beberapa perguruan tinggi kemudian ditolak, dan dipelopori oleh UGM, Senat Mahasiswa memakai model student government. Dimana Badan Eksekutif dipimpin oleh presiden yang dipilih melalui Pemilihan Umum Mahasiswa.

2. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) merupakan wadah aktivitas kemahasiswaan untuk mengembangkan minat, bakat dan keahlian tertentu

bagi para mahasiswa yang ada di dalamnya. Unit Kegiatan Mahasiswa sebetulnya adalah bagian/organ/departemen dari Dewan Mahasiswa. Ketika dilakukan pembubaran Dewan Mahasiswa, departemen-departemen Dewan Mahasiswa ini kemudian berdiri sendiri-sendiri menjadi unit-unit otonom di Kampus.

Unit Kegiatan Mahasiswa terdiri dari tiga kelompok minat : Unit-unit Kegiatan Olahraga, Unit-unit Kegiatan Kesenian dan Unit Khusus (Pramuka, Resimen Mahasiswa, Pers Mahasiswa, Koperasi Mahasiswa, Unit Kerohanian dan sebagainya).

3. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)

Pada awalnya Badan Eksekutif Mahasiswa bernama Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM). BPM adalah organisasi mahasiswa Intra Kampus di Indonesia yang dibentuk pada saat pemberlakuan kebijakan NKK/BKK pada tahun 1978. Hingga tahun 1989, Badan Perwakilan Mahasiswa hanya ada di tingkat Fakultas bersama-sama dengan Senat Mahasiswa. Ada kerancuan istilah BPM dengan Senat Mahasiswa karena sama-sama berarti wakil. Hanya saja menurut aturan main, BPM dianggap berfungsi sebagai badan legislatif sedangkan Senat Mahasiswa menjalani fungsi eksekutif.

Akhirnya, karena ketidakjelasan fungsi BPM itu ketika era Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi atau SMPT fungsi BPM digantikan Senat Mahasiswa. BPM sendiri dihapuskan. Senat Mahasiswa yang tadinya badan eksekutif berubah menjadi badan legislatif. Sedangkan badan eksekutifnya

dibentuk Badan Pelaksana Senat Mahasiswa, yang lantas diubah lagi menjadi Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM. Istilah ini bertahan hingga saat ini. Secara singkat, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) ialah lembaga kemahasiswaan yang menjalankan organisasi serupa pemerintahan (lembaga eksekutif). Dipimpin oleh Ketua atau Presiden BEM yang dipilih melalui pemilu mahasiswa fakultas setiap tahunnya.

Hampir di setiap fakultas di perguruan tinggi mampu membentuk BEM. Dan didalam BEM inilah sering terjadi perebutan pengaruh antar anggota Ormek, baik dalam membuat garis-garis besar program maupun dalam menentukan susunan kepengurusan.³⁵

4. Badan Legislatif Mahasiswa (BLM)

Hampir sama dengan terbentuknya BEM, pada awalnya Badan Legislatif Mahasiswa (BLM) bernama Senat Mahasiswa (SM). SM adalah Organisasi Kemahasiswaan Intra Kampus yang dibentuk pada saat pemberlakuan kebijakan NKK/BKK pada tahun 1978. Sama dengan keberadaan BEM, awalnya Senat Mahasiswa hanya ada di tingkat fakultas, sedangkan di tingkat perguruan tinggi ditiadakan. Sedangkan dalam tingkat jurusan keilmuan dibentuk Keluarga Mahasiswa Jurusan atau Himpunan Mahasiswa Jurusan, yang berkoordinasi dengan Senat Mahasiswa dalam melakukan kegiatan intern. Pada umumnya Senat Mahasiswa dimaksudkan sebagai Lembaga

³⁵ Lihat skripsi M.Yafis Sulaiman. *Op.Cit.* hlm 106-108

Eksekutif, sedangkan fungsi legislatifnya dijalankan organ lain bernama Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM).

Senat Mahasiswa kemudian menjelma menjadi Badan Legislatif Mahasiswa. Lembaga Eksekutifnya adalah Badan Pelaksana Senat Mahasiswa. Belakangan nama Badan Pelaksana diganti dengan istilah yang lebih praktis : Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Awalnya BEM dipilih, dibentuk dan bertanggung jawab kepada Sidang Umum Senat Mahasiswa namun sekarang pengurus kedua institusi sama-sama dipilih langsung dalam suatu Pemilihan Umum Mahasiswa.

5. Himpunan Mahasiswa Jurusan (Himajur)

Himajur merupakan organ pelaksana kegiatan mahasiswa di tingkat jurusan atau program studi sesuai dengan bidang keilmuan dan merupakan kelengkapan non struktural dalam tingkat program studi pada fakultasnya masing-masing. Singkatnya, Himajur adalah organisasi mahasiswa intra kampus yang terdapat pada jurusan keilmuan dalam lingkup fakultas tertentu. Umumnya bersifat otonom dalam kaitannya dengan organisasi mahasiswa di tingkat Fakultas seperti Badan Eksekutif Mahasiswa dan Badan Legislatif Mahasiswa. Fungsi Himajur adalah sebagai wadah pembinaan dan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat jurusan yang bertujuan untuk meningkatkan keilmuan, penalaran dan pengembangan profesionalisme para anggota mahasiswanya.

II.3. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga

II.3.1. Sejarah Berdirinya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga

Menurut sejarahnya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga resmi berdiri pada tanggal 23 Desember 1977. Pada saat awal berdirinya, FISIP UNAIR yang pada waktu itu masih bernama Fakultas Ilmu Sosial hanya memiliki 7 orang tenaga pengajar tetap dan 2 orang tenaga tidak tetap. Pada tahun akademik 1978, mahasiswa yang diterima untuk angkatan pertama hanya 62 orang, 29 orang di antaranya mahasiswa putri. Para mahasiswa ini telah diterima melalui seleksi ujian masuk yang diselenggarakan oleh Proyek Perintis I Departemen P & K. pada tanggal 21 Pebruari 1978, kuliah pertama semester tahun akademik 1978 dimulai dan inilah sebenarnya awal dan tantangan riil dari sebuah proses perubahan besar di bidang akademik.

Surat Keputusan Rektor Universtas Airlangga yang terbit pada hari itu, bernomor AI.5685/Rektor/90/UA/77, mengangkat sebuah presidium untuk mengelola Fakultas yang baru ini, dengan Soetandyo Wignjosoebroto, MPA sebagai Ketua, dr. R Koento, MPH., MA sebagai Sekretaris, Prof dr. Marsetio Donoseputro sebagai anggota, dan Prof dr. D. Ma'rifin Husin, MSc sebagai anggota. Pada hari itu juga, dengan surat keputusan yang sama, Rektor membubarkan Panitia Pembentukan Fakultas Ilmu Sosial UNAIR yang telah bekerja setahun lamanya mempersiapkan berdirinya Fakultas Ilmu Sosial tersebut. Sejak awal mulai, Fakultas Ilmu Sosial didirikan dengan niat besar mendayagunakan inovasi-inovasi di bidang pendidikan guna mengembangkan kegiatan belajar mengajar yang inkonvensional.

Selain pengembangan dan penerapan apa yang disebut *learning by objectives*, dan pula penggunaan praktek diskusi dalam kelompok-kelompok kecil sebagai salah satu cara belajar mahasiswa, Fakultas Ilmu Sosial juga mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk menulis dan untuk mendayagunakan informasi yang tersimpan di dalam keputusan dan perpustakaan.

Minat untuk mengamati kenyataan (melalui studi lapangan) dan mendayagunakan data sekunder (melalui usaha kliping) juga telah dicoba dikembangkan sejak tahapnya yang paling dini ditahun akademik yang pertama. Sementara itu pantas pula dicatat bahwa Fakultas Ilmu Sosial merupakan Fakultas pertama dilingkungan Universitas Airlangga yang menerapkan sistem kredit untuk menghitung besar beban kegiatan belajar mahasiswanya. Di bidang materi kajian dan materi pengajaran, sekalipun Fakultas Ilmu Sosial ini mencoba mengkonsentrasikan diri pada permasalahan sosiologik dan politik, namun ada dua dimensi utama yang akan banyak pula diperhatikan dan digarap dalam program-program kurikuler Fakultas, yakni dimensi kultural, dan dimensi psikologik/individual masyarakat. Pendidikan pada Fakultas Ilmu Sosial UNAIR ini akan lebih mencondongkan diri pada pendidikan yang bersifat multidisipliner di bidang ilmu-ilmu sosial dari pada mengarahkan diri pada suatu pendidikan menondisiplin yang ketat dan sempit. Pada tanggal 25 April 1978, dua bulan setelah dimulainya kegiatan-kegiatan akademis dalam Fakultas Ilmu Sosial UNAIR ini, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen P & K menyatakan prinsip persetujuannya atas pembukaan Fakultas ini (melalui suratnya bernomor 267/D/R/78).

Empat bulan kemudian, Rektor dengan surat keputusannya bertanggal 1-9-1978 dan bernomor A.II.3937/Rektor/50/UA/78 memandang perlu untuk mengganti bentuk dan personalia pimpinan Fakultas Ilmu Sosial. Bentuk pimpinan berubah dari bentuk Presidium ke bentuk Kedekanan. Sebagai Dekan pertama diangkat Soetandyo Wignjosoebroto, MPA, sedangkan dr. R. Koento, MPH., MA, Drs. J. Dwi Narwoko dan Drs. Soedarmadji Harjono masing-masing diangkat sebagai Pembantu Dekan urusan Pendidikan dan Penelitian, Pembantu Dekan Urusan Administrasi Umum, dan Pembantu Dekan Urusan Kemahasiswaan dan Pengabdian Masyarakat. FISIP kini hampir berusia seperempat abad, sehingga situasi, kondisi dan tantangan yang dihadapan tentunya telah pula berubah. Jika diawal berdiri FIS hanya menampung 62 orang mahasiswa, kini jumlah mahasiswa yang resmi tercatat sebanyak 1.830 lebih.³⁶

II.4. Pemilihan Umum Raya Mahasiswa (PEMIRA) FISIP UNAIR

Dinamika kehidupan kampus diwarnai oleh berbagai aktivitas dan kegiatan mahasiswa yang sarat dengan nuansa akademis maupun yang mengandung unsur sosial kemasyarakatan. Dimana seluruh kegiatan kemahasiswaan merupakan urat nadi kehidupan kampus yang tidak terlepas dari unsur peningkatan bidang akademik dan bidang keprofesionalan yang mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas individu sang mahasiswa.

³⁶http://www.fisip.unair.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=5&Itemid=6
diakses 14 Mei 2008 15.12

Kehidupan kampus tersebut tidaklah terlepas pula dengan kehidupan berdemokrasi. Demokrasi sangat erat kaitannya dengan kehidupan politik. Dan, politik secara sadar atau tidak telah mempengaruhi kehidupan mahasiswanya, baik secara individu maupun sebagai bagian dari kelompok masyarakat. Wujud dari demokrasi yang sangat mudah diamati adalah melalui pelaksanaan pemilihan umum. Ini dapat menjadi proses pembelajaran bagi para mahasiswa sebagai *agent of change*, dimana kampus dapat dijadikan sebuah miniatur kecil sebuah pemerintahan negara.

Dalam meningkatkan kesempatan sekaligus mengembangkan potensi yang ada dalam bidang politik, maka kampus FISIP UNAIR mengadakan Pemilihan Umum Raya atau PEMIRA yang diadakan setahun sekali untuk memilih presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan anggota Badan Legislatif Mahasiswa (BLM). Wadah aspirasi mahasiswa ini dapat dijadikan sebagai regenerasi dari kehidupan kemahasiswaan sehingga mahasiswa dapat meningkatkan integritas dan potensi yang mereka miliki sekaligus sebagai sarana mereka dalam melaksanakan kehidupan berdemokrasi.

Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga atau PEMIRA FISIP UNAIR 2007 dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2007 bertempat di halaman parkir Dekan FISIP UNAIR. Pihak Penyelenggaranya adalah Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa FISIP UNAIR dan diselenggarakan dalam rangka untuk mewujudkan kedaulatan mahasiswa dalam FISIP UNAIR, sebagaimana diamanatkan dalam UU ORMAWA FISIP UNAIR No.01/BLM.07/II/2006 tentang Pemilihan Umum Raya 2006/2007,

memilih pasangan presiden dan wakil presiden BEM FISIP UNAIR masa bakti 2007/2008 dan memilih anggota Badan Legislatif Mahasiswa (BLM) FISIP UNAIR masa bakti 2007/2008.

Partai-partai yang berpartisipasi dalam PEMIRA RAYA FISIP 2007 adalah :

1. Partai Cinta yang merupakan partai yang dimiliki oleh massa Ormek GMNI. Partai ini kemudian menjadi pemenang PEMIRA RAYA FISIP 2007 dengan perolehan suara sebanyak 311 suara dan berhak mendapatkan 3 kursi untuk menempatkan wakilnya dalam Badan Legislatif Mahasiswa. Mereka adalah Fahrul Rozi, Norma.K dan Ajeng Newanda.
2. Partai Pelangi Kampus yang merupakan partai yang dimiliki oleh massa Ormek HMI. Partai ini hanya memperoleh 214 suara, sehingga perolehan suaranya tidak mencukupi untuk menjadi pemenang. Partai Pelangi Kampus mendapatkan 2 kursi untuk menempatkan wakilnya dalam Badan Legislatif Mahasiswa. Mereka adalah M. Denny Puja dan Meinia P.
3. Partai Dinamis yang merupakan partai yang dimiliki oleh massa Ormek KAMMI. Partai ini mendapatkan jumlah suara yang sama dengan Partai Pelangi Kampus, yaitu memperoleh 214 suara, sehingga mendapatkan 2 kursi untuk menempatkan wakilnya dalam Badan Legislatif Mahasiswa. Mereka adalah Hidayat Anshori dan Fatiatun Nayyiroh.
4. Partai Anak Muda yang juga dimiliki oleh massa Ormek GMNI. Tentunya, keberadaan partai ini lebih dikarenakan sebagai strategi politik untuk memenangkan PEMIRA RAYA, karena dengan ikutnya Partai Anak

Muda dapat mendongkrak perolehan suara untuk menempatkan wakil massa Ormek GMNI dalam kepengurusan Badan Legislatif Mahasiswa. Partai ini mendapatkan 127 suara dan mendapatkan 1 kursi untuk menempatkan wakilnya dalam Badan Legislatif Mahasiswa. Wakilnya adalah Ricky RW.

5. Partai Bunga yang merupakan partai yang dimiliki oleh massa Ormek PMII. Partai ini hanya mendapatkan perolehan 108 suara, walaupun demikian partisipasi mereka patut diberi apresiasi. Partai ini juga mendapatkan 1 suara untuk menempatkan wakilnya dalam Badan Legislatif Mahasiswa. Wakilnya adalah Yeyen. R
6. Partai Akar Rumput yang dapat dikatakan sebagai kekuatan penggembira saja karena hanya mendapatkan perolehan 84 suara. Partai ini merupakan gabungan antara massa ormek LMND dan Ormek-ornek lainnya yang kekuatannya kurang signifikan dalam percaturan politik kampus di FISIP UNAIR.

Salah satu Partai tidak lolos verifikasi, yaitu Partai Biru Bersatu dikarenakan kurang memenuhi syarat sebagai peserta PEMIRA.

Sedangkan dalam pemilihan Presiden dan Wakil presiden Badan Eksekutif Mahasiswa FISIP UNAIR 2007 terdapat tiga calon yaitu : Pasangan Agus Fauzi Ismail dan Erma Dwi Apsari yang kemudian menjadi Presiden dan Wakil Presiden BEM FISIP UNAIR masa bakti 2007/2008 dengan memperoleh 497 suara, kemudian pasangan Rajma Tri Handoko dan Sigit Aris S yang hanya

memperoleh 483 suara. Dan terakhir, pasangan Hendraven DM dan Annisa Paramita yang memperoleh 105 suara.

Pasangan Agus dan Erma merupakan pasangan yang diusung oleh Ormek GMNI sedangkan pasangan Rajma dan Sigit merupakan pasangan dari koalisi Ormek HMI, KAMMI dan PMII dan pasangan Hendraven dan Annisa merupakan pasangan yang diusung Ormek LMND dan Ormek-ormek yang tidak sebesar empat Ormek diatas. Perolehan suara yang diperoleh sangat ketat, sehingga selisih yang terjadi hanya 13 suara saja. Suatu perolehan suara yang sangat ketat semenjak diadakannya Pemilihan Umum untuk memilih calon Presiden dan wakil presiden BEM di FISIP UNAIR.

Jumlah total mahasiswa yang menggunakan hak pilihnya dalam PEMIRA RAYA FISIP UNAIR 2007 adalah berjumlah 1187 suara dengan surat suara yang sah sebanyak 1185, suara tidak sah sebanyak 91 suara dan abstain sebanyak 11 suara. Proses penghitungan suara pun berlangsung hingga dini hari akibat banyaknya kertas suara yang dihitung.

II.5. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Ormawa FISIP UNAIR

Badan Eksekutif Mahasiswa FISIP UNAIR merupakan lembaga perwakilan dari mahasiswa dimana lembaga ini melaksanakan fungsi eksekutif atau pelaksana segala kebijakan yang berpedoman pada Garis-Garis Besar Program Kegiatan Kemahasiswaan yang disusun oleh BLM. Menurut Amandemen Konstitusi Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga 2007-2008, Badan Eksekutif Mahasiswa Organisasi

Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, disebut BEM Ormawa FISIP UNAIR.

Para anggota BEM sendiri dipilih oleh Presiden dan Wakil presiden melalui proses seleksi *fit* dan *proper test*. Awalnya Presiden BEM terpilih mengadakan seleksi untuk para calon menteri yang akan duduk dalam kepengurusan BEM, selanjutnya para menteri itulah yang akan menentukan anggota staff mereka.

Dalam Amandemen Konstitusi Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga 2007-2008 Bab VI pasal 17 dijelaskan tugas dari BEM Ormawa FISIP UNAIR, yaitu :

1. Melaksanakan Ketetapan MUSMA (Musyawarah Umum Mahasiswa) Ormawa FISIP UNAIR.
2. Menyelenggarakan fungsi eksekutif dalam tingkat fakultas.
3. Membuat Rancangan Garis Besar Haluan Program Kerja.
4. Mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan dan kebijakan kepada MUSMA Ormawa FISIP UNAIR pada akhir kepengurusan.

Para anggota BEM yang terpilih ini diangkat melalui Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Nomor: 052/J03.1.13/KM/2007 tentang: Pengesahan Susunan Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)-Fakultas Universitas Airlangga Masa Bakti Tahun 2007-2008. Berikut susunan pengurus BEM Ormawa FISIP UNAIR masa bakti 2007-2008:

| | | | |
|--------------------|---------------------|-----|------|
| Presiden | : Agus Fauzi Ismail | Sos | 2004 |
| Wakil Presiden | : Erma Dwi Apsari | Hi | 2004 |
| Sekretaris | : Nimas Damarsari | Sos | 2005 |
| Wakil Sekretaris | : Willa Nurul Utami | Hi | 2006 |
| Bendahara Umum | : Gandhis R.P | Pol | 2005 |
| Wakil Bendahara I | : Azifatul Farida | Sos | 2005 |
| Wakil Bendahara II | : Yunila R. | AN | 2006 |

Departemen Sosial dan Politik (Sospol)

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|-------|------|
| Menteri | : Arif Febrian Arzany | Pol | 2005 |
| Koordinator Bidang Sosial | : Rangga Bisma Aditya | Sos | 2005 |
| Staff | : Bayu Sugita | Antro | 2005 |
| | Rosa Anrukarina | Pol | 2006 |
| | Amanu | TP | 2006 |
| | Annisa Puji Lestari | TP | 2006 |
| | Yashinta Dian Parstiwi | AN | 2006 |
| | Nila A. | AN | 2005 |
| Koordinator Bidang Politik | : Teddy Ganesha Tahepary | Pol | 2006 |
| Staff | : Frans Mulya Tambunan | Antro | 2006 |
| | Isnani Jana Bidari | Sos | 2006 |
| | Aditya Fernando | Sos | 2006 |

Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM)

| | | | |
|---------|-----------------------|-----|------|
| Menteri | : Riska Widya Winarti | AN | 2005 |
| Staff | : Oryza Sativa | Sos | 2005 |
| | Ratih Sulanjari | Pol | 2005 |
| | Sarmiati | AN | 2005 |
| | Moniq | AN | 2006 |

| | | |
|-----------------------|-----|------|
| Nilam | Par | 2006 |
| Billy | AN | 2006 |
| Yuanita Dewi Prastiwi | IIP | 2006 |
| Soni Eka Pranata | Pol | 2005 |
| Ana Krisna Rini | AN | 2005 |
| Ken Kumbara | Sos | 2006 |

Departemen Minat dan Bakat (Minbak)

Menteri : Papin Bagusta Antro 2004

Koordinator Bidang Seni dan Budaya : Chemie Fitrani Jamal Pol 2005

Staff : Daining Tri Wutanti Antro 2005
 Enny Mayasari AN 2005
 Meirani Antro 2005
 Brahmantyo Adi Nugroho AN 2006
 Diah Noviandini Sos 2006
 Anggia Septi R. Pol 2006

Koordinator Bidang Olahraga: Anggi TP 2004

Staff : Alfiah Antro 2005
 Rio Gorbianto Par 2005
 Hendy AN 2006
 Dypta Antro 2006
 Rizal Muryo Prasajo Par 2006
 Muh. Fandika Aqsa A. TP 2006

Departemen Agama

Menteri : Kristina Kom 2005

Pj. Agama Islam : Elia HI 2004
 Pj. Agama Kristen : Harun Pratoyo AN 2005
 Pj. Agama Katolik : Anastasia Kom 2006
 Pj. Agama Hindu : Pram HI 2005
 Pj. Agama Buddha : Osmond Sos 2006

Departemen Kesejahteraan Mahasiswa (Kesma)

Menteri : Erwin Dwi Hartantyo HI 2004

Pj. Komunikasi : Mirza Kom 2006
 Pj. Antropologi : Gabriel Visnu Antro 2006

| | | | |
|----------------------------|----------------------|-----|------|
| Pj. Hubungan Internasional | : Ken Vallen | HI | 2006 |
| Pj. Sosiologi | : Adi | Sos | 2006 |
| Pj. Politik | : Erwin Kusuma R | Pol | 2006 |
| Pj. Administrasi Negara | : Narulyta Ramadhany | AN | 2006 |
| Pj. Ilmu Informasi | : Anjar Widyaningsih | IIP | 2004 |
| Pj. Teknisi Perpustakaan | : Nasrul Rofi'i | TP | 2006 |
| Pj. Pariwisata | : Titik Wijayanti | Par | 2006 |

Departemen Informasi dan Komunikasi (Infokom)

| | | | |
|------------------------|------------------------|-------|------|
| Menteri | : Aditya Dimas Prabowo | Pol | 2005 |
| Staff Divisi Internal | : Erwin Dwi Hartantyo | HI | 2004 |
| | Ade Mitra Maharani | Kom | 2006 |
| | Pera Utami | HI | 2006 |
| | Ade | IIP | 2004 |
| | Roselina Niya M.S | IIP | 2006 |
| Staff Divisi Eksternal | : Ilham Pradono | Kom | 2004 |
| | Pramudya Windi S. | Antro | 2005 |
| | Sunni | Kom | 2005 |
| | Shinta Ary Purwanty | AN | 2005 |
| | Tangguh Era | Sos | 2006 |

II.6. Badan Legislatif Mahasiswa (BLM) Ormawa FISIP UNAIR

Badan Legislatif Mahasiswa FISIP UNAIR merupakan lembaga perwakilan dari mahasiswa dimana lembaga ini melaksanakan fungsi legislatif. Menurut Amandemen Konstitusi Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga 2007-2008, Badan Legislatif Mahasiswa Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, disebut BLM Ormawa FISIP UNAIR. Berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Nomor: 051/J03.1.13/KM/2007 BLM memiliki fungsi untuk:

1. Merumuskan pemenuhan ketiga kebutuhan pokok mahasiswa sebagai garis besar program Badan Eksekutif Mahasiswa yang meliputi bidang Pengembangan Penalaran, Minat & Bakat serta Kesejahteraan bagi mahasiswa.
2. Memberikan saran, mengawasi dan menilai kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga serta melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada Rektor Universitas Airlangga.
3. Menyelenggarakan persidangan berkala, sekurang-kurangnya sekali setiap semester.

Sedangkan dalam Amandemen Konstitusi Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga 2007-2008 Bab V pasal 12 dijelaskan tugas dari BLM Ormawa FISIP UNAIR, yaitu :

1. Menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa.
2. Membuat Rancangan Amandemen Konstitusi.
3. Melaksanakan ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan MUSMA Ormawa FISIP UNAIR.
4. Menyelenggarakan MUSMA Ormawa FISIP UNAIR.
5. Mengadakan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja BEM Ormawa FISIP UNAIR.
6. Mengesahkan Draf RUU menjadi UU.

7. Melakukan penjaringan, penilaian dan menetapkan anggota Komisi Pemilihan Umum pada Pemilihan Umum Raya Mahasiswa (PEMIRA) Fakultas.
8. Melakukan penjaringan, penilaian dan menetapkan anggota Panitia Pengawasan Pemilihan Umum pada Pemilihan Umum Raya Mahasiswa (PEMIRA) Fakultas.
9. Melakukan penjaringan dan penilaian kandidat Senator Fakultas pada Pemilihan Umum Raya Mahasiswa (PEMIRA) Fakultas.

Para anggota BLM ini terpilih melalui perolehan suara partai yang mereka dapatkan melalui PEMIRA RAYA FISIP 2007. Banyaknya wakil mereka dalam BLM tergantung seberapa banyak suara yang mereka peroleh, sehingga mendapatkan kursi dalam perwakilan BLM. Sedangkan, anggota BLM yang lain merupakan perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Jurusan (Himajur) yang terpilih melalui pemilihan senat di jurusannya.

Para anggota BLM yang terpilih ini diangkat melalui Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Nomor: 051/J03.1.13/KM/2007 tentang: Pengesahan Susunan Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BLM)-Fakultas Universitas Airlangga Masa Bakti Tahun 2007-2008. Berikut susunan pengurus BLM FISIP UNAIR masa bakti 2007-2008:

| | | |
|-----------------|--------------------|-----------|
| Ketua | : Fahrul Rozi | 070517795 |
| Sekretaris Umum | : Arif Alfian Haji | 070517829 |
| Bendahara | : Vebriary Eka R. | 070517825 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|-----------|
| Kabid. Kesma | : Aswin Bahar M. | 070610354 |
| Anggota | : Audy Gusti Armandi | 070610590 |
| Kabid. Sosial Politik | : Ricky R.W | 070610343 |
| Anggota | : Yeyen R. | 070417408 |
| | Bryan Adrianto | 070517841 |
| Kabid. Agama | : Hidayat Anshori | 070517570 |
| Anggota | : Putu Aditya F. | 070417270 |
| | Pieter Pierre T. | 070610465 |
| Kabid. Pengembangan SDM | : Ririh Cahyo W. | 070517779 |
| Anggota | : Norma K. | 070517725 |
| | Fatiatun Nayyiroh | 070517715 |
| Kabid. Infokom | : M. Deny Puja | 070517951 |
| Anggota | : Ajeng Newanda | 070517814 |
| | Arif Sontamajaya | 070517948 |
| Kabid. Minat dan Bakat | : Baskoro Wicaksono | 070610055 |
| Anggota | : Meinia P | 070610193 |



Bab III

Temuan dan Analisis Data

III.1. Mahasiswa dan Persaingan Ormek dalam Kampus FISIP

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga (FISIP UNAIR) merupakan kampus dengan jumlah mahasiswa terbanyak ketiga setelah Fakultas Ekonomi dan Fakultas Kedokteran.¹ Sehingga, kekuatan mahasiswanya sangat diperhitungkan dalam percaturan pergerakan mahasiswa di kampus UNAIR ini. Apalagi, mahasiswa FISIP sendiri dikenal sebagai mahasiswa yang kritis dalam menghadapi permasalahan sosial.

Ini yang menjadi peluang bagi Ormek untuk mendapatkan pengaruh yang cukup signifikan di kampus FISIP. Ormek sendiri merupakan kelompok yang berkembang menjadi kelompok kepentingan dalam sistem politik kampus. Kampus sebagai tempat menuntut ilmu bagi para mahasiswanya dijadikan sebagai ajang “politik praktis” yang didalamnya sangat diwarnai dengan keterlibatan dan eksistensi yang bersifat personal maupun kelembagaan dari Ormek. Ini membuat konstalasi politik di kampus secara signifikan diwarnai maupun dipengaruhi oleh Ormek. Oleh karena itu, Organisasi Intra Kampus, dalam hal ini institusi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Badan Legislatif Mahasiswa (BLM). Secara khusus maupun umum menjadi arena persaingan para Ormek.

¹ Data diambil dari Universitas Airlangga tahun 2006. Jumlah Mahasiswa Fakultas Ekonomi terbesar di Universitas Airlangga dengan 5381 mahasiswa disusul Fakultas Kedokteran dengan 2193 mahasiswa dan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan jumlah 1830 mahasiswa.

Suasana persaingan antar Ormek awalnya terlihat ketika mahasiswa baru memasuki kampus FISIP, ketika itu dapat terlihat mereka berlomba-lomba mencari massa atau kader yang sekiranya berpotensi. Kemudian pertarungan tersebut berlanjut ke ranah Pemilihan Umum mahasiswa. Lebih lanjut keberadaan Ormek dalam kampus ditegaskan melalui wawancara dengan Yudha :

“Ya persaingan antara Ormek-ormek yang lain seperti GMNI, HMI, PMII, tentu kita akan memperebutkan hal itu (posisi-pen), karena seperti yang dikatakan oleh Maslow bahwa kebutuhan utama tentunya akan aktualisasi, begitu pula organisasi. Organisasi-organisasi HMI, PMII, GMNI tuh.....terutama HMI, misalnya, komisariat FISIP memiliki struktur yang sangat minim, akibatnya dengan kader yang banyak, akibatnya struktur di komisariat akan gemuk. Kegemukan ini diantisipasi oleh HMI dengan perebutan-perebutan kursi-kursi ataupun wilayah-wilayah aktualisasi di kampus.”²

Menurut Yudha dapat disimpulkan awal dari keberadaan Ormek dalam kampus tersebut, karena adanya kebutuhan untuk aktualisasi, sehingga kampus dijadikan wadah atau sarana bagi Ormek untuk menunjukkan eksistensi mereka dalam masyarakat kampus. Persaingan akan aktualisasi ini yang membuat dinamika kehidupan kampus dapat menjadi lebih semarak. Di kampus FISIP sendiri secara tradisional ada empat Ormek besar yang berdiri dan memberikan suatu nuansa baru dalam kehidupan bermasyarakat. Ormek tersebut adalah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

Kehadiran empat Ormek tersebut, tidak memberikan suatu aroma persaingan yang sehat. Bisa jadi, ini dikarenakan dengan adanya perbedaan ideologi dan program yang mereka usung. GMNI dengan ideologi Marhenisnya,

² Wawancara dilakukan pada Senin, 26 Mei 2008 di Komisariat HMI FISIP, pukul 17.00. Yudha merupakan ketua Komisariat HMI FISIP UNAIR.

HMI dan PMII dengan Islam Modernnya dan KAMMI dengan Islam Fundamentalnya. Namun, suasana persaingan yang ada hingga saat ini menurut Agus Fauzi, sudah berjalan dengan baik. Melalui wawancara dengan Agus :

“ Sebenarnya persaingan yang kita katakanlah waktu saya naik itu sebenarnya sudah lumayan bagus. Artinya katakanlah GMNI dianggap besar dan kawan-kawan Ormek lainnya akhirnya bergabung menjadi satu untuk mencalonkan sebagai saingan, seperti itu. Sebenarnya persaingan disini normatif dalam artian ketika kekuatan yang satu nanti dianggap masih kurang, maka dia bergabung dengan yang lain itu wajar dalam perpolitikan seperti itu.....itu sebagai bentuk pembelajaran saja terhadap mahasiswa.”³

Agus sendiri merupakan presiden terpilih melalui pemilihan umum mahasiswa. Agus menjelaskan persaingan yang timbul dari pemilihan umum mahasiswa kemarin. Dengan kapasitas dan pandangan Agus, dapat dikatakan persaingan yang terjadi sudah kondusif akhir-akhir ini. Kalaupun ada perbedaan-perbedaan itu wajar dalam “perpolitikan kampus”. Mungkin juga ini dikarenakan ketika peneliti mengadakan observasi, kondisi mahasiswa di lapangan sedang solid-solidnya dalam mengadakan aksi anti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Bahkan, kalaupun ada perbedaan yang menyebabkan persaingan, Agus melihatnya sebagai bentuk pembelajaran (politik) terhadap mahasiswa.

Lebih lanjut ada yang melihat persaingan diantara Ormek dilihat sebagai suatu keberagaman yang menyemarakkan kehidupan kampus. Menurut Riska Widya:

“Multikulturalisme di FISIP ini kan, bukan sesuatu yang jelek. Malah menurutku ada apa ya semacam....semacam keberagaman malah menambah semarak. Atau bahkan menambah keragaman dan menambah inilah...apa ya....keindahan”⁴

³ Wawancara dilakukan pada Kamis, 29 Mei 2008 di kantin FISIP UNAIR pukul 15.30. Agus Fauzi merupakan Presiden BEM FISIP UNAIR masa bakti 2007-2008

⁴ Wawancara dilakukan pada Senin, 26 Mei 2008 di corner Politik pukul 15.30. Riska Widya merupakan ketua komisariat GMNI FISIP. Dan merupakan Menteri bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) dalam kepengurusan BEM FISIP masa bakti 2007-2008

Persaingan diantara Ormek dalam kampus FISIP pada dasarnya bagus dan dapat menimbulkan suasana kompetitif dalam perebutan wilayah-wilayah aktualisasi, seperti yang dikatakan oleh Yudha diatas. Namun, pada kenyataan suasana yang tercipta seperti sekarang ini tidak selamanya berjalan dengan mulus. Terutama bila perbedaan kepentingan mulai timbul. GMNI sendiri dalam kancah perpolitikan kampus dalam kampus FISIP UNAIR dapat dikatakan sebagai organisasi yang solid. Mereka empat kali berturut-turut mampu menguasai struktur Organisasi Intra Kampus, BEM dan BLM terutama pada kepengurusan BEM. Inilah yang menjadi polemik ketika kebijakan mereka hanya menguntungkan “kelompok” tertentu. Ormek-ormek lain di FISIP seperti HMI, PMII dan KAMMI tentu saja tidak tinggal diam dalam menghadapi permasalahan ini, namun untuk sementara mereka belum mampu untuk mengguguli solidnya keberadaan GMNI dalam ranah “perpolitikan kampus” di FISIP UNAIR.

Namun menurut pandangan orang “netral” atau mahasiswa yang tidak mengikuti Ormek tapi mengikuti dengan seksama sepak terjang Ormek dalam lingkungan kampus FISIP berpendapat bahwa mahasiswa menjadi jauh dari lembaganya sendiri, dalam hal ini BEM dan BLM, karena pengaruh Ormek yang besar. Dan orang-orang non Ormek jadi tidak memperoleh manfaatnya secara nyata. Apalagi mahasiswa non Ormek hanya dijadikan *vote getter* saja, namun signifikansinya terhadap komunitas FISIP tidak ada. Menurut Rahadi :

“mahasiswa ini, terpisah dari lembaganya itu sendiri...dimana hanya BEM dan BLM dikuasai oleh elit-elit. Partai-partai tertentudimasukkin oleh Ormek-

*ormek tertentu. Jadi, orang-orang non Ormek....sendiri tidak memperoleh apa ya....secara nyata, tidak memperoleh manfaatnya secara nyata.....*⁵

Sebagai salah satu wadah atau sarana untuk menyalurkan aspirasi mahasiswa, Pemilihan Umum tentunya diadakan sebagai wujud berjalannya proses demokratisasi di dalam kampus. Namun, ini menjadi ajang yang menarik bagi Ormek-ormek untuk mengaktualisasikan diri mereka dalam kehidupan masyarakat kampus. Apalagi pihak yang memenangkan Pemilihan Umum mahasiswa dipastikan akan menguasai posisi strategis dalam pemerintahan mahasiswa yang dijalankan oleh BEM dan BLM. Dalam FISIP UNAIR, pemilihan umum bernama Pemilihan Umum Mahasiswa Raya. Dimana ajang tersebut justru menjadi konflik baru bagi Ormek-ormek yang terlibat. Hampir dipastikan dengan adanya penyelenggaraan PEMIRA FISIP setiap tahun, ada saja pihak-pihak yang kurang puas dengan hasil yang tercipta. Sehingga, biasanya disinilah persaingan antar Ormek lebih terlihat dan kekhawatiran akan munculnya konflik lebih besar.

III.2. Mahasiswa dalam Pemilihan Umum Raya Mahasiswa (PEMIRA RAYA) FISIP

III.2.1 Persaingan Ormek dalam Pemilihan Umum Raya Mahasiswa FISIP

Pemilihan Umum Mahasiswa merupakan salah satu syarat terciptanya suatu proses demokratisasi. Demikian pula dalam kehidupan kampus. Pemilihan umum dijadikan sebagai ajang, wadah maupun sarana bagi mahasiswa untuk menyalurkan aspirasi sebagai proses pembelajaran politik. Proses pemilihan

⁵ Wawancara dilakukan pada Rabu, 4 Juni 2008 di Corner Lantai 3 Gedung FISIP UNAIR pukul 12.30. Rahadi merupakan mahasiswa FISIP yang *concern* terhadap permasalahan yang timbul dalam BEM maupun BLM Ormawa FISIP.

Presiden BEM dan pemilihan anggota BLM merupakan bentuk proses pemilihan umum yang lazim di kampus-kampus.

Di kampus FISIP UNAIR, proses yang terjadi kurang lebih sama. Pemilihan Umum Mahasiswa di kampus FISIP dinamakan Pemilihan Umum Raya (PEMIRA RAYA) FISIP yang terjadi setiap setahun sekali selama bulan Mei, namun berdasarkan keputusan keberagaman dari rektorat dinyatakan bahwa nantinya PEMIRA dilaksanakan secara serentak di semua fakultas pada bulan Desember.

Sudah menjadi tradisi dalam penyelenggaraan PEMIRA, terdapat berbagai macam partai beserta atribut serta program-program yang mereka bawa serta calon-calon anggota BLM yang tiba-tiba ikut menyemarakkan jalannya PEMIRA. Tetapi, apabila dicermati lebih lanjut, PEMIRA FISIP yang menjadi sarana atau ajang perebutan aktualisasi bagi Ormek-ormek yang bernaung di lingkungan kampus. Motif mereka mungkin saja ingin melakukan pelayanan terhadap masyarakat maupun warga FISIP UNAIR.

Maka, ajang PEMIRA menjadi ajang penuh kepentingan disini sehingga tidaklah mengherankan muncul perselisihan maupun konflik diakibatkan adanya ketidakpuasan dalam penyelenggaraan maupun hasil dari PEMIRA itu sendiri. PEMIRA yang seharusnya menjadi saluran demokrasi menjadi macet fungsinya. Adanya ketidakpuasan terhadap pemenang PEMIRA menjadi salah satu faktor pemicu konflik. Mengenai persaingan yang sangat tajam dalam PEMIRA. Amjad menjelaskan lebih lanjut:

“kalo ngomong PEMIRA ya, PEMIRA itu kan sebuah kompetisi....kompetisi politik. Kalau ngomong persaingan didalam kompetisi selalu ada persaingan.

Jadi, ya itu wajar memang, kalau persaingan itu kan, memperebutkan kue. Ketika ada PEMIRA. dan ada sebuah kue yang kita perebutkan, kalau perspektif saya seperti itu. Kalau saya mengatakan seperti itu, wajar dalam PEMIRA. Harus ada sebuah persaingan, kalau tidak ada persaingan bukan sebuah kompetisi politik. Dan kompetisinya bukan kompetisi semu, ini benar-benar kompetisi. Beda kalau hanya ada satu organ, berhubung dalam PEMIRA FISIP khususnya ada beberapa organ memiliki kepentingan disana. Jadi, ini benar-benar persaingan bukan merupakan persaingan semu lagi. Kalau dalam tataran UNAIR umpamanya, persaingannya masih persaingan semu dimana yang maju dari satu golongan aja....kavak gitu.....”⁶

Dengan segala dinamika yang timbul dalam PEMIRA, Amjad berpendapat bahwa persaingan memperebutkan kursi maupun posisi dalam kepengurusan BEM maupun BLM sangat ketat terjadi dalam PEMIRA FISIP. Bahkan, lebih ketat terjadi apabila dibandingkan dengan PEMIRA KM yang merupakan pemilihan umum mahasiswa di tingkat perguruan tinggi. Amjad menambahkan bahwa proses yang terjadi dalam FISIP, sebenarnya lebih maju daripada proses-proses (pemilihan umum mahasiswa) di kampus-kampus fakultas lain. Jadi, dapat dikatakan persaingan antar Ormek merupakan kompetisi politik dalam kampus lebih tajam dan terlihat dalam PEMIRA. Bahkan, menurut Riska Widya kecenderungan yang muncul dapat menimbulkan hasil yang lebih tajam seperti konflik diantara Ormek. Riska Widya menambahkan pernyataan Amjad :

“Siapa sih yang gak tau momen PEMIRA itu? Begitu banyak energi yang tersedot disana....khususnya untuk anak-anak yang tergabung dan terlibat dalam Ormek. Tingkat kompetisi atau aura kompetisi akan terasa jelas sekali ketika akan memasuki momen-momen PEMIRA. Dan ketika momen-momen PEMIRA, siapa pun bisa menjadi kawan dan siapapun bisa menjadi lawan. Tanpa kita tahu begitu saja, yang dianggap kawan tiba-tiba menusuk dari belakang. Bisa saja yang dianggap lawan, tiba-tiba berkawan. Itu kan justru rawan sekali menimbulkan konflik. Meskipun, bukan konflik secara fisik. Tapi juga, adu domba...terus kemudian hasut menghasut....itu pasti ada. Apalagi yang berkaitan dengan massa. Misalkan, mencari massa....”

⁶ Wawancara dilakukan pada Selasa, 3 Juni 2008 di Posko Solidaritas pukul 12.30. M. Amjad merupakan Ketua Komisariat PMII FISIP

Mekanisme PEMIRA sendiri hampir sama dengan Pemilihan Umum yang terjadi ditingkat nasional. Dalam proposal kegiatan PEMIRA FISIP UNAIR 2007 dijelaskan adanya fase-fase seperti pendaftaran partai, verifikasi partai, pendaftaran calon legislatif, pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden, kampanye partai, debat calon presiden dan wakil presiden, hari tenang, serta puncaknya, pemungutan dan penghitungan suara.

Disinilah biasanya Ormek memainkan perannya dalam proses perebutan pengaruh dengan mengikuti PEMIRA. Berdasarkan pengamatan peneliti sebagai mahasiswa FISIP, Ormek-ormek tersebut mengikuti PEMIRA dengan mendirikan partai. Jadi, Ormek tersebut mendirikan partai berdasarkan ideologi Ormek yang mereka pegang. Dalam PEMIRA FISIP RAYA 2007 yang diselenggarakan pada tanggal 23 Mei 2007, terdapat enam partai peserta. Partai tersebut adalah Partai Cinta yang merupakan milik Ormek GMNI yang kemudian menjadi pemenang dalam PEMIRA, kemudian Partai Pelangi Kampus yang merupakan milik Ormek HMI, Partai Dinamis yang merupakan milik Ormek KAMMI, Partai Bunga yang merupakan milik Ormek PMII, Partai Anak Muda yang merupakan milik Ormek GMNI dan Partai Akar Rumput yang merupakan milik Ormek LMND. Partai-partai tersebut bersaing untuk memperebutkan kursi dalam Badan Legislatif Mahasiswa.

Sedangkan dalam Pemilihan Calon Presidennya terdapat tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden BEM, mereka adalah Agus Fauzi Ismail dan Erma Dwi Apsari, Rajma Tri Handoko dan Sigit Aris serta Hendraven DM dan Annisa Paramita. Hasil yang di terjadi dalam PEMIRA tahun 2007 ini sebenarnya

mengecewakan partai-partai yang selama ini hanya menjadi “penggembira” saja. Karena, Partai Cinta yang dimiliki oleh GMNI kembali memenangkan persaingan antara partai-partai lain yang ada. Mereka dapat dikatakan sebagai kekuatan *status quo* karena untuk keempat kalinya kembali dipercaya masyarakat FISIP. Apalagi calon presiden yang mereka usung juga menjadi pemenang dalam PEMIRA. Makin solid saja kekuatan GMNI dalam percaturan politik kampus di BEM maupun BLM FISIP tahun 2007-2008.

Dengan kenyataan yang ada sepertinya sulit bagi Ormek-ormek besar lainnya seperti HMI, PMII dan KAMMI untuk menggusur dominasi GMNI. Padahal, dalam pemilihan Capres kemarin mereka sudah melakukan koalisi diantara mereka. Namun, lagi-lagi usaha mereka kandas dikarenakan selisih 13 suara dengan Capres pemenang yaitu Agus Fauzi Ismail dan Erma Dwi Apsari. Menurut M. Denny kondisi yang terjadi di FISIP sekarang ini menimbulkan semacam frustrasi politik. Lebih jauh Denny mengungkapkan :

“Jadi untuk memperebutkan FISIP 1 (presiden BEM) kebetulan tahun kemarin, tiga organ gabung antara HMI, KAMMI dan PMII dan melawan GMNI dan satunya LMND, jadi posisinya seperti itu. Tapi, permasalahannya, selisihnya cuma 13 suara dan lewat (kesempatannya), teman-teman dari 3 organ ini untuk menumbangkan sistem yang sudah empat tahun ini bercokol. Akhirnya kesempatan buat berkarya di BEM itu jadi tertutup kemungkinannya. Termasuk lobi-lobian menteri jadi tertutup semuanya...”⁷

Dapat dikatakan, untuk sementara masih sulit menurunkan “sistem” yang lama menguasai Organisasi Intra Kampus dalam FISIP UNAIR. Kebutuhan akan

⁷ Wawancara dilakukan pada Rabu, 28 Mei 2008 di Kantin FISIP UNAIR pukul 15.00. M. Denny Puja merupakan wakil dari Partai Pelangi Kampus dalam BLM dan menjabat sebagai Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi pada kepengurusan BLM FISIP UNAIR masa bakti 2007-2008.

aktualisasi bagi Ormek-ormek lain menjadi terhambat. Apalagi, sesuai tradisi yang berlangsung setelah PEMIRA, biasanya kabinet kepengurusan BEM yang dimenangkan oleh pasangan capres dan cawapres tertentu, kabinetnya diisi oleh orang-orang “pilihan” dari partai yang mengusung capres tersebut. Dalam kasus FISIP ini, pasangan Agus dan Erma ini memilih para menteri yang berasal dari partai yang mendukung dan mengusung mereka. Sehingga, biasanya Ormek-ormek lainnya tidak kebagian jatah kepengurusan dalam BEM. Hanya melalui kursi BLM sajalah, persaingan yang ada lebih berwarna. Karena, hampir semua Ormek memiliki wakilnya dalam kepengurusan. Namun, akibat partai mereka tidak menjadi pemenang dalam PEMIRA, biasanya jatah kursi yang diberikan pun sangat terbatas.

Dapat dikatakan dengan memakai pendekatan Schumpeter, bahwa kondisi demokrasi yang terjadi di FISIP memang penuh dengan entitas yang memandang konflik kepentingan antar kelompok dapat terwadahi melalui mekanisme kepartaian serta pemilihan umum yang teratur. Dan kesempatan bagi Ormek-ormek untuk berpartisipasi dalam PEMIRA sangat besar di bulan Desember nanti. Tentunya, dengan proses yang ada sekarang ini, kesempatan mereka untuk menggantikan dominasi GMNI sangat terbuka lebar.

III.2.2. Perebutan Kursi dalam BEM dan BLM Pasca PEMIRA

Ada dua dimensi teoritik dari Robert Dahl, bahwa sistem demokrasi berjalan dalam suatu lingkungan apabila tingkat konstestasi, kompetisi atau oposisi yang dimungkinkan sudah tinggi dan seberapa banyak warga negara yang

memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam kompetisi politik. Lingkungan kehidupan politik dalam FISIP sebenarnya sudah terjalin suasana seperti itu. Namun, keadaan yang timbul belum sepenuhnya demokratis karena adanya peran Ormek yang cukup memiliki pengaruh. Misalnya dalam pelaksanaan PEMIRA, masih sedikit mahasiswa yang menggunakan hak pilihnya dikarenakan mereka benar-benar memilih demi kemajuan FISIP. Biasanya, oleh partai-partai yang ditunggangi Ormek, mereka hanya dijadikan sebagai *vote getter* belaka. Jadi, mereka tidak tahu apa yang mereka pilih disana. Kalaupun ada mahasiswa yang kritis terhadap adanya permasalahan dalam FISIP ini, mereka biasanya justru memutuskan untuk tidak menggunakan hak pilihnya.

Kondisi seperti ini sebenarnya sudah disadari oleh masing-masing Ormek yang ada. Seperti yang diungkapkan Amjad :

"kalau saya melihat demokrasi yang ada di FISIP masih dalam tataran prosedural, jadi semua tuh terbuka. Mulai dari KPU dan sebagainya dan kita tidak menafikan ketika ada kepentingan. Pasti ada pembagian-pembagian disana. Mulai dari awal proses pun pasti ada proses pembagian, untuk melancarkan jalannya PEMIRA. (Kalau) ngomong substansialnya, saya kira masih kurang ya karena pelibatan mahasiswanya secara langsung dalam kebijakan dan sebagainya masih minim. Jadi, hampir sama seperti Indonesia atau mungkin ini efek dari mahasiswa yang meniru orang elit-elit di pusat. Jadi ketika mereka sedang berkuasa, kepentingan cenderung pada kelompoknya sendiri. Belum bisa menerapkan demokrasi yang sebenarnya, substansial. Ketika maju dengan prosedur-prosedur yang ada dan kita terpilih dengan prosedur yang jelas, paling tidak ketika kita mempunyai niatan baik.....substansi dari demokrasi akan terlaksana. Ketika pasca kita jadi terpilih dari PEMIRA.....seperti itu...."

Amjad melihat secara substansial, mahasiswa belum disertakan dalam proses pembuatan kebijakan. Kalaupun ada, proses yang terjadi sangat minim sekali. Yang menjadi kekhawatiran ini akibat para wakil di BEM dan BLM terlalu bermain-main dalam politik sehingga hanya mementingkan kepentingan

kelompoknya sendiri. Kekhawatiran ini terus muncul ketika PEMIRA selesai dan terus berlanjut hingga saat ini.

Sistem pemerintahan mahasiswa yang ada sekarang ini, justru sebenarnya bukan sistem yang ideal. Karena, sangat dimungkinkan partai yang mendominasi dapat terus berkuasa. Ini, sangat berpengaruh terhadap kualitas kinerja BEM maupun BLM. Apakah BEM mampu menjalankan tugas eksekutif dengan baik, atau BLM mampu menjalankan fungsi pengawasan kinerja BEM, sangat tergantung dari kualitas penyelenggaraan PEMIRA.

Setelah penyelenggaraan PEMIRA selesai, biasanya masing-masing pihak saling mengadakan konsolidasi maupun “bagi-bagi” jatah kepengurusan. Persaingan suasana di BEM dan BLM menjadi sengit diantara Ormek, karena hanya dari Ormek lah peranan terbesar dalam memberikan calon anggota BEM maupun BLM. Mengenai suasana yang terjadi, Yudha memberikan pendapat :

“iya persaingan suasana di BEM ataupun di BLM itu tidak lepas dari tren Ormek itu sendiri. Melihat kondisi mahasiswa FISIP terutama sekarang ini kesadaran secara politik sendiri sangat minim, misalnya dari perekrutan untuk menjadi BLM itu sendiri banyak sekali teman-teman yang Ormek ditempatkan pada posisi nomer satu dibandingkan teman-teman yang biasa ataupun yang tidak ikut Ormek yang fungsinya hanya sebagai vote getter. Sehingga disitu menggambarkan bahwa dinamika di BEM dan BLM itu tetap peranan Ormek yang memainkannya. Ya seperti itu jadinya.....”

Menurut Yudha, Ormek sebenarnya justru berperan karena peran teman-teman di luar Ormek kesadaran politiknya sangat kurang. Inilah yang menjadi keprihatinan sehingga membuat peran Ormek semakin besar. Iklim demokratis mungkin saja hanya menjadi wacana belaka. karena Yudha melihat sistem demokratis yang terjadi justru tidak dimanfaatkan oleh teman-teman mahasiswa yang lain. Ormek pun seperti diberi kesempatan dengan keadaan yang ada. Seperti kekhawatiran

Amjad diatas, dengan kuatnya pengaruh Ormek di BEM dan BLM, secara substansial demokrasi di FISIP tidak berjalan lancar, karena para wakil-wakil tersebut duduk hanya mementingkan kelompoknya sendiri.

III.3. Peran Ormek dalam Proses Demokratisasi Internal BEM dan BLM

III.3.1.1. Kinerja Ormek dalam Dinamika BEM

Struktur kepengurusan BEM FISIP UNAIR terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, Sekretaris, Bendahara dan Para Menteri yang membawahi Departemen-departemen. Departemen tersebut antara lain : Departemen Sosial dan Politik (Sospol), Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Departemen Minat dan Bakat (Minbak), Departemen Agama, Departemen Kesejahteraan Mahasiswa (Kesma), dan Departemen informasi dan Komunikasi (Infokom).

Keseluruhan semua pengurus BEM menjalankan fungsi eksekutif atau pelaksana kebijakan dari badan legislatif. Kondisi internal yang terjadi dalam struktur kepengurusan BEM sendiri menurut Presiden Agus Fauzi berjalan sangat kondusif. Ini disebabkan karena BEM sendiri lebih fokus ke masalah aksi atau demonstrasi untuk menurunkan harga BBM. Seperti yang diungkapkan Agus :

“kalau dibilang kondusif juga kondusif. (Karena) Sebelum akhir masa jabatan, saat ini justru tidak ada sama sekali yang lebih fokus ke masalah PEMIRA.....semuanya kan fokus pada bagaimana kita turun aksi menurunkan harga BBM.... itu aja....”

Kalaupun ada permasalahan internal dalam BEM itu sendiri, menurut Arif Febrian, lebih dikarenakan adanya perbedaan ide-ide atau pikiran yang muncul. Berikut pandangan Arif :

“Sampai saat ini sih suasana di BEM memang suasananya kondusif dalam artian gak ada konflik lah. Dalam internal pun kalo ngomong konflik pun mungkin

bukan konflik, tapi lebih terhadap ide, ngomongin ide. Banyak ide yang keluar. Cuma kan jelas beberapa orang ini punya proteksi atau otoritas terhadap ide dia...jadi, ya omong-omong itu bukan suatu konflik. Konflik yang membangun istilahnya seperti itu....”⁸

Sedangkan permasalahan lainnya, adanya perpanjangan masa jabatan dari kepengurusan BEM masa bakti 2007-2008 dikarenakan adanya keputusan penyeragaman dari pusat atau rektorat bahwa nantinya PEMIRA akan dilaksanakan secara serentak pada bulan Desember. Sehingga, kepengurusan yang seharusnya akan berakhir mulai bulan Juni diperpanjang masa baktinya.

Ada kemungkinan BEM akan membuka open rekrutmen untuk membantu kinerja para Menteri yang seharusnya masa baktinya sudah harus berakhir. Ini dikarenakan karena ada Menteri yang berasal dari angkatan 2004, sehingga yang bersangkutan bisa fokus untuk menyelesaikan masa studinya. Arif sendiri menyatakan dia sudah mulai memasuki semester 7, maka dibutuhkan semacam pembantu pelaksana untuk membantu tugas-tugas hariannya sebagai seorang Menteri. Apabila dia tidak sanggup, proses *resuffle* atau pergantian posisi Menteri menjadi solusi terakhir.

Kondisi atau suasana yang timbul dalam pemerintahan BEM tidak terlepas hanya Ormek dari GMNI sajalah yang menduduki bidang pemerintahan. Apalagi, menurut observasi peneliti, jabatan strategis dalam BEM seperti Menteri Sosial dan Politik dan Menteri Pengembangan Sumber Daya Manusia ditempati oleh massa GMNI. Posisi Riska Widya sebagai Menteri PSDM pun juga merangkap jabatan sebagai ketua komisaris GMNI FISIP.

⁸ Wawancara dilakukan pada Rabu, 3 Juni 2008 di posko Solidaritas pukul 10.30. Arif Febrian Arzany merupakan Menteri Departemen Sosial dan Politik pada kepengurusan BEM FISIP UNAIR masa bakti 2007-2008.

Padahal, dalam wawancara dengan Riska Widya, mereka menegaskan bahwa proses rekrutmen mereka melalui proses *fit and proper test*. Dimana mereka menyerahkan CV mereka, kemudian essay dan ada proses wawancara dengan Presiden dan Wakil Presiden. Arif pun mengungkapkan pendapat yang sama perihal proses rekrutmennya. Bahwa dia mendaftar dan mengikuti seleksi, kemudian mengikuti tes kemampuan serta pemaparan visi dan misi apabila terpilih. Menurut Arif proses yang terjadi sudah merupakan *open rekrutmen* atau proses rekrutmen terbuka⁹, dimana semua pihak juga berhak ikut dan berpartisipasi dalam pemilihan menteri, namun ada kendala tertentu seperti yang dikatakan Arif Febrian:

“mungkin, jadi ada kemungkinan kalau waktu itu kan habis PEMIRA. Ya kalau ngomong dominasi salah satu Ormek memang ada.....cuman, kita tidak pernah menutup (kesempatan), kalau kawan-kawan dari Ormek lain itu ingin masuk. (Kita) Ingin open rekrutmen anggota BEM.....pengurus BEM....jadi tetap ada lah terbuka bagi kawan-kawan yang lain. Cuman mungkin masih terbawa suasana, jadi dari Ormek yang lain jumlahnya gak sebanyak GMNI yang jelas memenangkan PEMIRA.....”

Dengan pendapat Arif Febrian, kondisi yang terjadi BEM, akhirnya sistem ini hanya berpeluang memunculkan aktor-aktor dari GMNI saja. Dengan situasi ini, sangat ditakutkan bahwa di BEM sendiri hanya mementingkan kelompok yang berkuasa saja, sehingga aspirasi dari masyarakat FISIP kurang terakomodasi. Apalagi, posisi Riska Widya sebagai Menteri PSDM sendiri bisa sarat dengan kepentingan politis.¹⁰

⁹ Peneliti juga menanyai Menteri lain dalam kepengurusan BEM, namun bukan dalam wawancara terekam. Karena yang bersangkutan tidak bersedia untuk direkam pernyataannya. Proses rekrutmen dia sebagai Menteri ternyata bukan melalui *open rekrutmen* melainkan melalui lobi-lobi.

¹⁰ Dalam wawancara yang dilakukan, Riska Widya menjelaskan bahwa rangkap jabatan ini terjadi karena dia dipilih menjabat sebagai Menteri terlebih dahulu, baru kemudian dia terpilih dalam suksesi komisaris di Komisariat GMNI FISIP.

Dengan suasana yang tercipta secara kondusif dalam pemerintahan BEM, teknis kerja yang terjalin dapat berlangsung secara terkoordinasi. Dalam BEM sendiri menurut Agus, teknis kerja BEM berawal dari *open rekrutmen* pengurus yang kemudian terbagi dalam enam departemen yang ada, kemudian mereka mengadakan Raker atau rapat program kerja. Dalam Raker tersebut mengatur kebijakan apa saja yang dilaksanakan dan berapa anggaran yang dibutuhkan. Sedangkan sebagai Presiden BEM, Agus mewakili FISIP untuk segala keperluan keluar dan Erma sebagai Wakil presiden mengurus segala keperluan Internal FISIP.

Sedangkan dalam internal Departemen, para Menteri mempunyai teknis kerja yang hampir mirip dengan Presiden BEM hanya dengan ruang lingkup yang lebih kecil. Menurut Riska Widya, dia menyusun program kerja selama setahun yang kemudian dia rapatkan dengan anggota staffnya kemudian yang memberi izin pelaksanaan acara, tetap Presiden BEM. Hampir sama, Arif Febrian pun menegaskan apabila dia sebagai menteri akan mengadakan acara maka dia akan mengadakan diskusi atau semacam rapat kecil dengan anggota staffnya, yang penting apabila ada masukan, ide maupun pandangan dalam diskusi tersebut, harus sejalan dengan visi dan misi dari BEM.

III.3.1.2. Kinerja Ormek dalam Dinamika BLM

Struktur kepengurusan BLM FISIP UNAIR hampir sama dengan kepengurusan BEM. Ada ketua, Sekretaris Umum yang kemudian justru lazim

dipanggil Sekjen, Bendahara dan Para Kepala Bidang (Kabid) yang membawahi enam departemen sama seperti dalam BEM, yaitu Sosial dan Politik (Sospol), Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Minat dan Bakat (Minbak), Agama, Kesejahteraan Mahasiswa (Kesma) dan Informasi dan Komunikasi (Infokom). Fungsi dari BLM ini adalah sebagai pengawas maupun pembuat kebijakan bagi badan eksekutif yang dijalankan BEM. Dapat dikatakan, BLM disini menjalankan fungsi *check and balance* terhadap segala kinerja BEM. Para anggota BLM sendiri terpilih melalui perolehan suara dari partai mereka. Ada sebelas anggota BLM yang terpilih melalui mekanisme kepartaian dan sembilan yang terpilih melalui perwakilan Himpunan Mahasiswa Jurusan atau Himajur.

Dinamika persaingan antar Ormek lebih terlihat berwarna dalam BLM. Berbeda dengan kondisi yang terjadi dalam BEM. Disinilah “bagi-bagi” kekuasaan dan pengaruh lebih terlihat jelas. Persaingan yang ada justru terlihat tajam dan cenderung tidak terselesaikan. Terutama diantara anggota BLM yang terpilih melalui PEMIRA. Dalam BLM FISIP masa bakti 2007-2008, fungsi mereka sebagai pengawas BEM, hampir tidak terlaksana dengan baik. Menurut M. Denny, kondisi yang terjadi dalam BLM sekarang sudah terjadi semenjak setahun yang lalu, ketika awal BLM terbentuk. Sehingga fungsi BLM disini menjadi melemah dan kontrol terhadap BEM tidak berjalan karena ternyata yang menjadi ketua BLM sendiri adalah wakil dari partai milik GMNI juga yang notabene adalah pemenang PEMIRA. Lebih lanjut M. Denny mengungkapkan :

“di BLM ternyata tujuan untuk, apa namanya, mengontrol sebagai fungsinya BLM itu sendiri juga melemah. Karena persaingan antara tiga organ untuk memperebutkan kursi BLM juga tarik menarik. Dan kebetulan mereka diuntungkan oleh sistem, baik sistem yang di BEM, yang mempengaruhi, maupun

dekanat. Ternyata dekanat ini bermain aman dalam artian ketika GMNI gak menang dapat dipastikan kampus itu bakal sering konflik. Jadi melalui pertimbangan itu, dekanat lebih merestui untuk GMNI maju dalam BLM 1 (ketua BLM). Dan akhirnya sistem juga dikuasai sehingga fungsi controlling di FISIP ini juga gak jalan. Buktinya selama ini, RAKER aja udah. Jadi kegiatannya mulai setahun itu perebutan kekuasaan dulu, lobi-lobi, trus sampai RAKER dan udah.....selesai mandek. Jadi koordinasi nggak ada, bisa dibilang ya...macet total. Macet total semenjak setahun yang lalu. Seperti itu...."

M. Denny dalam argumen diatas bahkan menyalahkan kondisi yang terjadi dalam BLM disebabkan oleh kesalahan dekanat. Karena dekanat sebagai pihak tertinggi dalam lingkungan fakultas lebih memilih wakil dari GMNI untuk menjadi ketua BLM. Dalam wawancara yang tidak direkam dengan M. Denny, kejadian tersebut bermula dari tidak adanya koordinasi dari para anggota BLM sendiri untuk mengadakan pemilihan ketua umum. Yang terjadi kemudian justru ada dua kelompok anggota BLM yang sama-sama mengadakan pemilihan ketua umum. Sehingga, sempat ada dua ketua BLM yang terpilih. Dekanat pun turun tangan dan memutuskan Fahrul Rozi dari partai Cinta untuk menjabat sebagai ketua BLM.

Argumen diatas juga dibenarkan oleh Anshori. Dia menyatakan bahwa kondisi yang terjadi dalam BLM sekarang tidak berjalan dengan baik. Bahkan BLM sendiri tidak berfungsi sama sekali. Lanjut Anshori :

"suasana demokratisasi dalam tanda kutip itu agak-agak mati suri di BLM,.....tiaraplah....kalo gak boleh dikatakan mati suri, tiaraplah. Berbeda dengan konteks periode lalu, dimana ketika teman-teman itu rapat, argumentasi muncul dengan....pokoknya politiknya itu cantik mainnya...indah. Tapi, ketika saat ini jangankan kita mau rapat, mas....diawal saja ketika mau pemilihan ketua saja kita sudah...apa ya? Proses demokrasi itu udah dikederaai, sudah ada luka disitu. Kita udah gak bisa memilih ketua secara demokratis, yang diundang dalam tanda kutip hanya orang-orang tertentu. Ya sudahlah itu hanya bagian dari kepentingan politik tertentu tapi, kita jalan apa adanya. Meskipun masih sakit.. Ya nggak apa-apa kalau misalnya pemilihan ketua semuanya dateng, kan

enak semuanya milih, tapi waktu itu nggak. Kita tidak bisa memungkiri semua itu, demokrasi memang seperti itu.....politik memang seperti itu.....”¹¹

Anshori sendiri membandingkan kepengurusan BLM sekarang dengan periode terdahulu karena sebelumnya dia juga duduk dalam kepengurusan BLM masa bakti 2006-2007. Anshori melihat bahwa kepengurusan BLM sebelumnya mampu menjalankan peran mereka dengan baik. Dibandingkan dengan tahun ini yang ternyata kurang mampu dalam menjalankan kerja mereka dengan baik. Lebih lanjut Anshori menambahkan :

“untuk periode ini praktis saya katakan tadi, tiarap atau hampir mati suri, beda dengan periode lalu. Periode lalu kami masih bisa mengawasi ospek dengan, dengan bargaining position nilai BLM yang cukup tinggi. Kita BLM masih dianggap tahun lalu tapi, tahun ini saya hanya ikut rapat bisa dihitung jari. Karena, memang koordinasinya juga lemah. Kita juga jarang mendapat informasi dari ketua maupun sekjennya..”

Dari tambahan informasi di atas bahkan disimpulkan bahwa dalam tubuh kepengurusan BLM sendiri kurang koordinasi dan komunikasi. Anshori sendiri menambahkan koordinasi yang ada tidak seperti BLM tahun lalu yang hampir setiap minggu berinteraksi dan dua minggu sekali mengadakan rapat.

Adanya kesan BLM bekerja sendiri-sendiri juga tergambar dari pernyataan Yeyen, dimana ia mengatakan BLM hingga sekarang tidak ada kegiatan, bahkan terakhir mereka kumpul bersama antar anggota dua minggu setelah pemilihan ketua BLM. Menurut Yeyen :

“kalau menurutku ya sama sekali kayak gak ada kegiatan, mungkin dari awal masih. Kita kan punya proker (Program Kerja)....dari awal nih....kegiatan, abis itu proker, selesai. Kayaknya di BLM kayaknya udah selesai gitu, koordinasi juga kurang. Dari ketuanya sendiri kalau ada acara gak pernah ngasih tahu. Dia

¹¹ Wawancara dilakukan pada Rabu, 3 Juni 2008 di corner Politik pukul 15.30. Hidayat Anshori merupakan wakil dari Partai Dinamis dalam BLM dan menjabat sebagai Kepala Bidang Agama pada kepengurusan BLM FISIP UNAIR masa bakti 2007-2008.

malah nanyain gimana Prokermu? gimana lho....aku sendiri kan bukan ketua.....ini, aku staffnya. Sedangkan ketuanya sendiri juga jarang (ada) jadi, bukannya aku sendiri gak ambil peduli...cuman ketika ditanyain kalau aku nanya ada acara apa "oiya, barusan ada acara ini", baru dia ngomong....gak ada konfirmasi sama sekali....kalau dia kayaknya tuh kalau kerja sendiri-sendiri, ketua bersama ininya....wakilnya...."

Lanjut Yeyen :

"terakhir (ketemuan) itu, kalau yang dikonfirmasi ke ketua terakhir kali, menurutku pas RAKER....kapan ya ? sebulan setelah terpilih kalo gak salah seminggu atau 2 minggu setelah terpilih...."¹²

Buruknya kinerja BLM di FISIP juga dicermati oleh ketua komisariat PMII dan HMI. Menurut Amjad, kondisi dalam badan legislatif yang kurang berfungsi dengan baik sebagai lembaga pengontrol tindakan eksekutif, diakibatkan karena adanya tekanan dari badan eksekutif yang tinggi. Ini juga terjadi akibat bukan oposisi yang memenangkan kursi di wilayah legislatif. Lanjut Amjad :

"kalau kita ngomong idealnya hubungan antara eksekutif dan legislatif.....ya , legislatif sebagai fungsi kontrol dan eksekutif kan yang dikontrol. Seperti itu.....tapi, tidak usah berpikir terlalu jauh, di negara manapun fungsi legislatif itu masih kurang kuat. Di negara manapun yang mereka ngomong idealismenya demokrasinya sangat tinggi, saya melihat masih belum menemukan hal itu. Masih ada semacam tekanan-tekanan eksekutif yang lebih tinggi, yang lebih kuat pada legislatif..."

"Jadi, saya melihatnya hubungan antara eksekutif legislatif bisa dilihat (dari) bagaimana siapa yang menjadi mayoritas....dari mayoritas partai apa yang menjadi caleg di legislatif. Dan siapa, partai apa yang menang... kalau mungkin yang menang oposisi akan sedikit lebih mewarnai meskipun kadang-kadang kebijakan yang diambil oleh eksekutif sedikit diganggu, tapi tetap kebijakan itu jalan...."

Kenyataan yang diungkapkan Amjad, semakin membuat sulit posisi BLM dalam pemerintahan mahasiswa ini. Apalagi dengan pernyataan Yudha yang menganggap permasalahan dalam BLM ini terjadi akibat posisi strategis dalam

¹² Wawancara dilakukan pada Kamis, 5 Juni 2008 di corner lantai 2 depan KP Sosiologi pukul 11.00 Yeyen R merupakan wakil dari Partai Bunga dalam BLM FISIP UNAIR masa bakti 2007-2008.

BLM, yaitu jabatan ketua BLM, dijabat oleh GMNI juga sehingga fungsi pengawas jalannya eksekutif menjadi tidak jalan.

“...peran ketua BLM sangat penting dan itu dipegang oleh GMNI sehingga BLM yang seharusnya fungsinya sebagai pengawas dan pengatur jalannya eksekutif kemudian menjadi selalu sinergis dan selalu mesra.”

Memang persaingan antar Ormek dalam BLM sangat meresahkan. Persaingan yang terjadi dapat dipetakan menjadi “kelompok” merah yang diwakili Ormek GMNI dan “kelompok” hijau yang diwakili Ormek HMI, PMII dan KAMMI. Sepertinya koordinasi kekuatan antar kelompok merah sendiri lebih kuat, karena pengaruh mereka juga telah sampai pada wakil legislatif dari Himajur atau Senat jurusan. Sedangkan, menurut pengakuan Yeyen, koordinasi antar kelompok hijau, yang sebenarnya dalam PEMIRA telah sukses mengadakan koalisi dalam pencalonan capres, menjadi tidak terkoordinasi dan cenderung “tidak peduli” dengan permasalahannya yang ada.

Ini yang membuat kondisi di BLM, akhirnya seperti kondisi dalam BEM. Suasana yang kondusif karena adanya miskomunikasi, kurang komunikasi dan ketidakpedulian dari anggota BLM itu sendiri. Tentang kondisi yang ada dalam BLM sekarang ini Fahrul Rozi sebagai ketua BLM, menyatakan :

“Sebenarnya kalo dilihat sih masih dalam taraf kondusif ya. Itu akan berbeda dengan persaingan sebelumnya, ketika belum kita semua duduk di BLM persaingan itu benar-benar terlihat tapi ketika dalam satu organisasi itu persaingan cenderung lebih dingin atau kondusif seperti itu....”¹³

¹³ Wawancara dilakukan pada Rabu, 4 Juni 2008 di Student Center FISIP pukul 12.30 Fahrul Rozi merupakan wakil dari Partai Cinta dalam BLM FISIP UNAIR dan menjabat sebagai ketua BLM masa bakti 2007-2008.

Peneliti sendiri dalam mencari Rozi, hampir mengalami kesulitan seperti para anggota BLMnya. Namun, karena keterbatasan waktu atau karena memanggungan menjawab lebih jauh, jawaban yang diutarakan Rozi masih jauh dari kata memuaskan. Rozi sendiri selain berpendapat situasi di BLM sangat kondusif juga, proses pemilihannya dia sebagai ketua terpilih secara demokratis, karena masing-masing individu bisa memberikan suaranya dan apabila ada permasalahan semuanya bisa di “rembug” atau didiskusikan. Kenyataan ini sangat berbeda dengan pernyataan teman-teman yang menjadi anggota BLM wakil dari partai.

Akhirnya, Alfian sebagai Sekjen BLM memberi pernyataan yang kurang lebih sama dengan Rozi. Alfian sendiri terpilih menjadi anggota BLM melalui jalur pemilihan Senat di Himajur. Alfian merupakan wakil dari Himajur Administrasi Negara. Dari jawaban dan posisi yang dia jabat sekarang ini, besar kemungkinan Alfian juga merupakan perpanjangan tangan dari ketua BLM itu sendiri. Berikut jawaban Alfian mengenai situasi di BLM :

“Ini jadi seperti ini, jelas teman-teman di BLM membawa kepentingannya bendera itu masing-masing. Kemudian, akan terjadi tarik ulur disana tapi, disini jelas di tegaskan jangan sampai kepentingan bendera ini, menjadi malah menjadi suatu kendala untuk mewujudkan kepentingannya teman-teman FISIP sendiri. Disana kita tekankan sehingga, bagaimanapun ketika terjadi dialektika untuk saling tarik ulur kepentingan disana akan ketemu, satu untuk mahasiswa....”

Lanjut Alfian :

“perbedaan itu haruslah ada....karena apa, konflik yang terjadi dari perbedaan itu jangan sampai terjadi suatu konflik yang destroy, jadi konflik yang menjatuhkan malah. Jadi, konflik yang terjadi karena perbedaan ini, sedapat mungkin memotivasi dan menciptakan suasana yang lebih bagus dari masing-masing kepentingan tadi...jadi posisinya disana...”¹⁴

¹⁴ Wawancara dilakukan pada Rabu, 4 Juni 2008 di Student Center FISIP pukul 12.30 Arif Alfian Haji merupakan wakil dari Senat jurusan Administrasi Negara dalam BLM FISIP UNAIR dan menjabat sebagai Sekretaris Umum BLM masa bakti 2007-2008

Alfan sepertinya berusaha mencari “aman” dan netral dalam situasi ini. Tambah Alfan, selama ini fungsi *check and balance* dari BLM sendiri sudah berjalan, apabila ada program-program kecil semacam diskusi dari BEM, BLM bertugas hanya memantau saja. Sedangkan dengan program-program besar semisal UFO (Ospeknya FISIP) maka BLM juga diharapkan tahu teknis dan detail kerjanya untuk mengawasi jalannya program BEM tersebut.

Soal teknis kerja di bidang lain akhirnya juga bermasalah, karena tidak ada monitoring dari pihak lain terhadap kinerja BLM. Dalam bidang infokom, misalnya M. Denny menceritakan keluhan yang dihadapi, sehingga aspirasi menjadi tidak tersalurkan :

“lazimnya teknik bahwa kerja di BLM itu sesuai dengan hasil dari RAKER . Ketika saya berusaha berbicara tentang, bidang saya infokom ini....berarti salah satunya adalah pengelolaan masalah opini yang dikeluarkan oleh warga FISIP yang ditaruh di kotak-kotak....dan ternyata kotaknya juga bermasalah....dan aspirasi tidak tersalurkan, ketika tersalurkan sampai BLM pun BLM tidak mempunyai daya....karena opini itu setiap kali ingin melawan sistem. Ketika BEM dan BLM itu terpegang oleh sistem yang mana dikuasai oleh GMNI, ya berarti selesai...”

Dalam proses penyaluran saran, opini maupun aspirasi di BLM sendiri, sudah menyediakan semacam kotak yang berfungsi untuk menampung aspirasi warga FISIP dan papan wacana untuk bagi masing-masing pihak untuk mengutarakan pendapatnya. Namun, menurut M. Denny sendiri sebagai Kabid Infokom, dia mengakui proses yang ada tidak berjalan dengan baik, karena adanya masalah dalam hal penyediaan sarana. Menurut observasi peneliti, papan wacana yang dimaksud pun tidak memberikan suatu informasi yang baik, karena tampak sekali sudah tidak terawat. M. Denny mengatakan apabila ada yang menempelkan

wacana pamflet dan mencoba untuk berpendapat, pastilah dalam waktu dekat pamflet tersebut sudah diambil atau dicabut.

Teknis kerja menurut M. Denny melihat dari sisi dia sebagai Kabid Infokom, lain lagi pandangan Anshori yang melihat teknis kerja BLM secara keseluruhan. Karena kurangnya koordinasi, BLM yang seharusnya pada saat-saat sekarang ini melakukan rapat membahas konstitusi maupun RUU PEMIRA, tidak berjalan dengan baik. Sedangkan Yeyen berpendapat, karena BLM sendiri tidak pernah mengadakan suatu acara, maka segala kegiatan hanya berhenti sampai disini saja. Fungsi pengawasan terhadap kinerja BEM menjadi tidak terwujud dan potensi dari BLM tahun ini tidak tergali sepenuhnya.

Berbeda dengan proses perekrutan para anggota BEM, para anggota BLM ini terutama wakil dari partai, dipilih melalui internal partai. Jadi, kebijakan pemilihan calon anggota legislatif langsung dari partai yang merupakan perpanjangan dari Ormek. Konstalasi kekuatan di BLM dari partai-partai sendiri seperti ini : Partai Cinta (GMNI) diwakili oleh Fahrul Rozi, Norma. K dan Ajeng Newanda, Partai Pelangi Kampus (HMI) diwakili oleh M. Denny Puja dan Meinia, Partai Dinamis (KAMMI) diwakili oleh Hidayat Anshori dan Fatiatun Nayyiroh, Partai Bunga (KAMMI) diwakili oleh Yeyen.R dan Partai Anak Muda (GMNI) diwakili oleh Ricky RW. Sedangkan anggota sisanya berasal dari senat perwakilan jurusan.

Proses rekrutmen sendiri juga menarik ketika proses yang terjadi tidak sepenuhnya terjadi secara transparan. M. Denny, Anshori dan Yeyen bercerita mengenai proses rekrutmen mereka dari partai menuju kursi BLM :

“dari internal HMI sendiri pasti persaingan untuk menuju kesana dan kebetulan saya dekat dengan ketua KOMnya. Jadi bisa minta tolong dan akhirnya di lihat kompetensi trus basis massa dan sebagainya. Saya lebih diunggulkan daripada kader-kader politik yang lain. Akhirnya keluar nama saya dan kebetulan dianggap paling senior diantara calon-calon yang lain. Dan menjadi caleg nomor 1. Jadi, fix itu yang terjadi...”

Kemudian Anshori:

“kalau dari partai dinamis sendiri, rekrutmennya kita jelas. Dari segi loyalitas dan totalitas. Kita tidak mungkin memunculkan kader yang belum itulah apa ya...belum terbukti. Kontribusinya jadi pertama loyalitas kemudian totalitas, apakah ia berhak dicalonkan. Tapi, di partai dinamis....ada semacam budaya. Kita tidak mungkin mencalonkan diri...jadi, semuanya itu tidak ada yang mencalonkan diri...baik menjadi caleg atau capres. Tapi, di partai dinamis itu ada budaya, begitu dicalonkan kita tidak boleh menolak....kita sudah seperti itu...”

dan Yeyen :

“rekrutmen dari partainya sendiri ? kalau rekrutmen dari partainya sendiriprosesnya gak ini ya...cuman....kan ditanya kesiapan. Mau nggak ? jadi ini kan misalnya tau sendiri...saya sendiri, waktu itu kebetulan sudah lama di partai. Dibanding anak-anak baru. “sudahlah kamu saja yang ini...” walaupun banyak yang dibawahnya juga (kader baru) . Kalau dari partaiku kan cuman satu yang masuk, jadinya ya sudah. Pertama lihat dari segi pengalaman juga, misalkan kalau anak baru, mendingan dialokasikan di untuk partai sendiri....mereka juga perlu pengalaman lebih akhirnya....temanku yang satu angkatan udah mantan BLM, waktu itu ya sudah akhirnya ditunjuk...”

Setiap partai atau katakanlah Ormek, memiliki teknis kerja sendiri dalam proses rekrutmen mereka. Apabila, dilihat dari pernyataan anggota BLM diatas, mereka terpilih untuk menjadi calon legislatif karena mereka adalah kader terbaik dari partai masing-masing. Dan partai tidak mau berisiko untuk menurunkan kader-kader muda mereka untuk bertarung di ajang sekelas PEMIRA. Tapi, dengan kondisi yang terjadi di BLM, bisa ditanyakan kembali akuntabilitas mereka sebagai wakil-wakil partai, karena secara legitimasi mereka mempunyai tanggung jawab yang sangat besar terhadap masyarakat FISIP.

III.4. Mengatasi Perbedaan Orientasi dalam BEM dan BLM

Dalam suatu organisasi maupun kelompok, perbedaan pastilah sesuatu yang menonjol disana. Demikian pula dalam struktur organisasi kemahasiswaan. Dalam berorganisasi, mahasiswa dituntut untuk mampu berkoordinasi maupun berkomunikasi agar terjalin suatu kerjasama yang menghasilkan *input* yang menguntungkan semua pihak. Dalam BEM FISIP UNAIR masa bakti 2007-2008, tidak terlihat adanya perbedaan orientasi dalam tubuh organisasi. Kalaupun ada suatu perbedaan, tataran ide maupun konsep, biasanya kondisi tersebut cepat teratasi sehingga suasana yang kondusif lebih terwujud dalam BEM.

Anshori melihat secara realistis bagaimana menghadapi perbedaan orientasi yang terjadi dalam organisasi intra Kampus ini. Menurutnya komunikasi politik diantara para anggota dapat menjadi solusi, agar fungsi BLM menjadi ke fungsi sebenarnya, yaitu pengawasan terhadap BEM. Selain itu seharusnya ketika dalam BLM, para anggota harus mementingkan kepentingan bersama dibanding kepentingan kelompoknya. Lanjut Anshori :

“kalau saya melihat, berbeda itu sesuatu hal yang apa ya....yang wajar yang indah. Tapi kalau saya pribadi, saya menyikapi perbedaan itu pasti, bagaimana biar komunikasi tetap lancar. Kita ketika duduk di BLM, bukan representasi dari partai lagi....kita representasi dari mahasiswa FISIP. Sangat tidak arif ketika kita ada di BLM pun masih membawa nama-nama partai. Jadi ketika kita di BLM, kita bisa menempatkan diri.....kita sebagai wakil mahasiswa disitu. Ketika ada perbedaan dengan partai lain dengan fraksi lain, tentunya komunikasi politik yang bagus.....harus bisa terjalin. Jadi, tidak dengan mengedepankan kepentingan Ormek. Kepentingan partai, justru lebih dikedepankan. Bagaimana solusi yang cerdas untuk membawa FISIP atau BLM FISIP ini untuk menjadi lembaga yang lebih yang sebagaimana mestinya itu..”

Amjad sebagai ketua Komisariat dari PMII memiliki pendapat yang sama dengan Anshori diatas. Ia melihat adanya perbedaan orientasi seharusnya disikapi secara

bijaksana, memerlukan suatu keselarasan dan persamaan persepsi terlebih dahulu sebelum diadakan suatu kegiatan ataupun acara. Amjad menerangkan :

“kalau kita punya grand tema yang sama.....tanpa dikomando pun akan ada keselarasan, tapi ketika ada grand tema yang berbeda...paling tidak itu selalu ada, semacam pendiskusian dulu musyawarah lah istilahnya untuk kemudian menyamakan persepsi tadi. Jadi mau nggak mau....untuk menciptakan pemerintahan yang baik paling tidak, memiliki tujuan yang sama dulu dan perspektif kita sama tentang pemerintahan setelah itu baru bisa terlaksana apa yang diharapkan. Jadi, kalau ingin menyelaraskan tujuan, untuk mengurangi konflik yang terjadi paling tidak ada musyawarah dulu....untuk menyamakan persepsi itu.....”

Dapat dikatakan Amjad menginginkan adanya musyawarah terlebih dahulu apabila ada permasalahan yang mungkin saja dapat mengganggu kinerja dalam BLM itu sendiri untuk bekerja secara maksimal. Proses musyawarah sepertinya belum dapat terwujud dalam BLM karena *voting* atau pemungutan suara lebih sering digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. M. Denny menyatakan apabila ada perbedaan pendapat dan argumen langsung *voting*. Pendapat yang sama diutarakan oleh Anshori dan Yeyen yang menganggap jalan terbaik dalam menyikapi perbedaan pendapat dengan melakukan *voting*.

Alfan pun menegaskan dengan adanya perbedaan orientasi, maka *voting* menjadi alternatif terakhir untuk membahas permasalahan yang krusial. Lanjut

Alfan :

“...kita akan, apa ya namanya, cari posisi yang paling aman, apakah ini permasalahan yang benar-benar krusial, sehingga harus benar-benar dijalankan cara-cara voting dan sebagainya...kalau ini bukan dalam posisi yang krusial saya pikir, bisa bermusyawarah kemudian...dicari solusi yang terbaik....”

Namun, biasanya cara seperti ini kurang menguntungkan bagi pihak minoritas.

Apalagi, yang menjadi “mayoritas” menjadi sangat apatis terhadap jalannya perubahan. Mayoritas disini biasanya sudah nyaman dengan kondisi yang ada.

Sehingga kebijakan yang sudah matang disusun oleh pihak minoritas, bisa tidak jalan dalam forum karena adanya kepentingan tertentu. Yeyen sendiri berharap dalam BLM sendiri, apabila mereka telah terpilih menjadi wakil mahasiswa dalam legislatif mereka mampu untuk merangkul kepentingan dari mahasiswa sendiri. Dia menginginkan tidak ada persaingan partai dalam legislatif, jadi lebih ada tanggung jawab dalam BLM sendiri. Harapan yang kurang lebih sama juga diutarakan oleh Alfian :

“....jelas teman-teman di BLM membawa kepentingannya bendera itu masing-masing. Kemudian, akan terjadi tarik ulur disana....tapi, disini jelas di tegaskan jangan sampai kepentingan bendera ini, menjadi malah menjadi suatu kendala untuk mewujudkan kepentingannya teman-teman FISIP sendiri. Disana kita tekankan sehingga, bagaimanapun ketika terjadi dialektika untuk saling tarik ulur kepentingan disana akan ketemu ya satu untuk mahasiswa....”

Tetapi melihat kondisi BLM yang masih jauh dari konsep ideal sebagai sebuah lembaga pengawas kinerja BEM, ketakutan yang terjadi menurut Rahadi akan menimbulkan efek yang kurang bagus dari keberadaan FISIP sendiri di masa mendatang. Tidak hanya dalam BLM namun juga dalam BEM itu sendiri. Rahadi melihat ada “pembiaran” dari sistem yang sekarang ini dapat membuat FISIP semakin kerdil karena tidak pernah ada pertarungan yang “fair”. Pertarungan yang dimaksud tentunya PEMIRA yang menjadi “jalan masuk” bagi mahasiswa untuk mengaktualisasi diri mereka dalam lembaga kemahasiswaan. Apabila, sistem demokratis yang ada sekarang berjalan dengan lancar pastilah GMNI sebagai Ormek yang telah empat tahun “berkuasa” di FISIP akan turun. Apabila *check and balancenya* berjalan, dan serba transparan maka masyarakat FISIP dapat dengan jelas melihat apakah mereka yang berkuasa ini pantas untuk dipilih kembali atau tidak. Melihat yang terjadi di lingkungan FISIP sekarang ini, dengan kondisi

BLM yang tidak produktif, maka kinerja BEM sendiri juga tidak terpantau dengan baik. Dan, BLM sendiri bisa berjalan semaunya sendiri karena BLM sendiri pun tidak memiliki lembaga pengawasnya. Dengan rutinitas dari sebuah sistem yang terus berjalan seperti ini, Rahadi kembali menambahkan bahwa agenda-agenda politik yang mereka usung di kemudian hari, ditakutkan menjadi tidak mempunyai “taring” atau *bargaining position* yang kuat.¹⁵ Sehingga, masyarakat FISIP sendiri menjadi semakin apatis dan tidak peduli terhadap permasalahan maupun realitas sosial yang ada dalam kampus maupun masyarakat.



¹⁵ Kekhawatiran tersebut sudah muncul dalam aksi solidaritas menentang kenaikan harga BBM yang dilakukan mahasiswa dengan membentuk Aliansi Mahasiswa Menggugat dan mendirikan Posko Solidaritas di depan kampus UNAIR, namun gaungnya tidak terdengar sama sekali karena kurangnya antusiasme dan apatisme dari mahasiswa yang lain.

Bab IV

Kesimpulan dan Saran

IV.1. Kesimpulan

Dinamika mahasiswa FISIP dalam melakukan proses pembelajaran politik sangat menemui banyaknya rintangan maupun permasalahan diantara mereka. Tidak dapat dipungkiri peran Ormek yang sangat besar dalam lembaga Intra Kampus dalam BEM dan BLM. GMNI sebagai Ormek yang terlihat paling solid hingga saat ini telah menguasai ranah "perpolitikan kampus" selama empat tahun terakhir. Pengaruh mereka dapat dikatakan sangat besar dalam BEM maupun BLM.

Apabila dalam BEM tersebut kondisi demokratisasi Internal yang terjadi cenderung bersifat kondusif karena hanya satu partai besar yang menguasai posisi strategis di dalamnya sedangkan dengan kondisi BLM yang terdiri dari berbagai macam Ormek konflik yang terjadi lebih sulit dihindarkan. Buruknya koordinasi serta komunikasi membuat BLM sendiri tidak mampu melakukan tugasnya sebagai pengawas kinerja BEM dengan baik. Dan walaupun terdiri dari Ormek lain selain GMNI, namun mereka hanya menjadi minoritas disana dimana suara mereka tidak dianggap dan kecenderungan yang timbul mereka menjadi apatis dan aspirasi tidak terwujud dengan baik. Ini yang membuat kondisi demokratisasi Internal dalam BLM menjadi kurang kondusif, karena peran Ormek yang sangat jelas terlihat penuh dengan kepentingan disana.

Dengan akan berakhirnya masa jabatan mereka dalam bulan Desember, momen dalam menggarap penelitian ini sangat tepat karena dapat terlihat kinerja mereka dalam BEM dan BLM sehingga dapat dilakukan evaluasi sementara terhadap kondisi yang ada hingga saat ini. Dapat ditarik kesimpulan mengenai Mahasiswa dan Politik Kampus adalah :

1. Ada empat Ormek besar dalam FISIP yang selalu bertarung dalam pemilihan umum mahasiswa. Mereka adalah GMNI, HMI, PMII dan KAMMI. Persaingan antar mereka sangatlah ketat. Jika memakai indikator pendekatan Dahl untuk menjelaskan proses demokrasi yang terjadi dalam FISIP, secara rotasi kekuasaan, memang sudah berjalan, disebabkan kendala masa studi, namun sistem yang berkuasa masih berjalan sehingga GMNI masih menguasai lembaga perwakilan mahasiswa di FISIP. Adanya proses rekrutmen yang tidak terbuka dan transparan, dalam penentuan wakil yang akan duduk dalam lembaga legislatif. Kondisi yang terjadi di BLM menegaskan apakah benar mereka merupakan kader terbaik dalam partai (Ormek) masing-masing. Kalaupun ada yang terpilih, biasanya kader GMNI pula. Suasana demokrasi sangat terasa dalam terselenggaranya Pemilihan Umum yang telah dijalankan dengan baik, meskipun belum sepenuhnya warga FISIP mau menggunakan hak pilihnya, karena besarnya tekanan dari Ormek. Kentalnya suasana persaingan antar Ormek menimbulkan kondisi dalam menikmati hak-hak dasar di kampus FISIP juga belum terwujud, karena sarana informasi dan aspirasi bagi mahasiswa tidak berjalan dengan baik karena adanya tekanan-tekanan

pihak tertentu. Kesimpulannya melalui pendekatan Dahl, Mahasiswa khususnya Ormek dalam FISIP belum mampu melaksanakan proses demokrasi dengan maksimal, bahkan kecenderungan yang ada akan bahaya timbulnya etnosentrisme.

2. Menurut hasil PEMIRA 2007 kekuatan antar Ormek dalam FISIP dapat dikatakan tidak merata, karena massa GMNI menguasai pemerintahan eksekutif yaitu BEM. Namun, Ormek lainnya seperti HMI, PMII dan KAMMI, mereka semua memiliki wakil masing-masing dalam lembaga legislatif yaitu BLM. Apabila memakai indikator demokrasi deliberatif, kinerja masing-masing Ormek dalam mencerminkan prinsip demokrasi belum sepenuhnya terwujud. Mengingat suasana ajang PEMIRA yang sangat hambar, terlihat jelas *output* dari PEMIRA itu sendiri kurang memberikan hasil yang maksimal. Adanya apatisme dan kurangnya ketertarikan mahasiswa pemberi suara terhadap politik dalam kehidupan sehari-hari, serta adanya elitisme partai politik dalam wujud Ormek. Ini membuat komunitas FISIP disini merasa jauh dari lembaga perwakilannya. Keterasingan tersebut membuat program yang dijalankan tidak berjalan dengan efektif karena adanya “jarak” antara massa dengan BEM maupun BLM. Faktor utamanya karena kurangnya informasi, koordinasi serta kurang menghargai adanya pluralisme dalam kehidupan “berpolitik kampus”.
3. Dalam mengatasi perbedaan orientasi antar Ormek, dimana mereka menjalankan organisasi Intra Kampus, BEM maupun BLM, mereka lebih

cenderung untuk memakai pendekatan musyawarah ataupun diskusi dalam menyikapi perbedaan. Namun, apabila permasalahan yang dihadapi sudah krusial, biasanya pendekatan *voting* atau pemungutan suara lebih sering dipakai. Walaupun Ormek minoritas biasanya kurang diuntungkan lewat sistem tersebut.

IV. 2. Saran

Dalam penelitian mengenai Mahasiswa dan Politik Kampus ini terlihat jelas peran Ormek dalam demokratisasi Internal BEM dan BLM. Dan terlihat bagaimana mahasiswa dalam internalnya sendiri belum kompak dalam melakukan perubahan. Salah satu solusi yang dapat mereka lakukan adalah seringnya melakukan koordinasi dan komunikasi sehingga pemberdayaan Organisasi Intra Kampus (BEM maupun BLM) dapat berfungsi secara efektif. Solusi lain yang dapat ditawarkan adalah bagaimana membangun relasi yang kuat antar lembaga perwakilan dengan massanya, karena kebijakan yang diambil oleh BEM maupun BLM tidak relevan dengan kondisi yang ada, sehingga komunitas FISIP sendiri tidak memperoleh manfaat yang nyata dari program maupun kebijakan yang dihasilkan dan dijalankan. Selain itu, diluar dari penelitian ini, masih ada hal mendetail yang belum dapat dijelaskan adalah bagaimana strategi para Ormek dalam mengambil massa dalam PEMIRA, hal tersebut juga sangat penting karena dalam momen-momen PEMIRA selalu ada indikasi, apakah mereka menggunakan cara-cara *coercion* dalam menarik massa, yang tentunya sangat bertentangan dengan proses demokrasi. Kemudian variabel Ormek LMND dalam Kehidupan

politik kampus di FISIP ternyata juga harus diperhitungkan walaupun suara atau dukungan yang mereka peroleh masih sangat minim. Mereka pun hampir memperoleh wakil dalam legislatif di PEMIRA lalu. Dan berbicara mengenai Organisasi Intra Kampus serta wakil dalam Legislatif, peran Himpunan Mahasiswa Jurusan pun juga sangat signifikan. Apalagi ternyata peran Ormek juga sudah memasuki ranah Himajur. Tidak hanya dalam BEM maupun BLM saja. Sehingga dalam penelitian selanjutnya dapat dimasukkan Himajur sebagai Organisasi intra Kampus mendampingi BEM dan BLM.



DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Penelitian:

- Analisa Kekuatan Politik di Indonesia: Pilihan Artikel Prisma*, Jakarta: LP3S, 1988.
- Aribowo, *Sejarah, Pola dan Format Gerakan Mahasiswa Indonesia: Studi mengenai Gerakan Mahasiswa di Surabaya dan Yogyakarta*. Surabaya: Lembaga Penelitian UA, 1997.
- Aspinall, Edward, dkk., ed. *Titik Tolak Reformasi*. Yogyakarta: LkiS, 2000.
- Budiharjo, Miriam. *Dasar-dasar ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 1977.
- Burgin, Burhan. *Penelitian kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Gaffar, Affan. *Politik Indonesia Transisi menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Held, David. *Models of Democracy*. Penerjemah Abdul Haris. Jakarta: Akbar Tandjung Institute, 2006.
- JA, Denny. *Gerakan Mahasiswa dan Politik Kaum Muda era 80-an*. Yogyakarta: LkiS, 2006.
- Kusumaatmadja, Sarwono. *Politik untuk Kaum Muda*. Depok: Koekoesan, 2007.
- Macridis, Roy dan Bernard Brown., ed. *Teori Perbandingan Politik*. Alih bahasa A.R Henry Sitanggang. Jakarta: Erlangga, 1996.
- Manan, Munafrizal. *Gerakan Rakyat Melawan Elit*, Yogyakarta: Resist Book, 2005.
- Mantra, Ida Bagoes. *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Mas'ood, Mohtar. *Negara, Kapital dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Miller, David dan Larry Siedentop., ed. *Politik dalam Perspektif Pemikiran, Filsafat dan Teori*. Koordinator penerjemah Nazaruddin Syamsuddin. Jakarta: CV Rajawali, 1983.

Poerbopranoto, Koentjoro. *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, Jakarta: Eresco. 1978.

Sorensen, Georg. *Demokrasi dan Demokratisasi*. alih bahasa. I Made Krisna. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003.

Suharsih, dan Ign Mahendra K. *Bergerak Bersama Rakyat*, Yogyakarta: Resist Book, 2007.

Sulaiman, M. Yafis. *Mahasiswa dan Politik Orde Baru: Studi tentang fluktuasi Gerakan Mahasiswa di Surabaya dan Faktor-Faktor yang mempengaruhinya tahun 1990-1998*, Surabaya, FISIP UNAIR, 1999.

Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo. 1992..

Suyanto, Bagong, dkk., ed. *Metode Penelitian Sosial* kerjasama Balai Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga dengan Airlangga University Press. 1995.

Surat Kabar :

Kompas. "Nasionalisme ala Pemuda". Sabtu, 19 Agustus 2006.

Internet :

- ◆ Suryaman, Edi. 2008. *Arah Politik Kampus Miniatur Pembelajaran*. <http://hmi-saintek.blogspot.com/2008/04/arah-politikkampusminiatur.html/>
- ◆ Perdana, Patriot Rieldo. 2006. *Organisasi Kemahasiswaan*. http://www.bung-hatta.info/tulisan_178.ubh
- ◆ [http://www.pbhmi.com/ profile isi](http://www.pbhmi.com/profile_isi)
- ◆ <http://www.gmnisurabaya.org/tentanggmni/>
- ◆ Mashudi. 2003. *Genesis Gerakan Mahasiswa 1998*. <http://mashudi.blogdrive.com/archive/5.html>
- ◆ <http://www.pmiugm.co.nr/>
- ◆ http://www.fisip.unair.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=5&Itemid=6

Peraturan Perundang-undangan :

- ◆ Keputusan Mendikbud RI Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
- ◆ Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Nomor: 052/J03.1.13/KM/2007 tentang: Pengesahan Susunan Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)-Fakultas Universitas Airlangga Masa Bakti Tahun 2007-2008.
- ◆ Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Nomor: 051/J03.1.13/KM/2007 tentang: Pengesahan Susunan Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BLM)-Fakultas Universitas Airlangga Masa Bakti Tahun 2007-2008.
- ◆ Amandemen Konstitusi Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga 2007-2008.
- ◆ Undang-Undang ORMAWA No. 01/BLM.07/II/2006 tentang Pemilihan Umum Raya 2006/2007.